

**PERKEMBANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI)
DI KABUPATEN KLATEN DAN PERMASALAHAN
YANG DIHADAPI PADA PEMILU
1987 – 1992**

SKRIPSI

**Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Oleh

Valentina Yuliani

N I M : 88 214 023

NIRM : 880052010604120022

**JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1994**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERKEMBANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI)
DI KABUPATEN KLATEN DAN PERMASALAHAN
YANG DIHADAPI PADA PEMILU
1987 – 1992**

Oleh

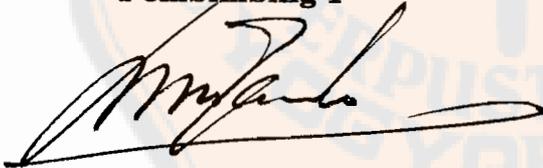
Valentina Yuliani

N I M : 88 214 023

NIRM : 880052010604120022

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. G. Moedjanto, M.A.

Tanggal : 3 - 10 - 1994

Pembimbing II



Drs. S. Adisusila, J.R.

Tanggal : 3 - 10 - 1994

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

S K R I P S I

PERKEMBANGAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA (PDI)
DI KABUPATEN KLATEN DAN PERMASALAHAN
YANG DIHADAPI PADA PEMILU
1987 - 1992

Oleh

Valentina Yuliani

NIM : 88 214 023

NIRM : 880052010604120022

Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji
Pada Tanggal 6 Agustus 1994

Susunan Dewan Penguji

Ketua : Drs. J. Markiswo.
Sekretaris : Drs. A.K. Wiharyanto.
Anggota : Drs. G. Moedjanto. M.A.
Anggota : Drs. S. Adisusilo. J.R.
Anggota : Drs. A.K. Wiharyanto



Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma

Dekan



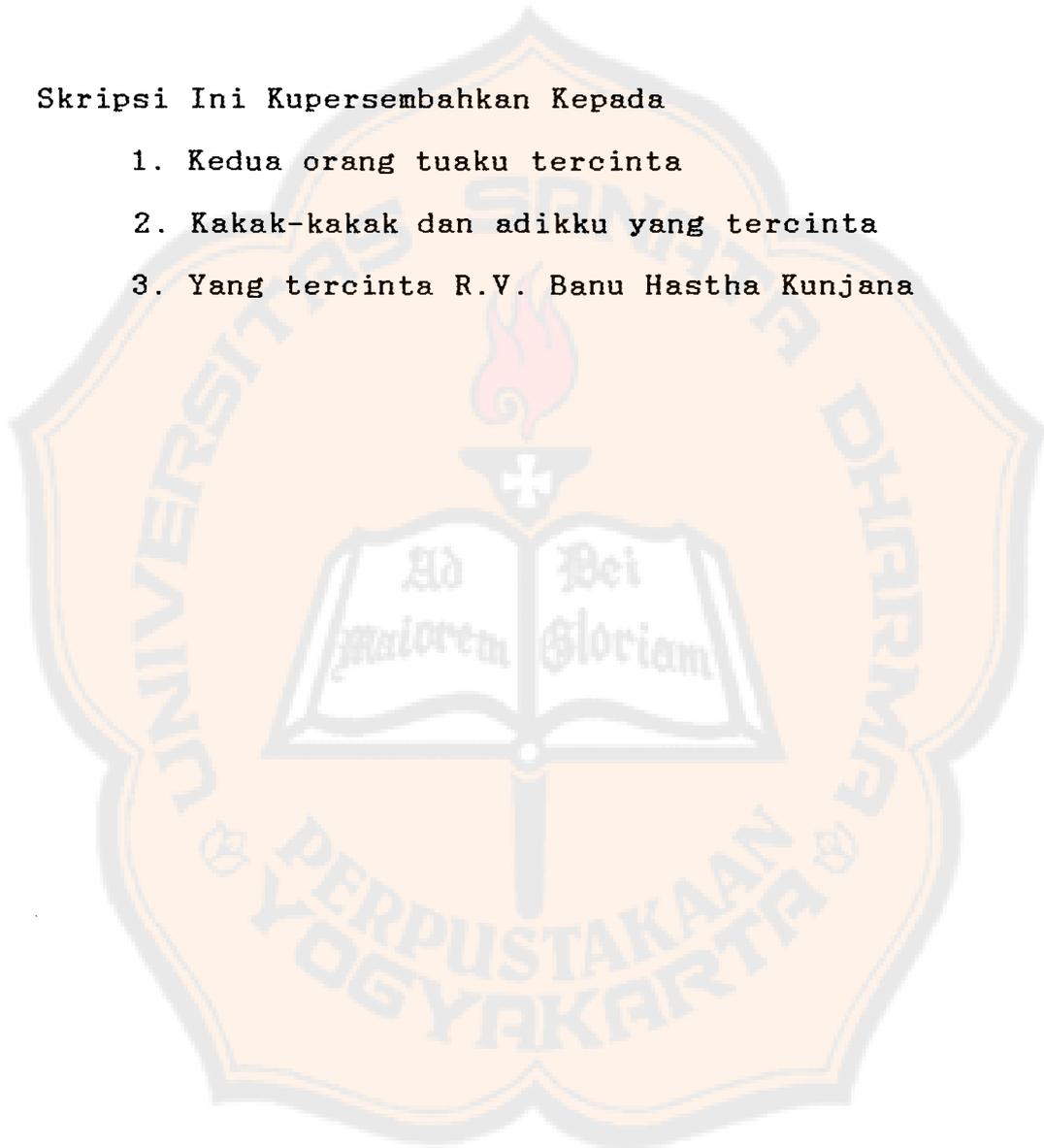
Priyono Marwan

(Dr. A. Priyono Marwan, S.J.)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada

1. Kedua orang tuaku tercinta
2. Kakak-kakak dan adikku yang tercinta
3. Yang tercinta R.V. Banu Hastha Kunjana



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Perkembangan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Di Kabupaten Klaten Dan Permasalahan Yang Dihadapi Pada Pemilu 1987 - 1992".

Skripsi ini penulis susun guna melengkapi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Pendidikan dalam bidang Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.

Mengingat keterbatasan penulis, baik dalam hal pengetahuan maupun dalam kemampuan menulis, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari siapapun juga guna memperbaiki skripsi ini.

Keberhasilan penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, disamping atas usaha penulis juga karena bantuan dari berbagai pihak. Atas bantuan tersebut penulis menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. G. Moedjanto, M.A, yang telah sudi memberi bimbingan dan mengoreksi skripsi ini.
2. Bapak Drs. S. Adisusila, J.R, yang telah membimbing dan mendampingi penulisan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Staf karyawan perpustakaan Universitas Sanata Dharma.

4. Bapak Ketua DPC PDI Kabupaten Klaten beserta stafnya.

5. Bapak Kepala Kantor Statistik Kabupaten Klaten beserta stafnya.

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis di dalam mencari bahan-bahan penyusunan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, semoga Tuhan melimpahkan rahmatNya.

Semoga skripsi ini berguna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta,..... 1994

Penulis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN DEWAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah	12
C. Metode Penelitian	13
D. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA PDI	16
A. Terbentuknya PDI Di Pusat	16
1. Kepartaian Di Indonesia	16
2. Pengelompokan Partai	21
3. Penyederhanaan Partai	23
B. Terbentuknya PDI Kabupaten Klaten	25
BAB III PDI KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILU TAHUN 1987 DAN TAHUN 1992	32
A. PDI Kabupaten Klaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 1987	32

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Tahap Persiapan Pemilu	35
2. Pelaksanaan Kampanye	37
3. Pelaksanaan Pemungutan Suara	42
4. Penetapan Hasil Akhir	45
B. Keberhasilan PDI Kabupaten Klaten Dalam Pemilu 1992	48
1. Tahap Persiapan	51
2. Pelaksanaan Kampanye	53
3. Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara ..	59
4. Penetapan Hasil Pemilu	62
BAB IV PERBANDINGAN PDI KABUPATEN KLATEN PADA PEMILU TAHUN 1987 DAN PEMILU TAHUN 1992	65
A. Tahap Persiapan	67
B. Pelaksanaan Kampanye	72
C. Perolehan Suara dan Hasil Pemilu	77
D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Perkembangan PDI Pada Pemilu 1987 dan Pemilu 1992	84
E. Peranan PDI dalam Praktek Demokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Klaten	90
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
DAFTAR INFORMAN	103
LAMPIRAN	105

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 REKAPITULASI HASIL PEMILU 1987	46
TABEL 2 PEROLEHAN SUARA PDI KHUSUS UNTUK DPRD II ...	46
TABEL 3 PEROLEHAN SUARA PDI KHUSUS UNTUK DPRD II PADA PEMILU 1992	63
TABEL 4 REKAPITULASI HASIL PEMILU 1992	64
TABEL 5 PERBANDINGAN HASIL PEMILU 1987 DAN PEMILU 1992 PDI KABUPATEN KLATEN UNTUK DPRD II	81
TABEL 6 KENAIKAN PDI DALAM PEROLEHAN SUARA UNTUK DPRD II	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI PDI DI TINGKAT CABANG...	70
GRAFIK : HASIL PEMILU TAHUN 1982 - 1987 - 1992 DAERAH TINGKAT II KLATEN.....	80



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Kehidupan parpol sejak Orde Lama selalu mengalami perubahan. Perubahan ini diawali dengan ide pemerintah Orde Lama untuk mengurangi jumlah parpol sehingga hanya tinggal sembilan parpol setelah PKI dibubarkan bersamaan dengan tumbangannya Orde Lama.

Dengan tumbangannya Orde Lama, Bangsa Indonesia memasuki kehidupan baru yaitu kehidupan di jaman Orde Baru. Kegagalan Orde Lama tentunya tidak ingin diulangi oleh Orde Baru. Maka format politik baru segera ditawarkan dengan munculnya Golkar dan ABRI sebagai kekuatan baru di bidang politik. Dan dengan alasan demi stabilitas nasional, proses penyederhanaan parpol diteruskan oleh Orde Baru. Proses penyederhanaan dimulai dengan mengelompokkan sembilan parpol menjadi dua kelompok yaitu kelompok spirituil dan kelompok nasionalis. Kelompok nasionalis kemudian menamakan dirinya Kelompok Demokrasi Pembangunan (KDP). Kelompok Demokrasi Pembangunan merupakan gabungan dari PNI, Parkindo, Partai Murba, Partai Katholik dan IPKI. Parpol yang bergabung dalam KDP pada pemilu 1971 mengalami kekalahan, maka dalam keadaan yang tak ada pilihan lain akhirnya memfusikan diri menjadi PDI pada tahun 1973.

Sejak kehadirannya, PDI telah mengikuti pemilu sebanyak empat kali yaitu pemilu tahun 1977, tahun 1982, tahun 1987 dan pemilu tahun 1992. Dan ternyata dalam perkembangannya proses penyederhanaan parpol tidak berhenti pada proses fusi. Karena dipandang fusi masih menimbulkan perselisihan ideologi dalam tubuh parpol, maka demi alasan stabilitas nasional pemerintah terdorong untuk merubah kehidupan parpol dengan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi parpol pada tahun 1985. Berarti ciri yang menjadi kekhususan parpol sudah tidak ada lagi, sedangkan yang membedakan parpol yang satu dengan parpol yang lainnya bukan lagi ideologinya melainkan program-programnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pemilu merupakan peristiwa penting bagi parpol, karena dengan pemilu akan mempengaruhi perkembangan parpol. Yang menjadi masalah utama dalam skripsi ini adalah : Mengapa PDI di Kabupaten Klaten pada pemilu 1987-1992 mengalami perkembangan ? Sedangkan tujuan utama penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui gambaran terjadinya perkembangan PDI di Kabupaten Klaten pada pemilu 1987 dan pemilu 1992. Metode yang digunakan dalam pembahasan adalah metode komparatif dan metode pengumpulan datanya dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Dalam pemilu tahun 1987 dan pemilu tahun 1992 jika dilihat dalam perolehan suara menunjukkan adanya perkembangan dalam tubuh partai berlambangkan kepala banteng. Pada pemilu tahun 1987 PDI di Kabupaten Klaten memperoleh 108.069 suara, dan mampu menaikkan jumlah kursinya di DPRD tingkat II Klaten dari lima kursi hasil pemilu tahun 1982 menjadi enam kursi pada pemilu tahun 1987. Pemilu tahun 1992 PDI mampu menaikkan perolehan suaranya menjadi 190.613 suara dan menempatkan sebelas wakilnya di DPRD tingkat II Klaten.

Perkembangan PDI Kabupaten Klaten yang semacam itu ditinjau dari segi organisasinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain : konsolidasi organisasi yang semakin mantap, materi kampanye, ditampilkannya tokoh idola, kualitas personal partai, sikap pemerintah dan ABRI, kondisi kehidupan PPP dan Golkar, serta semakin aktifnya wakil-wakil PDI di DPRD tingkat II dalam menyalurkan aspirasi rakyat yang sangat mewarnai perkembangan PDI di Kabupaten Klaten.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan nasional negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Kesejahteraan umum atau kesejahteraan bagi seluruh rakyat, merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, bangsa Indonesia giat melaksanakan pembangunan. Pembangunan tersebut meliputi berbagai bidang, yaitu bidang sosial, ekonomi budaya dan politik. Keempat bidang tersebut saling tergantung dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya dalam mencapai keberhasilan pembangunan.

Salah satu tugas negara adalah membina stabilitas nasional. Di mana stabilitas politik merupakan salah satu unsur di dalamnya yang merupakan sasaran yang harus dicapai sebab merupakan syarat pokok untuk menjamin keberhasilan pembangunan. Pembangunan politik perlu mendapat perhatian sebab masyarakat selalu mengalami perkembangan dan kemajuan. Proses perkembangan ini merupakan bagian dari proses kehidupan, pendewasaan dan pengembangan identitas diri untuk merealisasikan tujuan dan cita-cita nasional negara Indonesia.

Pembangunan politik dapat dilaksanakan melalui wadah sistem politik atau organisasi politik, sebab dengan organisasi politik segala ide atau aspirasi rakyat dapat tersalurkan. Melalui organisasi politiklah yang dianggap dapat mengubah nasib rakyat. Salah satu organisasi politik yang berperan dalam pembangunan khususnya pembangunan dibidang politik di negara Indonesia adalah Partai Demokrasi Indonesia.

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.¹⁾

Partai politik sangat berperan dalam meningkatkan kecerdasan rakyat dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan kesadaran politik pada khususnya. Partai politik merupakan alat utama untuk menyalurkan aspirasi rakyat sehingga aspirasi rakyat dapat tersalur dalam suatu arus yang teratur. Disamping itu partai politik juga berfungsi untuk memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan pemeliharaan keamanan bangsa.²⁾

1) Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1982, h. 160-161.

2) Soedjatmoko, "The Role of Political Parties in Indonesia" dalam: P.W. Thayer (ed), Nationalism and Progress in Free Asia, Baltimore: The John Hopkins Press, 1956, h. 130.

Salah satu yang menonjol dalam perkembangan partai di Indonesia adalah penyederhanaan jumlah partai. Di Indonesia partai politik telah ada sejak jaman kolonial. Dalam perkembangannya ternyata pemerintah merasakan adanya keuntungan yang berarti dengan adanya partai politik. Maka pemerintah mengeluarkan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang intinya memberikan kebebasan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Dengan dikeluarkannya maklumat tersebut banyak berdiri partai politik sehingga kehidupan politik di Indonesia menganut sistem politik multi-partai.

Berdirinya banyak partai ternyata juga berdampak negatif bagi kehidupan negara Indonesia, sebab negara Indonesia adalah negara yang masih muda, yang baru menyusun masyarakatnya ke alam kemerdekaan. Belum mantapnya kehidupan partai politik juga berpengaruh terhadap ketidakstabilan lembaga eksekutif. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah menyelenggarakan pemilihan umum dengan harapan dapat mengurangi jumlah partai, tetapi harapan tersebut tidak terpenuhi. Melihat keadaan tersebut pemerintah mulai merasakan perlunya melakukan penyederhanaan dalam arti mengurangi jumlah partai.

Keadaan atau situasi politik yang tidak mencapai kestabilan menyebabkan pemerintah mengeluarkan Penpres No. 7 tahun 1959. Isi Penpres tersebut tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. Penpres dikeluarkan

dengan latar belakang bahwa partai politik merupakan alat demokrasi, sehingga perkembangannya perlu diatur. Dengan dikeluarkannya Penpres tersebut berarti Maklumat 3 November 1945 tidak berlaku lagi. Hasil dari seleksi Penpres tersebut, ada sembilan partai politik yang lolos disamping Golongan Karya. Namun usaha untuk menstabilkan kehidupan kepartaian ternyata belum berhasil, hal ini terbukti dengan meletuskan pemberontakan PKI. Maka untuk menjaga kehidupan kepartaian, pemerintah memandang perlu untuk memberikan dasar pengaturan kehidupan kepartaian. Maka dikeluarkanlah Ketetapan MPR No. XXII/MPRS/1966, tentang kepartaian, kekaryaan dan keormasan. Isi pokok ketetapan MPRS tersebut adalah:

Agar pemerintah bersama-sama dengan DPRGR segera membuat undang-undang yang mengatur tentang kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan.

Meskipun usaha penyederhanaan partai dari berpuluh-puluh partai telah berhasil, namun dalam perkembangannya masih juga dirasakan perlunya penyederhanaan partai. Pada tahun 1970 penyederhanaan partai mulai dilakukan kembali. Pemerintah mulai merintis tiga kelompok besar dari sembilan partai setelah PKI dibubarkan. Kelompok-kelompok tersebut adalah golongan Nasionalis, golongan Spiritual selain Golongan Karya. Golongan Nasionalis kemudian menjadi Kelompok Demokrasi Pembangunan. Kelompok Demokrasi Pembangunan akhirnya memfusikan diri menjadi satu wadah kegiatan politik dengan nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan Golongan Spiritual memfusikan

diri menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PDI merupakan hasil fusi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (PARKINDO), Partai Katolik, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Partai Murba dengan demikian di Indonesia ada dua partai politik dan satu Golongan Karya. Untuk memberikan wadah bagi partai politik dan Golongan Karya pemerintah mengeluarkan UU No. 3 tahun 1975 tentang Partai politik dan Golongan Karya. Bab I pasal 1 ayat 1 UU ini menyatakan:

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan partai politik dan Golongan Karya adalah organisasi kekuatan sosial politik yang merupakan hasil pembaharuan dan penyederhanaan kehidupan politik di Indonesia, yaitu:

- a. dua partai politik yang pada saat berlakunya undang-undang ini bernama:
 1. Partai Persatuan Pembangunan
 2. Partai Demokrasi Indonesia
- b. satu Golongan Karya yang pada saat berlakunya undang-undang ini bernama Golongan Karya.

Dalam perkembangannya undang-undang ini disempurnakan dan penyempurnaannya dituangkan dalam Undang-Undang RI No. 3 tahun 1985.

Sedangkan kegiatan rakyat dalam partai politik merupakan bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik adalah semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum, menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok

penekan, kelompok kepentingan, duduk dalam lembaga politik seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye atau menghadiri kelompok diskusi.³⁾

Partisipasi politik melalui partai politik yang dipilihnya merupakan kesadaran dan kepercayaan pada partai politik tersebut. Partai politik tersebut dipilih karena dianggap dapat menyalurkan segala ide atau aspirasi seseorang atau sekelompok orang. Besar kecilnya kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat pada organisasi politik dapat mempengaruhi perkembangan partai politik. Hal ini dapat diamati misalnya melalui hasil perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (Demokrasi Pancasila) dalam negara Republik Indonesia.⁴⁾ Adapun tujuan pemilu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam dewan permusyawaratan maupun dewan perwakilan. Wakil-wakil rakyat yang terpilih akan membawakan aspirasi rakyat dalam membangun dan mempertahankan negara Indonesia.

³⁾Miriam Budiardjo, loc. cit.

⁴⁾C.S.T. Kansil, Memahami Pemilihan Umum dan Referendum (Sarana Demokrasi Pancasila), Jakarta:IND-Co, 1986, h. 1.

Dalam setiap penyelenggaraan pemilu di negara Indonesia, terdapat tiga unsur yang ikut secara aktif yaitu organisasi sosial politik sebagai peserta pemilu. Kedua, pemerintah dengan aparaturnya sebagai penyelenggara yang mempersiapkan prasarana, gelanggang dan menciptakan iklim yang demokratis. Unsur yang ketiga adalah rakyat sebagai pemilih dalam pemilihan umum.

Di Indonesia pemilihan umum telah dilaksanakan enam kali, satu kali pada masa demokrasi liberal atau parlementer dan lima kali pada jaman Orde Baru. Pemilu tersebut diselenggarakan pada tahun 1955 dan berturut-turut setiap lima tahun sekali yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan tahun 1992. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemilu di Indonesia terutama masa Orde Baru sudah merupakan bagian dari budaya politik di Indonesia.

Pemilu pada tahun 1955 mempunyai keistimewaan pada sistem kepartaian di Indonesia yaitu sistem politik multi-partai. Adapun tujuan diselenggarakan adalah untuk mengurangi jumlah partai politik sebab banyak partai pada waktu itu berpengaruh besar terhadap ketidakstabilan pemerintah. Namun tujuan itu tidak pernah terwujud sampai tumbangnyanya Orde Lama. Pada masa ini sudah ada usaha menyederhanakan jumlah partai yang nantinya usaha ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan Orde Baru.

Pemilu pada tahun 1971 merupakan babak baru bagi sejarah politik di Indonesia. Pemilu ini untuk pertama

kalinya di bawah pemerintahan Orde Baru. Organisasi peserta pemilu tinggal sembilan partai politik dan satu Golongan Karya. Kesembilan partai politik tersebut dikelompokkan menjadi dua yaitu Golongan Nasionalis yang kemudian menamakan dirinya Kelompok Demokrasi Pembangunan dan Golongan Spiritual. Sedangkan Golongan Karya merupakan pendatang baru yang mendapat dukungan pemerintah dan ABRI. Pemilu yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No.5 tahun 1969 ini merupakan hasil persiapan yang telah disiapkan Orde Baru sejak tahun 1966. Golongan Karya pada masa ini mampu menempatkan posisinya yang strategis, berdiri diantara partai peninggalan Orde Lama yang tak mampu membawa ke pemerintahan yang stabil. Dengan dukungan dan fasilitas pemerintah, sementara dilain pihak partai politik kurang menunjukkan antusiasme yang tinggi, Golongan Karya memperoleh kemenangan mutlak pada pemilu tahun 1971. Sedangkan Partai Nasional Indonesia, yang pada masa sebelumnya merupakan partai terbesar, mengalami kehancuran yang berarti dengan memperoleh 20 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Kemenangan Golongan Karya ini berdasarkan pada prakondisi yang mendahuluinya maupun kekuatan utama pendukung pendatang baru tersebut.

Pemilu yang kedua pada masa Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1977. Salah satu yang menonjol pada masa ini adalah pengurangan jumlah partai. Dari sembilan partai menjadi dua partai yaitu PDI dan PPP disamping Golongan

Karya. Kedua partai tersebut merupakan partai yang baru, yang dapat dikatakan belum siap menghadapi pemilu. Mereka belum siap sebab baru membangun kekuatannya mulai dari nol dalam segala segi. Dengan adanya fusi, PDI mengalami kesulitan yang berarti dalam perkembangannya. PDI harus menyelesaikan masalah-masalah dalam tubuhnya sendiri sebab bagaimanapun juga fusi partai-partai politik yang berbeda baik latar belakang, pendapat maupun ideologinya akan menjadi sumber perselisihan. Baik PDI maupun PPP sebagai peserta baru untuk pertama kalinya mencoba menampilkan dan mempertaruhkan identitasnya untuk mencari massa pendukungnya. Berhasil tidaknya usaha ini dapat diamati melalui hasil pemilu, PPP memperoleh 99 kursi, Golongan Karya 232 kursi, dan PDI 29 kursi di DPR pusat.

Tahun 1982 bangsa Indonesia memasuki pesta demokrasi yang ketiga pada masa pemerintahan Orde Baru. Walaupun PPP dan PDI mengalami kekalahan pada pemilu yang lalu kedua partai tersebut tetap mempunyai semangat untuk ambil bagian dalam kampanye tahun ini. Bagi partai berlambang banteng, pemilu tahun ini merupakan yang paling tragis. Partai Demokrasi Indonesia diliputi konflik yang berkepanjangan sejak lima tahun terakhir ini. Kehidupan PDI lebih difokuskan untuk mengadakan konsolidasi diri guna menyelesaikan konflik yang terjadi dalam tubuhnya. Pertikaian-pertikaian yang terjadi di tingkat pusat belum diselesaikan secara mufakat sehingga terjadi saling memecat diantara pengurus, sehingga tidak

memungkinkan PDI melakukan dan menawarkan programnya secara mantap dan kongkrit. Keadaan semacam ini tentunya menimbulkan pandangan negatif bagi partai tersebut. Situasi semacam itu tentunya juga akan berpengaruh terhadap perolehan suara pada pemilu tahun 1982. Perolehan suara pada tahun ini merupakan perolehan suara yang sangat mengecewakan bagi PDI dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. PPP memperoleh 94 kursi, Golongan Karya semakin mantap eksistensinya dengan 246 kursi, sedangkan PDI memperoleh 24 kursi.

Pemilu tahun 1987 merupakan pemilu yang pertama kali Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi orpol dan ormas. Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi orpol dan ormas dituangkan dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1985 menyempurnakan Undang-Undang No. 3 tahun 1975 tentang partai politik dan Golongan Karya. Undang-Undang No. 3 tahun 1975, Bab II Pasal 2 menyatakan:

- (1). Asas partai politik dan Golongan Karya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2). Selain ketentuan tersebut dalam ayat (1) pasal ini, asas/ciri partai politik dan golongan karya yang telah ada pada saat diundangkannya undang-undang ini adalah juga asas/ciri partai politik dan Golongan Karya.

Sedangkan UU No.3 tahun 1985 Bab II, pasal 2 menyatakan:

- (1). Partai politik dan Golongan Karya berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas.
- (2). Asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan dikeluarkannya undang-undang baru tersebut berarti PPP dan PDI harus menanggalkan asas yang menjadi ciri khusus masing-masing partai. Bagi PDI penanggalan asas tidak berpengaruh terhadap perolehan suara sedangkan bagi PPP masa ini merupakan saat yang mengecewakan. Menjelang pemilu tahun 1987 PPP mengalami konflik intern yang mencapai puncaknya dengan keluarnya NU dari PPP. Maka tidak mengherankan jika perolehan suara PPP mengalami penurunan yang drastis dari 94 kursi menjadi 61 kursi di DPR Pusat. Hal ini disebabkan PPP kehilangan pengikat yang kuat bagi pemersatu umat Islam yaitu tanda gambar kabah yang diganti dengan tanda gambar bintang. Demikian juga keluarnya NU sebab NU merupakan ormas yang paling banyak menarik massa dalam PPP. Sedangkan PDI walaupun masih menempati posisinya sebagai partai gurem, tetapi perolehan suaranya mengalami kenaikan yang mencengangkan, dari 24 kursi menjadi 40 kursi. Kemajuan PDI ini disebabkan oleh mapannya kehidupan PDI dibanding tahun yang lalu. Di bawah kepemimpinan Suryadi PDI mengadakan pembersihan-pembersihan dan persiapan-persiapan dalam menghadapi pemilu dengan lebih baik. Di samping itu juga pemerintah sudah mulai menciptakan alam demokrasi yang lebih terbuka.

Pemilihan umum tahun 1992 dipandang dari sudut perolehan suara merupakan pemilu yang lain dari pemilu tahun-tahun yang lalu. Pemilu tahun ini merupakan yang pertama kalinya Golongan Karya tidak mampu meningkatkan

perolehan kursi di DPR Pusat bahkan telah kehilangan 17 kursi. Sedangkan PPP berhasil meningkatkan 1 kursi dan PDI memperoleh tambahan 16 kursi, berarti perolehan kursi PDI tahun ini menjadi 56 kursi. PDI yang mengidentikkan dirinya partainya orang miskin mampu membawa dirinya ke sikap yang lebih netral, hal ini dapat dilihat melalui kegiatannya dalam kampanye. Sedangkan Golongan Karya yang pada saat kampanye lebih condong perhatiannya pada pembangunan umat Islam mengurangi peluang PPP untuk menarik massa Islam setelah diberlakukannya Pancasila sebagai satu-satunya asas. Keadaan semacam ini tentunya memberikan penilaian sendiri dari massa non-Islam, mereka akan lebih memihak PDI. Disamping itu program pembangunan PDI yang lebih ditekankan untuk rakyat kecil merupakan program yang efektif untuk menarik massa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, didalam penulisan skripsi ini penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut: bagaimana proses fusi PDI di Kabupaten Klaten? Bagaimana keterlibatan DPC PDI Kabupaten Klaten dalam pemilihan umum tahun 1987 dan pemilihan umum tahun 1992? Faktor-faktor apa yang mendukung dan yang menghambat perkembangan PDI antara pemilu tahun 1987 dan tahun 1992? Bagaimana perbandingan PDI di Kabupaten Klaten antara pemilu tahun 1987 dan tahun 1992? Bagaimana peranan PDI dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peranan PDI dalam praktek demokrasi di Kabupaten Klaten ?

C. Metode Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Data diperoleh dengan jalan:

a. Penelitian kepustakaan (library research) yaitu menemukan data melalui sumber-sumber berupa tulisan yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti dan

b. Penelitian lapangan (field research) yang dilakukan dengan cara:

1. angket (questionnaire) yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden dan

2. wawancara (interview) yaitu mengadakan tanya jawab dengan responden.

2. Teknik Sampling.

Dalam penelitian penulis menggunakan teknik non-random sampling, yaitu hanya individu tertentu dalam populasi yang dijadikan sample.

3. Metode analisis data.

Data yang penulis peroleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif. Data dipisahkan-pisahkan menurut kualitasnya. Dengan demikian diperoleh data yang berjenjang-jenjang menurut kualitasnya. Sebagai kelanjutannya dipergunakan metode komparatif, yaitu membandingkan teori-teori pendapat para ahli, dengan data yang diperoleh melalui penelitian.

4. Responden.

Responden dalam penelitian yang penulis gunakan adalah DPC PDI Kabupaten Klaten.

5. Daerah penelitian

Daerah penelitian adalah Kabupaten Klaten.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar lebih sistematis disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang partai politik di Indonesia dan proses munculnya PDI serta perkembangannya secara garis besar.

BAB II : LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA PDI

Bab ini berisi tentang munculnya partai politik di Indonesia sampai terbentuknya PDI dan terbentuknya DPC PDI Kabupaten Klaten.

BAB III : PDI KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILU TAHUN 1987 DAN PEMILU TAHUN 1992

Didalam bab ini akan dibahas perkembangan PDI pada pemilu tahun 1987 dan tahun 1992 dilihat dari persiapan dalam menghadapi kampanye, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara dan hasil perolehan suara yang dicapai.

BAB IV : PERBANDINGAN PDI KABUPATEN KLATEN PADA PEMILU TAHUN 1987 DAN TAHUN 1992

Bab ini berisi tentang perbandingan baik dari segi persiapan, pelaksanaan maupun hasil yang diperoleh PDI pada pemilu tahun 1987 dan 1992. Hal ini untuk mengetahui mengapa pada pemilu tahun 1992 PDI mengalami kenaikan dari 6 kursi menjadi 11 kursi. Disamping itu dalam bab ini juga akan dibahas tentang peranan PDI dalam praktek demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

Setelah mengikuti uraian di atas, maka bab berikutnya akan diawali dengan membahas proses terbentuknya PDI baik di pusat maupun di Kabupaten Klaten.

BAB II

LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA PDI

A. Terbentuknya PDI Pusat

1. Kepartaian di Indonesia

Di Indonesia partai politik sebenarnya telah ada sejak masa kolonial. Dan dalam perkembangannya, setelah proklamasi kemerdekaan partai-partai politik muncul kembali sebagai akibat langsung dari Dekrit Pemerintah yang dikeluarkan tanggal 3 November 1945 atas usul Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNIP), yang menyatakan bahwa "pemerintah memperbolehkan pembentukan partai-partai politik, sebab dengan keberadaan partai-partai politik semua aliran pemikiran yang akan ditemukan dalam masyarakat dapat diarahkan ke dalam suatu arus yang teratur."⁵⁾ Dengan dasar maklumat pemerintah tersebut berdiri berbagai partai politik, baik yang melanjutkan partai politik yang telah ada sejak jaman Belanda dan Jepang maupun partai politik yang baru berdiri.

Menurut M. Rusli Karim dalam bukunya "Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut", setelah dikeluarkannya maklumat tersebut Indonesia telah memiliki 28 partai politik.⁶⁾ Partai politik tersebut

⁵⁾ Soedjatmoko, loc. cit.

⁶⁾ M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut, Jakarta: Rajawali, 1983, h. 65-66.

diklasifikasikan sebagai berikut: (1). dasar Ketuhanan: Masjumi (Majelis Sjuro Muslimin Indonesia), Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII), Pergerakan Tarbiyah Islamiah (PERTI), Partai Kristen Indonesia (PARKINDO), Partai Katolik, dan Nahdlatul Ulama (NU), (2). dasar Kebangsaan: Partai Nasional Indonesia (PNI), Persatuan Indonesia Raya (PIR), Partai Indonesia Raya (PARINDRA), Partai Rakyat Indonesia (PRI), partai Demokrasi Rakyat, Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Wanita Rakyat (PWR), Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI), Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Serikat Rakyat Jelata (PRJ), Partai Tani Indonesia (PTI), Wanita Demokrat Indonesia (WDI), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), (3). dasar Marxisme: Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia, Partai Murba, Partai Buruh, Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (PERMAI), (4). Partai lain-lain: Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI), dan Partai Indo Nasional (PIN).

Partai politik tumbuh dan berkembang selama revolusi fisik dan mencapai puncaknya pada tahun 1955 ketika diselenggarakan pemilihan umum untuk pertama kalinya pada saat mana hampir terdapat sebanyak 36 partai politik. Kirannya yang menimbulkan efek negatif dalam kehidupan politik bangsa Indonesia adalah pertumbuhan partai politik yang berlebihan dan juga belum mantapnya ideologi kenegaraan yang dijadikan asasnya. Kurang mantapnya kehidupan partai sering menimbulkan perpecahan

atau pemisahan dari beberapa partai. Keadaan kehidupan partai semacam itu tentunya sering menimbulkan kegoncangan-kegoncangan dalam masyarakat. Selain itu juga berpengaruh pada kestabilan lembaga eksekutif sebab Indonesia saat itu menganut sistem pemerintahan parlementer dimana kedudukan lembaga eksekutif bergantung kepada lembaga perwakilan rakyat. Pengaruh di lembaga eksekutif terlihat sekali dengan jatuh bangunnya kabinet.

Sering terjadinya gejolak dalam kehidupan di masyarakat dan goyahnya pemerintahan akibat kehidupan partai politik yang belum mantap menyebabkan pemerintah menyelenggarakan pemilihan umum. Pada umumnya ada dua macam sistem pemilihan umum yaitu Sistem Distrik dan Sistem Proportional Representation atau sistem Perwakilan Berimbang. Sistem Distrik merupakan sistem yang berdasarkan kesatuan geografis. Dalam satu distrik hanya ada satu kursi dalam dewan perwakilan rakyat. Untuk itu dalam satu negara dibagi dalam beberapa distrik. Yang dapat menduduki kursi di dewan perwakilan rakyat adalah calon yang memperoleh suara terbanyak, sedangkan calon lainnya dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi. Dalam Sistem Perwakilan Berimbang perolehan kursi di dewan perwakilan rakyat berdasarkan atas perolehan suara yang berhasil dicapai dengan dihitung berdasarkan suatu perimbangan yang sudah ditentukan (1:400.000). Jadi dalam sistem Perwakilan Berimbang tidak ada suara yang hilang. Setiap suara

dihitung, dalam arti juga bahwa sisa-sisa suara dari daerah pemilihan yang satu dapat ditambahkan pada jumlah suara di daerah yang lain guna memperoleh kursi tambahan. Pemilihan umum yang pertama kali tersebut diselenggarakan pada tahun 1955. Maksud diselenggarakannya pemilihan umum adalah untuk mengurangi jumlah partai dengan harapan kehidupan partai dan pemerintahan akan lebih stabil yang tentunya berpengaruh langsung pada kehidupan negara dan bangsa. Namun harapan tersebut tidak pernah terwujud sebab pemilihan umum semakin mengukuhkan komposisi partai politik dalam jumlah yang masih besar yaitu sebanyak 27 partai yang mendapat kursi dalam parlemen.

Pertikaian antar partai yang menyebabkan jatuh banggunya kabinet, pergolakan-pergolakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante hasil pemilihan umum semakin menyudutkan posisi partai politik. Banyak tokoh yang menyalahkan partai politik dengan mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan partai politik yang banyak justru menyulitkan pemerintah dan masyarakat.

Keadaan tersebut mengundang banyak pihak untuk mencoba sistem politik yang lain. Pihak tersebut antara lain Presiden Soekarno sendiri. Pada tanggal 30 Oktober 1956 didepan utusan pemuda-pemuda semua partai politik, dalam puncak kekesalannya mengatakan:

Ada orang mentertawakan mimpi Bung Karno, mimpi-mimpi, mimpi, mimpi pada siang bolong, katanya. Baiklah kalau saudara-saudara tidak

suka dengan mimpi, kalau saudara-saudara tidak senang kalau saya berbicara tentang mimpi di siang bolong saya akan menggantikan kata tersebut: Aku tidak bermimpi, aku tidak mimpi di siang bolong. Saya menganjurkan bahwa para pemimpin menyelenggarakan musyawarah dan mengambil keputusan bersama untuk menguburkan partai-partai....⁷⁾

Demikian juga pidatonya di depan kongres PGRI pada tanggal 30 Oktober 1956, Bung Karno mengemukakan hal yang sama. Secara lantang mengajak untuk menguburkan partai secara bersama-sama. Bahkan Bung Karno menganggap banyaknya partai tidaklah rasional dan harus dirasionalkan.

Kekalutan-kekalutan di dalam sidang konstituante dan parlemen yang berakibat kehidupan politik tidak mencapai kestabilan menyebabkan pemerintah mulai memikirkan langkah untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Pada tanggal 30 Desember 1959 pemerintah mengeluarkan Penpres No.7 tahun 1959 mengenai syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian. Kemudian mengeluarkan Penpres No.13/1960 yang mengatur pengakuan, pengswasan dan pembubaran partai. Dalam hubungannya dengan penyederhanaan partai akhirnya pada tahun 1960 Bung Karno membubarkan partai-partai dan hanya tinggal 10 partai besar yang pada gilirannya harus mendapatkan restu

⁷⁾Daniel Dhakidae, "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", dalam : Kekuatan Politik Dalam Konflik dan Integrasi, Kumpulan artikel Prisma Jakarta: LP3ES, 1981, h. 11.

dari Bung Karno sebagai tanda lolos dari saringan. Kesepuluh partai tersebut antara lain: PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katolik, PERTI, Partai Murba, dan PARTINDO (Partai Indonesia). Tetapi kemudian PKI dibubarkan pada tanggal 12 Maret 1966 setelah melakukan pemberontakan.

2. Pengelompokan Partai

Setelah PKI dibubarkan pada tahun 1966 demikian juga tumbangnya pemerintah Orde Lama kehidupan politik memasuki suasana yang baru yaitu suasana kehidupan Orde Baru. Pada tahun 1966 Partai Murba direhabilitasi setelah dibekukan pemerintah pada tahun 1965. Demikian juga untuk menjaga dan menertibkan kehidupan kepartaian, dalam sidang umum yang keempat MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS No. XXII/MPRS/1966 tentang kepartaian, keormasan dan kekaryaannya.⁸⁾ Satu usaha lain yang tampak dalam pembinaan institusi dimasa Orde Baru telah didirikannya Partai Muslim Indonesia (PARMUSI) pada tanggal 20 Februari 1968. Maksud didirikannya PARMUSI tersebut, karena dipandang aspirasi-aspirasi ormas-ormas Islam yang sudah ada belum tersalurkan secara efektif.

Masih dalam rangka usaha pembinaan kehidupan partai-partai politik, pada tanggal 7 Februari 1970 Presiden Soeharto menyerukan agar pada pemilihan umum tahun 1971 partai politik tetap menjaga stabilitas nasional.

⁸⁾S. Toto Pandoyo, Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945, Yogyakarta: Liberty, 1981, h. 112.

Disamping itu juga menghindarkan diri dari perpecahan dan kesimpangsiuran. Tetapi yang terpenting dalam perkembangan kepartaian di Indonesia adalah seruan presiden kepada partai-partai politik untuk memikirkan pengelompokan partai-partai politik. Pembagian kelompok dibagi tiga yaitu kelompok spiritual, kelompok material (Nasionalis) disamping adanya Golongan Karya. Adapun tujuan pengelompokan ini ada dua, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah untuk mempertahankan stabilitas nasional dan kelancaran pembangunan dalam menghadapi pemilihan umum.⁹⁾ Lebih lanjut lagi tujuan jangka panjangnya adalah penyederhanaan kepartaian secara konstitusional sesuai dengan ketetapan No.XXII/MPRS/1966.¹⁰⁾

Gagasan pengelompokan partai itu pada mulanya mendapat sambutan yang baik dari tokoh-tokoh pimpinan partai. Tetapi kemudian timbul sedikit hambatan karena adanya perbedaan dari Partai Katolik dan PARKINDO dimana kedua partai tersebut tidak mau dikelompokkan ke dalam kelompok spiritual. Mereka tidak sanggup dikelompokkan ke dalam kelompok spiritual dengan alasan bahwa kelompok tersebut lebih mementingkan program-program bermotif ideologis. Dan kedua partai tersebut lebih condong masuk

⁹⁾Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional* Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1974, h. 65.

¹⁰⁾Ibid.

ke dalam kelompok nasionalis sebab di dalam kelompok nasionalis dapat dilaksanakan program-program yang tidak mementingkan motif-motif ideologis. Setelah melalui perbedaan pendapat tersebut, akhirnya pengelompokan partai terwujud. Pengelompokan itu terdiri dari kelompok spiritual, yang masuk ke dalam kelompok itu adalah NU, PARMUSI, PSII, dan PERTI. Pada tanggal 9 Maret 1970 terbentuk kelompok nasionalis yang merupakan gabungan dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Kristen Indonesia (PARKINDO), Partai Murba, dan Partai Katolik. Kelompok ini diberi nama Kelompok Demokrasi Pembangunan¹¹⁾, yang terbentuk pada tanggal 1 April 1970.

3. Penyederhanaan Partai

Dalam perkembangan pembaharuan struktur politik ini, fase penyederhanaan partai merupakan awal kemenangan Orde Baru. Kemenangan Orde Baru ini, jelas terlihat dari hasil perolehan suara di DPR Pusat pada pemilihan umum tahun 1971 dimana Golkar memperoleh kemenangan mutlak. Setelah dipersiapkan jalan menuju kemenangannya Golkar memperoleh 62,8 % dari seluruh suara yang diberikan, sedangkan PNI mengalami kemerosotan yang drastis. Dalam pemilihan umum tahun 1955 PNI menempati urutan pertama sedangkan dalam

11) Manuel Kaisiepo, "Dilema PDI Perjuangan Mencari Identitas", dalam: Kekuatan Politik Dalam Konflik dan Integrasi, Artikel pilihan Prisma, Jakarta: LP3ES, 1981. h. 70. Juga lihat Daniel Dhakidae, Pemilihan Umum di Indonesia Saksi Pasang Naik dan Surut Partai Politik, Prisma No. 9. September 1981. h. 33-34.

pemilu tahun 1971 PNI menempati urutan yang keempat dengan memperoleh 20 kursi. Sedangkan partai-partai lain yang bergabung dalam Kelompok Demokrasi Pembangunan seperti PARKINDO, memperoleh 7 kursi, Partai Katolik 3 kursi. Sedangkan Partai Murba dan IPKI tidak memperoleh kursi, sehingga seharusnya tergeser dari percaturan politik.

Dalam perkembangan selanjutnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil pemilihan umum tahun 1971 secara tegas menyatakan bahwa pemilu tahun 1977 hanya ada tiga peserta. Demikian juga hasil dari pemilihan umum tahun 1971 semakin menyudutkan posisi partai. Maka dalam keadaan yang tidak ada pilihan lain partai-partai politik yang bergabung dalam KDP mengambil langkah strategis dengan memfusikan diri menjadi satu wadah kegiatan politik dengan nama PDI. Pemfusiian partai-partai tersebut berarti juga sesuai dengan gagasan yang dilontarkan pemerintah tentang pemfusiian partai-partai politik.

Pemfusiian partai-partai yang bergabung dalam PDI ini secara resmi dituangkan dalam Deklarasi Pembentukan Partai Demokrasi Indonesia tanggal 10 Januari 1973. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil dari kelima partai politik yaitu: Achmad Sukarnadidjaja dan Drs. Mh. Sadri dari Partai IPKI, Drs. Ben Mang Reng Say dan F. S. Wignyosumarsono dari Partai Katolik, S. Murbantoko dan Djon Pakan dari Partai Murba serta Mh.

Isnaeni dan A. Majid dari PNI, A Wenas dan Saban Sirait dari PARKINDO.¹²⁾ Dengan ditandatanganinya Deklarasi Pembentukan PDI oleh wakil-wakil masing-masing partai berarti secara formal menandai berakhirnya eksistensi masing-masing partai tersebut. Dengan demikian dua partai, yaitu PPP dan PDI, serta Golongan Karya akan selalu mewarnai pesta demokrasi yang akan datang.

B. Terbentuknya PDI Cabang Kabupaten Klaten

Terbentuknya PDI di Kabupaten Klaten tidak dapat terlepas dari proses terbentuk dan berkembangnya PDI di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Pembentukan DPP, DPD, dan DPC PDI pada dasarnya merupakan tuntutan mekanisme kehidupan partai yang harus berlangsung dan berjalan di tingkat daerah maupun cabang dan dengan demikian merupakan perwujudan dari tahap konsolidasi yang berhasil dicapai oleh pusat di tingkat daerah maupun cabang.

Seperti halnya proses fusi PDI di pusat, proses fusi PDI di kabupaten Klaten dilakukan secara bertahap. Mengingat bahwa kelima partai yang akan bergabung memiliki latar belakang ideologi, sejarah, dan basis massa yang berbeda sehingga tidak begitu mudah untuk berfusi menjadi satu wadah kegiatan politik dengan nama PDI.

Kehadiran Orde Baru telah mengubah kehidupan partai

¹²⁾Lihat, "Deklarasi Pembentukan Partai Demokrasi Indonesia", dalam : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI, Jakarta: DPP PDI, 1989, h. 4.



politik di Indonesia. Semangat pemerintah Orde Baru terhadap kehidupan partai adalah mengadakan pembaharuan struktur politik yang dimulai dengan menyederhanakan sistem kepartaian yang ada setelah Maklumat 3 November 1945. Seperti saran pemerintah tentang pengelompokan partai, di Kabupaten Klaten juga terdapat pengelompokan partai yaitu Kelompok Spiritual, Kelompok Nasionalis, dan Golongan Karya. Kelompok Nasionalis di Kabupaten Klaten merupakan gabungan lima partai politik. Kelima partai tersebut adalah PNI, IPKI, Partai Murba, PARKINDO, dan Partai Katolik. Kelompok Nasionalis itu telah dirintis sejak tahun 1969 dan pada tahun 1972 Kelompok Nasionalis bernama Kelompok Demokrasi Pembangunan (KDP). Kalau dilihat pengelompokannya sebenarnya Partai Katolik dan PARKINDO seharusnya masuk ke dalam kelompok spiritual, tetapi kedua partai tersebut masuk ke dalam kelompok nasionalis. Menurut Sukirno Hadi ketua DPC PDI Kabupaten Klaten periode 1988-1994, Partai Katolik dan PARKINDO masuk ke dalam kelompok nasionalis karena berdasarkan himbauan dari masing-masing induk partai yang berada di pusat. Selain itu juga PARKINDO dan Partai Katolik merupakan partai yang cenderung menonjolkan aspek nasionalisme atau rasa kebangsaan daripada aspek agama. Jadi secara psikologis sulit bersatu dengan kelompok spiritual karena pada dasarnya kelompok spiritual lebih menekankan aspek spiritual tanpa mengabaikan aspek material.¹³⁾

¹³⁾ Wawancara dengan Sukirno Hadi, 25 November 1993.

Setelah KDP terbentuk, tugas KDP selanjutnya adalah mempersiapkan terbentuknya suatu wadah yang lebih mapan, yang merupakan berfungsinya kelima partai politik. Terbentuknya KDP juga mengandung pengertian bahwa pengertian fusi semakin diperjelas, yakni partai-partai yang bergabung di dalamnya sudah tidak berdiri sendiri-sendiri dan segala kegiatan politiknya dialihkan ke dalam partai baru tersebut.

Seperti halnya di pusat, partai-partai yang bergabung dalam kelompok KDP mengalami penurunan drastis dalam perolehan suara pada pemilihan umum tahun 1971. Demikian juga di Kabupaten Klaten, dalam pemilu tahun 1971 PNI mendapat 8 kursi dan Partai Katolik mendapat 1 kursi di DPRD II, sedangkan IPKI, Partai Murba dan PARKINDO, tidak mendapat kursi di DPRD II Kabupaten Klaten. Keadaan seperti ini berarti seharusnya IPKI, PARKINDO, dan Partai Murba tergeser dari percaturan politik karena tidak mendapat kursi di DPRD II.

Maka dalam keadaan yang tidak menguntungkan dari hasil pemilu tahun 1971, PNI sebagai partai yang terbesar yang pertama kali mengambil inisiatif untuk segera melakukan fusi bagi kelima partai yang bergabung dalam KDP seperti yang dihimbau dari pusat. Demikian juga partai yang lain juga tidak ada pilihan lain untuk memfusikan diri.

Sebagai langkah awal, setelah masing-masing partai

mendapat surat himbauan dari partai induknya maka mereka mengirimkan wakil-wakil untuk mengadakan musyawarah bagi terbentuknya PDI. Musyawarah tersebut bertempat di kantor DPC PNI di Kabupaten Klaten Jalan Irian No. 8 Klaten. Setelah wakil kelima partai tersebut berkumpul dan mengadakan musyawarah, mereka mempunyai kesepakatan yang sama untuk memfusikan diri dalam satu wadah kegiatan politik dengan nama Partai Demokrasi Indonesia. Dalam kesepakatan tersebut tidak ada halangan yang berarti sebab wakil-wakil dari masing-masing kelima partai mempunyai kesadaran yang tinggi agar segala aspirasi rakyat tidak tersalurkan dalam banyak partai sehingga menimbulkan perpecahan. Selain itu juga dukungan dari pemerintah sebab dengan banyak partai dipandang menjadi penyebab ketidakstabilan pemerintahan. Setelah kesepakatan untuk memfusikan kelima partai tercapai, maka pemfusiaan tersebut secara resmi dituangkan dalam Deklarasi Pembentukan Partai Demokrasi Indonesia bulan Desember 1973, yang akan diumumkan tanggal 10 Januari 1974. Piagam tersebut ditandatangani masing-masing kelima partai yaitu, Tulus Wignyo Martono dan Sukirno Hadi dari PNI, Istowo Anindito dari IPKI, S. Wignyo Subroto dan Suharto dari PARKINDO, Neo Suradi dan H. Rochim dari Partai Katolik, serta Suyoko dari Partai

Murba. 14)

Setelah terwujudnya kesepakatan bersama sehingga menghasilkan PDI, maka langkah selajutnya adalah membentuk kepengurusan PDI. Sama seperti daerah-daerah yang lain, dalam kepengurusan ini timbul perselisihan-perselisihan, namun di Kabupaten Klaten perselisihan-perselisihan antar peserta musyawarah tidak menimbulkan masalah yang berarti. Masalah yang timbul adalah perbedaan pendapat dalam masalah personalia yang akan didudukkan dalam kepengurusan partai politik yang baru tersebut, namun masalah tersebut dapat dipecahkan dengan cara kesesuaian. Di tingkat DPC komposisi kepengurusan disusun berdasarkan perkiraan besarnya massa pendukung masing-masing unsur, yang dapat dilihat melalui hasil pemilihan umum. PDI di Kabupaten Klaten susunan kepengurusan sebagian besar dipegang oleh orang PNI. Hal ini dapat diterima partai lain, sebab mereka menyadari bahwa PNI merupakan partai besar sehingga lebih banyak dapat menentukan suara dalam rapat. Akhirnya mereka dapat menerima dan menyesuaikan diri dengan terbentuknya kepengurusan sebagai berikut:

Ketua : Tulus Wignyo Martono

Wakil Ketua : Jalil Padjo Suharso

Sambodo Wignjo Subroto

14) Wawancara dengan Tulus Wignyo Martono, 2 November 1993. Dengan Sukirno Hadi, 2 November 1993 dan keterangan tertulis dari Sumardinah, M, 15 November 1993.

Istowo Anindito

Suyoko

Sekretaris : Sukirno Hadi

Wakil Sekretaris : H. Rochim

Ir. Mulyono

Bendahara : Jumadi Siswomartono

Wakil Bendahara : Sumarjo Siswohartono¹⁵⁾.

Dengan disepakatinya keputusan mengenai perimbangan komposisi dalam kepengurusan DPC PDI Kabupaten Klaten oleh partai-partai yang bergabung di dalamnya maka tindak lanjutnya adalah mengusulkan struktur organisasi yang sudah terbentuk ke DPP PDI dengan rekomendasi dari DPD PDI Jawa Tengah. Akhirnya pada tahun 1974 pemerintah daerah Kabupaten Klaten mengeluarkan surat keputusan pembentukan DPC PDI Kabupaten Klaten. Dengan demikian pada tahun 1974 secara resmi terbentuk Partai Demokrasi Indonesia di Kabupaten Klaten.

Sejak kelahirannya PDI telah mengikuti pemilu sebanyak empat kali. Dari segi perolehan suara, PDI selalu menempati urutan yang ketiga. Maka tidak mengherankan jika PDI disebut sebagai partai gurem. Hal itu disebabkan di dalam tubuh PDI sendiri sejak kelahirannya hingga perkembangannya selalu diwarnai konflik dan disintegrasi yang berlarut-larut, yang tampak sekali menjelang pemilu tahun 1982. Maka tidak

¹⁵⁾Wawancara dengan Sukirno Hadi, 26 November 1993.

mengherankan menurut banyak pengamat PDI selalu dirundung kemelut intern yang nampaknya tidak pernah putus.¹⁶⁾

Namun semenjak di bawah kepemimpinan Suryadi PDI mengalami perkembangan yang lebih baik. Di bawah kepemimpinannya citra partai dan kepercayaan rakyat terhadap PDI mulai pulih kembali. Sebab di bawah kepemimpinannya mulai diadakan pembenahan-pembenahan organisasi. Disamping itu Suryadi juga membuat strategi-strategi dalam menghadapi pemilu tahun 1987 dan pemilu tahun 1992. Sehingga tidak mengherankan jika perolehan suara PDI pada pemilu 1987 dan pemilu 1992 mengalami peningkatan.

Situasi semacam itu dapat juga ditemukan dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya di Kabupaten Klaten. PDI di Kabupaten Klaten pada pemilu tahun 1987 mulai menunjukkan perkembangan yang lebih baik dan perkembangan itu lebih berarti lagi jika melihat hasil yang dicapai pada pemilu tahun 1992. Pada pemilu tahun 1987 PDI Kabupaten Klaten berhasil menyumbangkan 6 kursi, jadi meningkat 1 kursi jika dibandingkan dengan pemilu 1982. Sedangkan pada pemilu tahun 1992 lebih berhasil lagi dengan memperoleh 11 kursi di DPRD TK II Kabupaten Klaten. Perkembangan PDI yang semacam itu akan lebih jelas lagi dalam pembahasan bab berikutnya.

16) Ganewati Wuryandari, PDI dan Pemilu 1992, dalam: Jurnal Ilmu Politik No. 9, AIDI-LIPI-Gramedia, 1991, h. 57.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB III

PDI KABUPATEN KLATEN DALAM PEMILIHAN UMUM

TAHUN 1987 DAN PEMILIHAN UMUM

TAHUN 1992

A. PDI Kabupaten Klaten dalam Pemilihan Umum Tahun 1987

Selama masa pemerintahan Orde Baru, untuk tahun ini Indonesia telah memasuki pemilu yang kelima. Pemilu dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987. Pemilu ini berdasarkan UU No.1 tahun 1985 beserta segenap peraturan pelaksanaannya. Pemilu pada tahun ini memiliki makna penting sebab untuk pertama kalinya Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila diterima sebagai satu-satunya asas bagi ketiga OPP berdasarkan UU No.3 Tahun 1985 yang menyempurnakan UU No.3 Tahun 1975, tentang parpol dan Golkar. Demikian juga peraturan pemerintah No.14 Tahun 1986 yang menyatakan:

Partai politik dan Golkar hanya berasaskan Pancasila dan wajib dicantumkan dalam anggaran Dasar Organisasi masing-masing, dan tidak dibolehkan mencantumkan istilah atau pengertian lain yang dapat mengurangi atau mengaburkan maksud ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi parpol dan Golkar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa asas yang menjadi kekhususan OPP dan kemudian menjadi ideologi masing-masing partai tidak berlaku lagi dan harus ditanggalkan. Namun demikian tidak berarti akan mengarah

ke pembentukan partai tunggal sebab perbedaan-perbedaan diantara mereka bisa ditimbulkan oleh perbedaan tentang pandangan mereka tentang bagaimana Pancasila itu dapat dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari.

Arti yang terkandung dalam asas tunggal adalah bahwa konflik politik diantara orpol-orpol tidak lagi didasarkan atas perbedaan ideologi-ideologi karena ideologi mereka telah sama yaitu Pancasila. Oleh karena itu tidak akan ada lagi perdebatan yang tidak habis-habisnya tentang keunggulan ideologi masing-masing. Hal ini dapat diharapkan akan membawa angin baru dalam kehidupan politik Indonesia.¹⁷⁾

Pancasila sebagai satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara antara lain digunakan sebagai landasan tumbuhnya budaya politik sesuai dengan dasar dan ideologi negara, disamping itu untuk mengakhiri konflik demi tercapainya integrasi bangsa.

Asas tunggal mengandung pengertian bahwa konflik politik yang ada karena perbedaan ideologi tidak ada lagi. Konflik ideologi akan beralih menjadi konflik pelaksanaan ideologi. Dengan diberlakukannya asas tunggal berarti OPP tidak lagi menonjolkan keunggulan ideologinya masing-masing. Mereka akan bersaing untuk menyusun program yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui

¹⁷⁾ Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin (Ed), Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia, Jakarta: Rajawali, 1988, h.41.

kampanye. Dengan demikian masyarakat tidak akan lagi melihat keunggulan ideologi partai politik dan Golkar tetapi penilaian masyarakat terhadap ketiga OPP akan didasarkan pada kualitas program kerja yang mereka buat.

Pemilu tahun 1987 berjalan dengan suasana baru. Ketiga OPP bersaing untuk menyusun program dan akan beradu program dalam kampanye. Mereka berusaha keras menawarkan programnya kepada rakyat. Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas nampaknya yang mempengaruhi tema-tema kampanye ketiga OPP. PDI lebih menekankan pada peningkatan kehidupan demokrasi ke segala bidang. Golkar menampilkan tema "Makin memantapkan pelaksanaan demokrasi, konstitusi, dan hukum." Sedangkan PPP lebih menekankan perhatiannya ke program pendidikan dan pemerataan.

PDI walaupun masih menyandang predikat sebagai partai yang terkecil, namun dalam Pemilu 1987 mampu meningkatkan perolehan suaranya di DPR Pusat. Hal itu disebabkan oleh persiapan PDI yang lebih baik dibanding persiapan pada pemilu tahun yang lalu. Hal itu dapat dilihat dari langkah-langkah PDI dalam melakukan konsolidasi organisasi, baik pengurus maupun kader-kadernya disamping juga adanya dukungan dari luar tubuh PDI.

PDI Kabupaten Klaten pada pemilu tahun 1987 berhasil meningkatkan jumlah kursinya dari 5 kursi menjadi 6 kursi. Perkembangan semacam itu akan lebih jelas apabila

diketahui juga persiapannya menjelang pemilu, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara serta hasil akhir yang dicapai.

1. Tahap Persiapan Pemilu

Pemilihan umum merupakan peristiwa politik yang sangat penting dan menentukan masa depan bangsa, sebab baik corak, watak, maupun isi lembaga perwakilan rakyat akan ditentukan berdasarkan pemilihan yang akan dilakukan dalam pemungutan suara.

Bagi organisasi peserta pemilu (OPP), pemilu merupakan sesuatu yang sangat penting sebab dalam peristiwa tersebut terdapat kesempatan bagi ketiga organisasi sosial politik untuk memperoleh suara pendukung dari rakyat. Maka sebelum diadakan pemungutan suara ketiga organisasi sosial politik bersaing dalam mempersiapkan dirinya sehingga dalam kampanye dapat tampil lebih baik. Dengan demikian rakyat tertarik dan akan mendukungnya.

Partai Demokrasi Indonesia Kabupaten Klaten dalam menghadapi pemilu 1987 berusaha untuk tampil sebaik mungkin dengan terlebih dahulu melakukan persiapan-persiapan. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi organisasi baik pengurus maupun kader-kadernya. Dari 9 responden terdapat 7 responden yang menyatakan bahwa langkah ini kurang berhasil. Hal itu disebabkan oleh situasi kepengurusan DPC PDI Kabupaten Klaten periode 1984-1989, dimana susunan

kepengurusannya kurang lengkap terutama di tingkat komisaris kecamatan dan komisaris desa. Selain itu juga kurang adanya komunikasi antara pengurus dengan anggota atau juga pengurus kurang terjun ke bawah terutama di tingkat kecamatan maupun desa sehingga hubungan antara komisaris kecamatan dan desa dengan DPC kurang jelas.

Selain konsolidasi organisasi, DPC PDI juga ikut aktif dalam mengisi keanggotaan dan berpartisipasi dalam Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II), Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu Tingkat II (PANWASLAK II), serta lembaga/badan penyelenggara/ pelaksana pemilu tahun 1987.¹⁸⁾ Dalam pengambilan para saksi yang akan menjadi saksi bagi PDI di TPS-TPS (tempat pemungutan suara) diambil dari lingkungan setempat. Saksi merupakan anggota organisasi peserta pemilihan umum. Tetapi bagi PDI saksi dapat diambil bukan dari anggota tetapi dari simpatisan yang tanpa paksaan bersedia menjadi saksi. Pada pemilu 1987 keberadaan para saksi untuk PDI kurang mendapat perhatian dari DPC PDI. Hal semacam itu sering terjadi terutama di tingkat desa yang masih pelosok. Para saksi mendapat ancaman berupa intimidasi, tekanan baik secara terang-terangan maupun terselubung yang dilakukan oleh oknum dari aparat setempat sehingga mengundurkan diri. Sedangkan DPC PDI kurang memantau peristiwa seperti itu dan tidak segera mencari pengganti dari saksi yang

¹⁸⁾"Laporan Kegiatan", DPC PDI Kabupaten Klaten masa bakti tahun 1984-1989, dalam konpercab PDI Klaten, 1989, h.48.

mengundurkan diri sampai terlaksana pemungutan suara.¹⁹⁾

Persiapan PDI Kabupaten Klaten sebelum melaksanakan kampanye telah dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan PPD II (Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II), PPP dan Golkar untuk menentukan tempat, waktu dan pengerahan massa. Berdasarkan kesepakatan, pelaksanaan kampanye dilakukan secara bergiliran bagi ketiga OPP. Masa kampanye berlangsung selama 25 hari, yang dimulai pada tanggal 24 Maret 1987 sampai dengan tanggal 17 April 1987. Golkar mendapat kesempatan yang pertama kali, hari kedua PPP, hari ketiga PDI dan seterusnya secara bergiliran. PPP mendapat kesempatan kampanye 8 hari, Golkar 9 hari, dan PDI 8 hari. Golkar mendapat kesempatan 9 hari sebab hari pertama jatuh untuk kampanye Golkar demikian juga pada hari terakhir. Kampanye secara bergiliran dimaksudkan untuk menghindari terjadinya bentrokan fisik antar massa peserta kampanye. Disamping itu juga dipersiapkan untuk pemasangan poster-poster yang berbentuk pamflet, umbul-umbul, tulisan, spanduk dan bendera. Alat-alat peraga ini merupakan media yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada calon pemilih.

2. Pelaksanaan Kampanye

Kampanye merupakan kesempatan emas bagi ketiga OPP sebab dalam kampanye tersebut OPP dapat bertemu langsung dengan rakyat sebagai calon pemilih. Dalam kampanye OPP

¹⁹⁾ Wawancara dengan Sukirno Hadi, 26 November 1993.

dapat berbuat sedemikian rupa sejauh tidak melanggar peraturan yang berlaku untuk menarik massa sehingga rakyat tertarik dan kemudian mendukungnya. Di arena tersebut ketiga OPP mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan kebebasan yang sama dalam menawarkan program-programnya. Sementara rakyat juga bebas menghadiri dan kemudian menilai program-program yang ditawarkan tanpa adanya paksaan dari manapun.

Dalam Pemilu 1987 terdapat berbagai bentuk kampanye, diantaranya kampanye melalui media massa, rapat umum, rapat tertutup, pawai, dan pemasangan poster. Sedangkan kampanye PDI Kabupaten Klaten dilakukan melalui rapat terbuka, pawai, pemasangan poster, hiburan maupun melalui sistem door to door. Daerah yang dijadikan basis kampanye biasanya merupakan daerah yang padat penduduknya, strategis, mudah dijangkau dengan kendaraan, dan tempatnya luas sehingga mampu untuk menampung massa.

Kampanye merupakan kesempatan pertemuan langsung dengan rakyat untuk memperkenalkan program-program yang telah disiapkan oleh ketiga OPP. Program-program pada pemilu 1987 mempunyai ketentuan bahwa program harus mengacu pada pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan UUD 1945, sebab Pancasila merupakan satu-satunya asas bagi ketiga OPP. Persoalan kemudian disalurkan ke persoalan tentang program-program masing-masing OPP, sejauh itu tidak memfitnah atau menghina OPP lain maupun pemerintah.

Dalam Pemilu 1987 PDI menampilkan motto "Pancasila Identitasku, Demokrasi Programku, Indonesia Wawasanku". Motto ini kemudian menjadi tema pokok kampanye baik di DPP, DPD, maupun DPC diberbagai daerah. Demikian juga DPC Kabupaten Klaten menggunakan motto tersebut. Sebagai tema dalam kampanye motto tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Pertama. Pancasila Identitasku, maksudnya disamping sebagai identitas, maka Pancasila juga sebagai sukma, jiwa, kepribadian, dan jatidiri bagi warga PDI. Kedua. Demokrasi Programku, maksudnya bahwa PDI akan menumbuhkembangkan dan menegakkan Demokrasi Pancasila, dalam aspek-aspek pemerintahan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga. Indonesia wawasanku, maksudnya PDI terkait langsung didalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, baik dalam aspek ekonomi, maupun hankamnas.²⁰⁾

Disamping motto tersebut DPP PDI juga mengeluarkan 31 tema pokok kampanye, antara lain meliputi:

- a. melaksanakan dan mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen;
- b. memperjuangkan demokrasi politik dan ekonomi,
- c. pembangunan adalah hasil dari segenap komponen bangsa;
- d. pembangunan adalah untuk manusia, bukan sebaliknya;
- e. pendidikan politik mutlak demi suksesnya pembangunan;

²⁰⁾Sukanto, Andriana Elisabeth, dkk. PDI dan Prospek Pembangunan Politik, Jakarta: Gramedia, 1991, h.8.

f. disiplin nasional dan solidaritas sosial merupakan syarat mutlak demi suksesnya pembangunan;

g. PDI adalah wadah politik rakyat dan generasi muda;

h. memperjuangkan harkat dan martabat wanita.²¹⁾

Pada dasarnya tema kampanye yang digunakan oleh DPC PDI Kabupaten Klaten merupakan himbauan dari DPP PDI. Namun DPC PDI juga menyesuaikan dengan situasi atau lingkungan baik kondisi ekonomi, sosial dan budaya penduduk Klaten. Dalam pemilu 1987, kampanye PDI Kabupaten Klaten lebih ditekankan pada "pengangkatan derajat si miskin".²²⁾ PDI berusaha mengidentikkan sebagai "partai rakyat kecil" atau partainya orang miskin. PDI merupakan partainya generasi muda, buruh, petani, tukang becak. PDI bertekad memperjuangkan hak-hak asasi manusia baik di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Misalnya: memberantas monopoli, menolak korupsi memperjuangkan pendidikan politik, meningkatkan kualitas dan peranan generasi muda, mengangkat rakyat dari kebodohan, kemiskinan dan ketidakadilan. Program-program tersebut dikenalkan kepada masyarakat melalui para

21) Tema Kampanye PDI, Jakarta: DPP PDI, 1987 (arsensilan).

22) Wawancara dengan Sukirno Hadi pada tanggal 26 November 1993, Suharto pada tanggal 16 November 1993 dan keterangan tertulis dari Suyadi pada tanggal 10 November 1993.

jurkam, baik yang didatangkan dari pusat yaitu Nico Daryanto, tokoh PDI kelahiran Klaten. Dari DPD antara lain Sardito Darsuki yang mempunyai sebutan "Banteng dari pesisir", Doctor Suparjan, M.A, dan Samsuri Ganda Kusuma. Dari tokoh Islam menampilkan K.H. Sahroji dengan pidatonya bahwa orang Islam masuk PDI bukan perbuatan haram, demikian juga ditekankan untuk wajib mencintai sesama. Dan jurkam lainnya dari pengurus DPC maupun kader-kadernya. Dari DPC selain kampanye secara formal juga dilakukan kampanye secara informal, seperti menghadiri selapanan, supitan, kematian, ronda dan silaturahmi. Dalam acara tersebut PDI menyisipkan kampanye tentang program-program PDI atau mengenalkan PDI yang pada umumnya dilakukan oleh kader-kader PDI.

Disamping itu untuk merekrut massa PDI juga memanfaatkan tokoh yang menjadi idola masyarakat. Satu-satunya tokoh yang sangat besar pengaruhnya dalam PDI adalah Sukarno. Sukarno merupakan seorang figur yang mempunyai kemampuan dan kelebihan yang sulit ditemukan pada masa sekarang. Dia seorang tokoh pendiri PNI, partai yang pernah berjaya pada jaman Orde Lama dan partai yang paling kuat di dalam tubuh PDI. Demikian juga dengan PDI di Kabupaten Klaten, figur Bung Karno selalu mewarnai setiap putaran kampanye dalam bentuk poster-poster. Disamping gambar Bung Karno, PDI Kabupaten Klaten juga memanfaatkan tokoh setempat untuk mempengaruhi massa. Tokoh-tokoh tersebut merupakan tokoh yang menjadi panutan

masyarakat sekitarnya karena watak dan kepribadiannya, kedudukan sosialnya, kepandaiannya maupun kepeloporannya. Tokoh-tokoh tersebut misalnya : guru agama, kyai, ketua pemuda, tokoh-tokoh PDI setempat dan ketua karang taruna.

Ditinjau dari segi ketaatan peserta kampanye PDI terhadap peraturan yang berlaku, berdasarkan pendapat umum peserta kampanye PDI kurang taat terhadap peraturan yang berlaku. Setiap PDI melakukan kampanye terutama yang berbentuk pawai, biasanya terdapat pelanggaran, seperti merusak tanda gambar OPP lain, penggunaan kendaraan yang tidak wajar, menghina kelompok tertentu. Keadaan seperti itu wajar sebab peserta kampanye PDI pada umumnya didominasi generasi muda dimana secara psikologis kondisi emosionalnya belum stabil. Disamping generasi muda pendukung PDI juga terdiri dari masyarakat kecil, misalnya buruh, petani, tukang becak, pengangguran, yang pada umumnya memiliki pengetahuan tentang hukum dan politik yang sangat minim. Berbeda dengan Golkar, pendukung Golkar berasal dari segi ekonomi dan pekerjaan yang sudah mapan, misalnya dari Keluarga Besar ABRI, Keluarga Besar Beringin dan KORPRI.

3. Pelaksanaan Pemungutan Suara

Setelah kampanye berakhir, masyarakat memasuki masa tenang. Masa tenang merupakan masa dimana OPP dan rakyat tidak diijinkan melakukan kegiatan kampanye. Masa tenang ini dimaksudkan sebagai "masa bebas kampanye" menjelang

pemungutan suara agar rakyat sebagai calon pemilih merasa tenang sebelum menentukan pilihannya setelah mendengar dan menyimak program yang ditawarkan para kontestan. Tanggal 18 sampai 19 April 1987 merupakan masa tenang setelah kampanye memasuki putaran terakhir pada tanggal 17 April 1987.

Setelah masa tenang berakhir kemudian masuk ke tahap pemungutan suara. Pemungutan suara dalam pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di kursi DPR, DPRD I maupun DPRD II.

Pemungutan suara dimulai secara serentak yang dilaksanakan pada tanggal 23 April 1987 pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB. Pukul 08.00 WIB semua pengurus dalam KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) harus sudah siap di TPS-TPS (tempat pemungutan suara) Setiap TPS beranggotakan 9 atau 10 orang termasuk saksi-saksi yang dibantu oleh tenaga pengaman dari Hansip, Polri maupun ABRI. Tugas Hansip adalah menertibkan jalannya pencoblosan dan memanggil orang-orang yang belum menggunakan hak suaranya. Sedangkan saksi mempunyai tugas sebagai pengawas kegiatan pemilu di TPS mulai dari penyediaan/pembuatan TPS sampai pengiriman kotak suara hasil pemungutan suara. Saksi ini mempunyai tanggung jawab kepada ketua KPPS. Disamping itu saksi mempunyai hak untuk melaporkan segala penyimpangan yang terjadi kepada Ketua KPPS sehingga ketua KPPS dapat segera mengambil tindakan.

Pemungutan suara merupakan kesempatan terakhir bagi rakyat untuk menentukan pilihannya secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Dalam pemungutan suara tersebut suara pemilih dijamin kerahasiaannya. Penduduk Kabupaten Klaten yang mempunyai hak pilih terdaftar 680.592 orang yang tersebar di 23 kecamatan. Sedangkan TPS yang tersedia sejumlah 2.130 TPS.²³⁾ TPS tersebut dibagi di desa-desa, rata-rata 4 sampai 5 TPS sesuai dengan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih.

Setelah waktu yang ditentukan untuk pencoblosan selesai maka segera diadakan penghitungan suara. Penghitungan suara bersifat terbuka sebab dihadiri oleh unsur pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Disamping itu rakyat juga boleh hadir dengan sepengetahuan ketua KPPS sepanjang kehadirannya tidak mengganggu berlangsungnya penghitungan suara. Pemilih mempunyai hak juga untuk mengemukakan keberatan kepada KPPS jika terjadi pelanggaran dalam proses penghitungan suara dan keberatan tersebut saat itu juga dapat diputuskan oleh ketua KPPS.

Ketua KPPS dengan dibantu anggota-anggota KPPS segera membuka suara satu demi satu dan menyatakan sah tidaknya surat suara untuk DPR, DPRD I, dan DPRD II dengan disaksikan oleh saksi dan pemilih yang hadir. Petugas pencatat melakukan pencatatan di papan tulis.

²³⁾ "Hasil Pemungutan Suara Pemilu 1987", dalam Keputusan-Keputusan Musda III Golkar, Dati II Klaten.

Setelah selesai kemudian dilakukan penghitungan suara yang berada di tiga kotak berwarna biru untuk DPRD II, putih untuk DPRD I dan kuning untuk DPR RI. Hasil pencatatan kemudian dibuat berita acara dan ditandatangani oleh ketua KPPS, semua anggota KPPS dan para saksi yang hadir pada rapat pemungutan dan penghitungan suara. Setelah selesai berita acara dan semua surat suara dikirim ke PPS (Panitia Pemungutan Suara) dengan disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir.

4. Penetapan Hasil Akhir

Setelah pemungutan suara dan penghitungan suara, kemudian berita acara dikirim ke PPS. Setelah itu di PPD II diadakan penghitungan suara berdasarkan berita acara dari PPS. Rapat penghitungan suara di PPD II Klaten dilaksanakan oleh ketua PPD II yang disaksikan oleh anggota Panwaslak tingkat II serta dari masing-masing OPP.

Berdasarkan penghitungan suara di PPD II diperoleh hasil sebagai berikut. Kartu suara pemilih sejumlah 680.592 orang dari 23 kecamatan se Kabupaten Klaten. PPP memperoleh 109.512 suara (7 kursi), Golkar 392.287 suara (23 kursi) dan PDI memperoleh 108.069 suara (6 kursi). Hasil peserta pemilu 1987 dan hasil perolehan suara PDI Kabupaten Klaten sebagai salah satu peserta pemilu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel: 1

Rekapitulasi Hasil Pemilu 1987

Nama Organisasi Peserta Pemilu	Suara	%	Kursi
PPP	109.512	17,96	7
Golkar	392.281	63,32	23
PDI	108.069	17,72	6

Tabel: 2

Perolehan Suara PDI
Khusus untuk DPRD II

No.	Kecamatan	Pemilih	Suara
1.	Kota Klaten	42.587	7.330
2.	Ketandan	42.486	7.251
3.	Kebonarum	32.315	5.254
4.	Wedi	30.355	4.669
5.	Jogonalan	30.713	6.264
6.	Prambanan	24.055	3.275
7.	Karangnongko	21.011	3.435
8.	Gantiwarno	22.854	3.142
9.	Manisrenggo	21.820	3.744
10.	Kemalang	18.157	2.419
11.	Delanggu	25.167	3.427
12.	Ceper	32.409	6.115
13.	Juwiring	31.448	3.525
14.	Wonosari	32.098	6.889
15.	Jatinom	30.845	3.624
16.	Polanharjo	25.090	3.061
17.	Tulung	29.038	3.610
18.	Karanganom	26.836	3.397
19.	Pedan	25.225	6.731
20.	Bayat	32.471	5.652
21.	Cawas	36.942	3.924
22.	Trucuk	40.620	8.236
23.	Karangdowo	88.928	3.645
	Jumlah	680.592	108.069

Sumber: Kantor DPC PDI Kabupaten Klaten

Dalam pemilu 1987 Golkar tetap menempati urutan pertama dan memperoleh tambahan 3 kursi dibandingkan pemilu 1982, dari 20 kursi hasil pemilu 1982 menjadi 23 kursi pada pemilu tahun 1987. PPP mengalami penurunan perolehan suara, tetapi perolehan kursinya sama dengan jumlah kursi yang berhasil diraih pada pemilu 1982, yaitu 7 kursi. Sedangkan PDI berhasil meningkatkan jumlah suaranya dan mendapat tambahan 1 kursi menjadi 6 kursi. Ini berarti suara yang diperoleh PDI lebih meningkat dibandingkan dengan suara yang diperoleh PPP.

Perolehan suara PDI pada pemilu 1987 yang meningkat dibanding pemilu 1982 menunjukkan bahwa PDI mengalami perkembangan yang lebih baik. Perkembangan semacam itu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, konsolidasi organisasi di tingkat pusat yang lebih baik, sehingga mampu mempersiapkan pemilu 1987 dengan lebih baik. Konsolidasi organisasi di tingkat pusat yang semakin baik berpengaruh terhadap kehidupan PDI Kabupaten Klaten yang semakin baik dibanding pada pemilu 1982, sehingga lebih mampu menghadapi masalah dan tantangan. Kedua, pendekatan PDI guna menggaet massa dengan mengidentikkan dirinya sebagai partainya "orang miskin" dan partainya generasi muda. Pendekatan semacam itu berpengaruh positif bagi PDI sebab masyarakat Indonesia sebagian besar merupakan golongan menengah ke bawah. Ketiga, ditampilkannya tokoh yang menjadi idola masyarakat, tokoh tersebut mempunyai kelebihan yang

menjadi panutan masyarakat. Keempat, sikap pemerintah yang semakin jujur dan adil terhadap ketiga OPP dan sikap ABRI yang lebih netral, hal ini menunjukkan bahwa ABRI benar-benar ingin mewujudkan perannya sebagai dinamisator dan stabilisator dalam kehidupan politik. Kelima, konflik yang terjadi di tubuh PPP menjelang pemilu 1982 dan pemilu 1987 yang memuncak dengan keluarnya NU dari PPP pada tahun 1984. Keluarnya NU menyebabkan sebagian besar pendukung PPP pindah ke parpol lain dalam menyalurkan aspirasi politiknya.

Penetapan hasil akhir dilakukan melalui rapat PPD II yang dihadiri oleh anggota PPD II, anggota Panwaslak II, pimpinan dari ketiga OPP serta tamu undangan lainnya. Berdasarkan hasil akhir kemudian ditetapkan jumlah wakil yang diperoleh masing-masing OPP. Nama-nama calon yang dipilih diambil dari daftar calon anggota yang disodorkan oleh OPP berdasarkan urutan nomer yang dimulai dari nomer satu. Seseorang calon yang sudah terpilih jika mengundurkan diri atau meninggal maka tempatnya diisi oleh calon lain menurut urutan nomer berikutnya yang belum dinyatakan terpilih. Tahap terakhir dari pemilu ini adalah pelantikan anggota DPRD II Kabupaten Klaten.

B. Keberhasilan PDI Kabupaten Klaten dalam Pemilu 1992

Pemilu 1992 merupakan pemilu yang keenam selama masa pemerintahan Orde Baru. Pemilu merupakan kesempatan bertemunya pemimpin dengan rakyat. Melalui pemilu, pemimpin mempunyai kesempatan untuk menjelaskan perihal

kehidupan bersama dengan rakyat. Dan dalam pemilu tersebut terdapat kesempatan bagi rakyat untuk menyampaikan pikiran dan hatinya, berdialog dengan sesamanya maupun dengan para pemimpin.

Melalui keterlibatannya secara aktif dan intensif itu, masyarakat berpartisipasi dalam proses politik. Melalui kegiatan politik yang memuncak pada hari pemilihan umum itu, rakyat memberikan legitimasinya kepada tubuh, sistem dan lembaga-lembaga politik kita. Rakyat bahkan juga memberikan legitimasinya lagi kepada kepemimpinannya.²⁴⁾

Pemilu 1992 merupakan pemilu yang tidak lagi mempersoalkan legitimasi partai dalam arti berikut ini. Kalau dulu PPP masih disangka menjadi ajang partai "terlarang" seperti Masjumi, kini alasan itu tidak lagi masuk di akal orang. Kalau dulu PDI dicurigai menjadi ajang "PNI Merah", kini argumen itu dianggap dibuat-buat. Sebaliknya kalau Golkar masih dianggap satu-satunya yang mewakili Orde Baru, maka anggapan itu sangat digugat oleh partai-partai peserta yang lain.²⁵⁾

Semua ini mengartikan bahwa masalah "legitimasi" sudah berada di luar lingkup Pemilu 1992. Partai politik

²⁴⁾Tim SPES (ed), "Pemilihan Umum Kesempatan untuk Memberi dan Memperoleh Legitimasi Politik", dalam: Pemilu 1992 Harapan dan Janji, Jakarta: Gramedia, 1992, h. 125.

²⁵⁾Daniel Dhakidae (Epilog), "Kampanye Menuju Pemilihan Umum Tolak Tarik Antara Perubahan dan Kemapanan", dalam: Tim SPES (ed), Pemilu 1992 Harapan dan Janji, Jakarta: Gramedia, 1992, h.140-141.

pada masa ini lebih dipersoalkan pada kualitas masing-masing kekuatan sospol ini. Dalam pemilu 1992 masing-masing kekuatan sospol bersaing menonjolkan kualitas partainya untuk memperoleh dukungan dari calon pemilih yang hasilnya dapat dilihat melalui hasil perolehan suara masing-masing OPP.

Pemilu 1992 merupakan pengalaman yang pertama kali dalam perolehan suara bagi Golkar dimana di tingkat pusat maupun daerah tingkat dua Kabupaten Klaten Golkar mengalami penurunan perolehan suara. Golkar merupakan kekuatan sospol yang memiliki hubungan erat dengan ABRI dan Birokrasi. Dalam pemilu tahun ini Golkar masih tetap ingin mempertahankan hubungan tersebut. Namun dalam kehidupan politik di Indonesia terjadi perkembangan baru. Sikap ABRI terhadap Golkar kurang kompak. Ada sebagian pensiunan ABRI yang menunjukkan dukungan mereka terhadap PDI. Empat puluh purnawirawan diberitakan sudah menggabungkan diri dengan PDI baru-baru ini. Juga dikabarkan bahwa posisi-posisi komisaris PDI di tingkat kecamatan telah terisi 100 persen, sedangkan di desa-desa juga sudah terisi 50 persen.²⁶⁾

PDI Kabupaten Klaten dalam pemilu 1992 berhasil meningkatkan perolehan kursinya di DPRD II dari 6 kursi hasil pemilu 1987 menjadi 11 kursi pada pemilu 1992.

²⁶⁾ Leo Suryadinata, Golkar dan Militer Studi tentang Budaya Politik, Jakarta: LP3ES, 1992, h.153. Lihat juga, "Yang Jatuh Hati ke Banteng", Tempo, 23 Februari 1991.

Hasil ini merupakan hasil yang patut dibanggakan sebab PPP masih tetap seperti tahun sebelumnya. Sedangkan suara yang hilang dari Golkar sebagian besar terserap ke PDI. Keberhasilan ini tentunya merupakan hasil dari langkah-langkah PDI dalam menghadapi pemilu 1992.

1. Tahap Persiapan

Situasi dan kondisi DPC PDI Kabupaten Klaten pada pemilu 1992 sudah berbeda dengan pemilu pada tahun 1987. Dalam periode ini sudah terjadi pergantian pengurus DPC PDI periode 1989-1994. Merupakan sesuatu yang wajar jika suatu kepengurusan menginginkan prestasi yang semaksimal mungkin. Demikian juga kepengurusan DPC PDI yang baru ini. Belajar dari situasi dan kondisi kepengurusan yang lama, DPC PDI Kabupaten Klaten mengadakan pembenahan-pembenahan dan perbaikan - perbaikan. Langkah yang diambil adalah dengan melengkapi struktur kepengurusan sesuai dengan AD/ART Partai Demokrasi Indonesia, Langkah-langkah tersebut antara lain membentuk Dewan Pertimbangan Cabang (DPC), dan melengkapi kepengurusan sampai di tingkat komisararis kecamatan dan komisararis desa. Mengadakan kontak / komunikasi antar pengurus sampai di tingkat komisararis kecamatan dan desa secara terus-menerus. Mengadakan pertemuan secara rutin dengan pengurus, dan juga melibatkan komisararis kecamatan dan desa misalnya dalam acara hari ulang tahun PDI, kursus kader, penjelasan yang bersifat politis dan konsolidasi, pemilihan pengurus dan kegiatan menjelang pemilu. Dengan

demikian terjadi hubungan timbal balik antara pengurus dengan komisaris kecamatan dan desa.

Pemilu 1992 merupakan peluang bagi PDI untuk meningkatkan jumlah pendukungnya melalui berbagai kegiatan yang tujuannya untuk menarik simpati rakyat/masyarakat. Dalam menghadapi pemilu 1992 PDI berusaha melakukan persiapan-persiapan. Persiapan-persiapan tersebut dapat dilihat melalui konsolidasi organisasi yang dilakukan seawal mungkin dan kaderisasi yang dilakukan lebih intensif dibanding pemilu sebelumnya, baik pengurus maupun kader-kadernya. Selain itu PDI juga membentuk PAPPUCAB (Panitia Pemilihan Umum Tingkat Cabang), Panitia Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan (PAPPUCAM) dan Regu Penggerak Pemilihan Umum (GURAKDES). Selain itu juga dengan mempersiapkan saksi-saksi yang akan menjadi saksi dalam pemilihan umum. Saksi-saksi tersebut mendapat perhatian dan pemantauan yang lebih intensif. Disamping itu juga diadakan penggalan dana dan pembentukan satgas.

Disamping langkah-langkah diatas PDI Kabupaten Klaten juga memantapkan hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah maupun dengan OPP yang lain. Hal ini terlihat sekali dengan terlibatnya PDI secara aktif dalam mengisi keanggotaan dalam panitia pemilihan umum. Keterlibatan itu antara lain dengan menjadi anggota dalam PPD II, Panwaslak II dan badan penyelenggara pelaksana pemilu 1992 seperti PPS dan Panwaslakcam.

Sebelum pelaksanaan kampanye PDI telah melakukan pertemuan dengan PPD II, PPP dan Golkar untuk mencapai kesepakatan pelaksanaan kampanye. Dalam pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan bahwa pelaksanaan kampanye dimulai tanggal 10 Mei sampai 3 Juni 1992, dimana tanggal 10 Mei 1992 dipergunakan untuk pemasangan tanda gambar secara bersama-sama oleh ketiga OPP. Kegiatan ini kemudian diikuti dengan kegiatan di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh komisaris kecamatan masing-masing OPP. Tanggal 11 Mei 1992 sampai dengan tanggal 3 Juni 1992 digunakan untuk kampanye dalam bentuk lainnya, seperti rapat umum, pawai dan sarasehan. Dalam kampanye ini PPP mendapat kesempatan 8 hari, Golkar 8 hari dan PDI mendapat 8 hari.

2. Pelaksanaan Kampanye

Kampanye merupakan salah satu unsur penting dalam pemilu sebab dalam kampanye tersebut terdapat kesempatan bagi OPP untuk bertemu secara langsung dengan rakyat sebagai calon pemilih. Selain itu kampanye juga merupakan pendidikan politik bagi rakyat secara praktis. Dengan pendidikan politik rakyat akan lebih tahu tentang hak dan kewajibannya dalam hidup bernegara. Maka dari itu kampanye pemilihan umum harus disampaikan dengan cara-cara yang bersifat mendidik, meningkatkan kesadaran politik rakyat, menggairahkan pembangunan nasional serta

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.²⁷⁾

Kampanye merupakan kesempatan pertemuan secara langsung dengan rakyat untuk mengenalkan program-program masing-masing OPP. Bagi PDI materi kampanye 1992 pada dasarnya hampir sama dengan materi kampanye 1987, diantaranya adalah melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen, memperjuangkan demokrasi di segala bidang baik bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan nasional adalah untuk seluruh rakyat, manusia adalah subjek pembangunan bukan objek pembangunan, PDI adalah partainya rakyat kecil, generasi muda dan generasi tua, memperjuangkan harkat dan martabat wanita. Pemilu 1992 DPP PDI menampilkan tema umum kampanye yang berbunyi:

Dengan semangat kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial, PDI siap mengantar bangsa dan negara Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan dalam kebersamaan, kemandirian dan keterbukaan.²⁸⁾

Kemudian DPD PDI Jawa Tengah juga menampilkan tema kampanye PDI dalam pemilihan umum 1992. Tema tersebut berbunyi:

Mensukseskan dan meningkatkan pemilu 1992 dan sidang umum MPR sebagai sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dengan senantiasa menjaga semangat persatuan dan kesatuan nasional, serta memantabkan eksistensi PDI

²⁷⁾Keputusan Presiden RI No.8 Th.1992 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum, Bab II pasal 7 ayat 2.

²⁸⁾Thema Umum Kampanye PDI, Jakarta: DPP PDI, 1992 (stensilan).

sebagai wadah dan penyalur aspirasi rakyat.²⁹⁾

Tema kampanye PDI Kabupaten Klaten pada dasarnya berdasarkan tema kampanye yang dikeluarkan oleh DPP PDI maupun DPD PDI. Namun DPC PDI harus menyesuaikan diri dengan keadaan masyarakat Kabupaten Klaten. Isu yang dilontarkan PDI Kabupaten Klaten difokuskan pada perjuangan peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Selain itu juga DPC PDI Kabupaten Klaten mempunyai tema yang dipasang di tempat-tempat yang strategis terutama di lapangan saat dilangsungkannya rapat umum PDI. Tema tersebut berbunyi:

Memilih tanda gambar kepala Banteng PDI menjamin tetap tegaknya Pancasila dan UUD 1945.³⁰⁾

Tema-tema tersebut disampaikan kepada rakyat melalui berbagai bentuk kampanye, antara lain melalui media massa, rapat umum, pemasangan poster, pawai, rapat tertutup. Demikian juga di Kabupaten Klaten, PDI menyampaikan programnya lewat berbagai bentuk kampanye. Bentuk kampanye tersebut antara lain pemasangan poster, rapat umum, sarasehan, pertemuan umum, hiburan. Selain itu juga melalui jalur-jalur informal seperti ronda, menghadiri selapanan atau pertemuan sejenisnya. Jalur informal ini biasanya dilakukan oleh kader-kader maupun tokoh-tokoh masyarakat yang mempunyai simpati kepada PDI.

²⁹⁾Thema Kampanye PDI, Semarang: DPD PDI, 1992 (stensilan).

³⁰⁾Tema Kampanye PDI, Klaten: DPC PDI, 1992 (Dokumen).

Dalam kampanye melalui poster terdapat berbagai bentuk antara lain berupa plang, spanduk, pamflet, bendera, umbul-umbul serta coretan pada dinding atau tembok. Di Kabupaten Klaten poster yang dimunculkan oleh PDI baik dari segi ukuran maupun tulisan terdapat berbagai macam bentuk atau dengan kata lain tidak seragam seperti yang dimunculkan oleh Golkar. Dalam pemasangan poster Golkar terlihat lebih unggul. Hal ini disebabkan oleh dana Golkar yang lebih besar dibandingkan dengan PDI. Karena terbatasnya dana, PDI menggunakan berbagai cara untuk membuat poster, misalnya dengan memanfaatkan bahan-bahan bekas seperti bagor bekas, kertas bekas, ataupun papan bekas. Isi pesan yang disampaikan PDI lebih ditekankan pada kehidupan berdemokrasi dan membela rakyat. Bentuk bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pesan juga sering menggunakan bahasa daerah setempat.

Rapat umum sampai sekarang merupakan bentuk kampanye yang paling efektif untuk menarik massa pendukung. Dalam rapat umum program partai diuraikan secara panjang lebar oleh para jurkam PDI baik yang didatangkan dari DPP, DPD maupun DPC sendiri. Dari DPP didatangkan tokoh-tokoh antara lain Drs. H. Suryadi (Ketua DPP PDI), Megawati Sukarno (putri mendiang Bung Karno). Dari DPW antara lain K.H. Najib Rusidi, Sukarno Dullah, Bsc, Bantu Sunaryo, Sardito Dasuki dan Dra. Sri Sumiyati. Dari DPC sendiri antara lain Tulus Wignyo Martono (salah satu pendiri PDI cabang Kabupaten Klaten), Sukirno Hadi (tokoh PDI Klaten

yang pidatonya selalu diharapkan massa PDI), Subani dan Dra. Andristi.

Dalam rapat umum tersebut pendidikan politik mendominasi materi pembicaraan jurkam. PDI menginginkan dan memperjuangkan pelaksanaan demokrasi Pancasila yang murni dan konsekuen serta menolak segala penyelewengan yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam Demokrasi Pancasila terkandung pengertian bahwa rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Rakyat mempunyai kebebasan untuk memilih sesuai dengan yang diinginkan. Rakyat mempunyai kebebasan untuk berbeda pendapat tetapi yang bertanggungjawab tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Demikian juga tentang parpol, peranan parpol, keberadaan parpol terutama PDI serta arti dan peranan pemilu selalu mewarnai setiap putaran rapat umum.

Selain pendidikan politik jurkam dalam pidatonya juga menjadi penyulut semangat atau juga memberikan suatu ajakan terutama kepada generasi muda. Bahwa generasi muda merupakan penerus pembangunan, maka harus menjadi generasi yang tangguh walaupun menghadapi tantangan, penindasan maupun tekanan dari pihak manapun. PDI merupakan parpol masa depan yang mempercayakan pembangunan sepenuhnya kepada generasi muda. Disamping itu PDI juga mengajak generasi muda untuk ikut serta dalam pesta demokrasi sehingga pelaksanaan pesta demokrasi dapat terlaksana dengan wajar.

Sedangkan program PDI hanya dibicarakan sekilas saja, tidak terinci dan jelas. Program tersebut pada dasarnya sama dengan pemilu sebelumnya. Antara lain peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan peranan wanita, melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen dan pemerataan pendidikan.

Daerah yang dijadikan basis kampanye pada umumnya merupakan daerah yang padat penduduknya, strategis, mudah dijangkau dan mudah untuk menempatkan massa. Dalam satu wilayah pembantu Bupati (kawedanan) pada umumnya PDI memilih satu lokasi untuk pelaksanaan kampanye terbuka. Lokasi yang dipilih tersebut antara lain:

- a. Kawedanan Gondang Winangun yaitu Manisrenggo dan Prambanan.
- b. Kawedanan Pedan yaitu lapangan Barepan Kecamatan Cawas.
- c. Kawedanan Jatinom lokasi yang dipilih lapangan Bonyokan.
- d. Kawedanan Kota administratif yang dipilih Stadion Trikoyo Klaten.
- e. Kawedanan Kota Klaten yang dipilih lapangan Wedi, Kecamatan Wedi.
- f. Kawedanan Delanggu lokasi yang dijadikan tempat kampanye adalah lapangan Merdeka, Kecamatan

Delanggu.³¹⁾

Masa yang menghadiri kampanye PDI pada umumnya didominasi kaum muda. Sedangkan selebihnya terdiri dari golongan tua dari pegawai swasta. Mereka datang bukan karena suatu kewajiban tetapi karena ada kemauan dari diri mereka sendiri tanpa adanya paksaan. Demikian juga segala fasilitas mereka seperti kaos, umbul-umbul, banyak yang merupakan hasil kreatifitas mereka sendiri. Hal ini dapat dilihat dari warna kaos yang mereka kenakan pada umumnya berwarna merah tetapi merahnya tidak senada. Demikian juga letak gambar banteng di kaos tidak sama, ada yang hasil kreatifitas sendiri maupun yang sudah merupakan hasil industri. Keadaan semacam itu menunjukkan bahwa walaupun tidak diberi fasilitas yang baik dari PDI, mereka tetap datang dalam kampanye. Berarti mereka datang benar-benar karena simpati pada PDI.

3. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pemungutan suara merupakan kegiatan puncak dalam pemilu sebab kegiatan ini mengikutsertakan rakyat dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Pancasila dan UUD 1945. Pemungutan suara melibatkan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di kursi DPR, DPRD I dan DPRD II yang sekaligus akan mengisi keanggotaan MPR melalui pemilu, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

³¹⁾ Panitia Pemilihan Umum Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten, Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1992 di Kabupaten Dati II Klaten, Klaten: Pemerintah Daerah Tingkat II Klaten, 1992, h.70-71.

Dalam pelaksanaannya, pemungutan suara menjadi tanggung jawab Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan dilaksanakan oleh KPPS dalam rapat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam Pemilu 1992 di Kabupaten Klaten terdapat 2.132 TPS yang tersebar di 26 kecamatan. Banyak sedikitnya TPS di masing-masing kecamatan tergantung dari banyaknya penduduk yang mempunyai hak pilih. Sedangkan penduduk Kabupaten Klaten yang mempunyai hak pilih pada pemilu tahun ini terdaftar sebanyak 734.049 orang.

Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia setelah masa tenang berakhir. Masa tenang ini dimulai setelah selesainya putaran kampanye berakhir. Pemungutan suara dilaksanakan serentak dalam satu hari pada tanggal 9 Juni 1992, yang dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 14.00 WIB. Sebelum pemungutan suara dimulai, Ketua dan anggota KPPS harus sudah hadir dan anggota KPPS serta para saksi sebelum melaksanakan tugasnya diambil sumpahnya oleh ketua KPPS. Peranan saksi adalah menjadi saksi dan menjadi pengawas sejak pembuatan TPS hingga pengiriman kotak suara ke KPPS.

Setelah anggota KPPS dan saksi diambil sumpahnya kemudian dilanjutkan dengan rapat pemungutan suara. Kotak suara yang digunakan untuk pemungutan suara dibuka dan diperlihatkan kepada para saksi dan pemilih yang hadir untuk menunjukkan bahwa kotak suara benar-benar kosong. Setelah itu pemilih yang sudah mendapat kartu suara

secara bergiliran memberikan suaranya dan memasukkan surat suaranya ke kotak suara. Sedangkan pemilih yang tidak dapat mencoblos tanda gambar pada surat suara yang dipilihnya karena cacat badan dapat meminta bantuan pada ketua KPPS atau salah satu anggota KPPS dengan disaksikan oleh anggota KPPS lainnya dan saksi yang hadir.

Segera setelah pemungutan suara berakhir KPPS mengadakan penghitungan suara di TPS. Semua aparat TPS mempersiapkan diri sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ketua TPS atau anggota membuka surat suara satu demi satu dengan disaksikan oleh saksi dan para pemilih yang hadir. Petugas pencatat melakukan pencatatan di papan tulis dan hasilnya dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua TPS atau ketua KPPS serta anggota dan para saksi yang hadir.

Pemungutan suara dan penghitungan suara pada dasarnya bersifat terbuka, sebab dalam rapat tersebut para pemilih mempunyai hak untuk hadir menyaksikan berlangsungnya acara tersebut. Rapat tersebut juga dihadiri oleh unsur pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat dan saksi-saksi masing-masing OPP. Yang hadir dalam rapat penghitungan suara dapat menyaksikan sah tidaknya surat suara karena pembuksan dan penghitungan suara dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh yang hadir dalam rapat tersebut.

Berita acara dari TPS kemudian dikirim ke PPS. Di PPS dihitung kembali berdasarkan berita acara dari TPS atau KPPS yang selanjutnya berita acara dari PPS dikirim

ke PPD II. Rapat penghitungan suara di PPD II dilaksanakan berdasarkan berita acara dari PPS yang dilaksanakan oleh ketua PPD II yang disaksikan oleh anggota Panwaslak II dan saksi dari masing-masing OPP.

4. Penetapan Hasil Pemilu

Penetapan hasil pemilu pada dasarnya sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Sesudah pemungutan suara selesai, kemudian diadakan penghitungan suara di TPS. Dari TPS hasil tersebut dikirim ke PPS dan di PPS diadakan penghitungan suara. Hasil penghitungan suara dari PPS kemudian dikirim ke PPD II dan diadakan penghitungan lagi.

Berdasarkan penghitungan suara di PPD II, pada tanggal 22 Juni 1992 diselenggarakan rapat penetapan hasil pemungutan suara 1992 yang dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang didampingi oleh MUSPIDA dan Ketua Panwaslak II. Hadir juga dalam rapat tersebut anggota PPD II, Anggota Panwaslak II, pimpinan OPP dan tamu undangan lainnya.

Kartu suara pemilih yang sah berjumlah 632.883 dari 26 kecamatan di Kabupaten Klaten. Suara yang diperoleh PPP berjumlah 121.099 suara, Golkar memperoleh 321.171 suara dan PDI memperoleh 190.613 suara. Hasil perolehan suara bagi PDI Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel: 3

Perolehan suara PDI
khusus untuk DPRD II

No.	Kecamatan	Pemilih	Suara
1.	Ngawen	23.501	4.948
2.	Kalikotes	16.633	5.601
3.	Kebonarum	11.087	3.489
4.	Wedi	28.774	9.011
5.	Jogonalan	30.557	10.566
6.	Prambanan	23.405	6.248
7.	Gantiwarno	21.361	6.095
8.	Manisrenggo	20.892	7.349
9.	Kemalang	17.841	5.198
10.	Karangnongko	20.018	6.438
11.	Jatinom	29.781	8.297
12.	Karanganom	26.004	6.288
13.	Polanharjo	24.389	5.461
14.	Tulung	27.305	6.193
15.	Delanggu	24.759	5.916
16.	Ceper	32.317	9.681
17.	Wonosari	32.314	11.379
18.	Juwiring	31.251	7.456
19.	Pedan	24.904	8.562
20.	Karangdowo	27.378	5.980
21.	Cawas	34.020	8.913
22.	Trucuk	38.932	10.970
23.	Bayat	31.199	10.720
24.	Klaten Utara	20.139	6.937
25.	Klaten Tengah	23.848	6.950
26.	Klaten Selatan	20.497	5.904
Jumlah		663.275	190.613

Sumber: DPC PDI Kabupaten Klaten

Hasil perolehan suara tersebut juga menentukan perolehan kursi masing-masing OPP di DPRD. Perolehan kursi adalah sebagai berikut: PPP mendapat 7 kursi, Golkar mendapat 18 kursi dan PDI memperoleh 11 kursi. Hasil perolehan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel: 4

Rekapitulasi Hasil Pemilu 1992

Nama Organisasi Peserta Pemilu	Suara	%	Kursi
PPP	121.099	19,13	7
Golkar	321.171	50,74	18
PDI	190.613	30,11	11

Sumber: DPC PDI Kabupaten Klaten

Berdasarkan hasil akhir kemudian ditetapkan jumlah wakil-wakil yang diperoleh masing-masing OPP. PPP mendapat 7 orang yang akan duduk di kursi DPRD II, Golkar 18 orang sedangkan PDI 11 orang. Nama-nama calon OPP yang dipilih diambil berdasarkan urutan nomer dimulai dari nomer satu. Sedangkan pengganti calon yang mengundurkan diri diambil dari calon urutan nomer berikutnya. Tahap akhir dari rangkaian kegiatan pemilu ini adalah pelantikan anggota DPRD II Kabupaten Klaten.

Pada dasarnya langkah-langkah yang dilakukan PDI untuk menghadapi pemilu 1987 dan pemilu 1992 adalah sama, hanya pada pemilu 1992 lebih diintensifkan penggalangannya sehingga berpengaruh terhadap hasil pemilu yang pada kenyataannya meningkat. Lebih jelasnya lagi akan dikaji mengenai perbandingan perkembangan PDI Kabupaten Klaten pada pemilu 1987 dan pemilu 1992 pada bab berikutnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB IV

PERBANDINGAN PDI KABUPATEN KLATEN

PADA PEMILU TAHUN 1987 DAN

PEMILU TAHUN 1992

Pemilu merupakan salah satu wujud paling nyata pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia merupakan peristiwa yang sangat penting dan menentukan masa depan bangsa, sebab pemilu merupakan sarana untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam dewan perwakilan. Jadi pemilu dapat dikatakan berkaitan dengan tegaknya Pancasila dan UUD 1945, demokrasi dan juga berkaitan dengan kesinambungan pembangunan nasional di Indonesia. Mengingat pentingnya posisi pemilu bagi negara demokrasi, maka kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilu akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara Indonesia. Pemilu yang adil dan jujur berarti juga mencerminkan kematangan dalam berdemokrasi di negara yang bersangkutan.

Pemilu 1987 dan pemilu 1992 merupakan babak baru bagi kehidupan parpol dan orpol di Indonesia. Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas sejak tahun 1985 menghilangkan ciri khusus bagi orpol maupun parpol. PPP harus menanggalkan keislamannya dengan diubahnya tanda gambar ka'bah menjadi tanda gambar bintang. Perubahan tanda gambar ini merugikan PPP sebab ikatan massa Islam

lewat PPP menjadi pudar. Asas tunggal merupakan dilema bagi PPP sebab untuk menyatakan dirinya sebagai "partai Islam" tidak berani sementara PPP merupakan wadah bagi umat Islam. Sedangkan bagi PDI perubahan ciri khusus menjadi satu asas yaitu Pancasila tidak sehebat yang diderita PPP, sebab perubahan tanda gambar dengan hanya menyisakan gambar kepala banteng di tengah segilima tidak memudarkan ikatan massa PDI, disamping itu PDI kali ini lebih siap menghadapi pemilu.

Sejak diberlakukannya asas tunggal dalam kehidupan parpol ideologi tidak lagi dapat dijadikan alasan untuk berbeda pendapat, apalagi bertentangan sebab semuanya sama yaitu Pancasila. Yang masih dapat berbeda adalah program parpol dan orpol yang akan ditawarkan kepada massa mengambang untuk menarik pendukungnya. Jadi persaingan bukan lagi keunggulan ideologi masing-masing parpol tetapi diharapkan terjadinya persaingan dalam meningkatkan kualitas masing-masing parpol.

Pemilu 1987 merupakan awal peningkatan jumlah wakil yang diperoleh PDI Kabupaten Klaten setelah kekalihannya pada pemilu 1982. Sedangkan bagi PPP merupakan kemunduran setelah kemenangannya pada pemilu 1982, dimana PPP menempati urutan kedua setelah Golkar. Pada pemilu 1987 PPP tidak lagi dapat mempertahankan posisinya sebagai urutan kedua. Hal ini disebabkan kondisi intern PPP setelah keluarnya NU dari PPP. Demikian juga dihapusnya PPP sebagai partai Islam. Maka PPP tidak mempunyai

kekuatan yang sama seperti sebelumnya untuk menarik massa.

Berbeda dengan pemilu 1982, kondisi PDI pada pemilu 1987 dan pemilu 1992 lebih baik. Dampak UU No.3 tahun 1985 tentang ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi parpol dan ormas tidak sehebat yang diderita PPP. Untuk menghadapi pemilu 1987 dan pemilu 1992 pada dasarnya langkah-langkah yang dilakukan PDI Kabupaten Klaten adalah sama, hanya pada pemilu 1992 lebih intensif, sehingga pada kenyataannya meningkatkan jumlah suara yang diperoleh. Untuk lebih jelasnya akan dibahas lebih lanjut mengenai bagaimana perbandingan PDI Kabupaten Klaten pada pemilu 1987 dengan pemilu 1992.

A. Tahap Persiapan

Pemilu merupakan peristiwa yang sangat penting bagi negara dan parpol, maka tidak mengherankan jika parpol mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk tampil dalam pemilu. Bagi PDI Kabupaten Klaten langkah pertama yang diambil adalah melakukan konsolidasi organisasi, antara lain melengkapi aparat partai sampai ke tingkat desa, meningkatkan komunikasi seluruh jajaran partai baik horizontal maupun vertikal dan mempersiapkan kader-kader. Selain konsolidasi organisasi PDI juga menyiapkan tenaga-tenaga calon saksi dan jurkam, membentuk aparat pelaksanaan pemilihan umum yaitu Panitia Pelaksanaan Pemilihan Umum Tingkat Cabang (PAPPUCAB), Panitia Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan (PAPPUCAM), Regu Penggerak Pemilihan Umum

(GURAKDES). Mempersiapkan petugas-petugas PDI yang akan ditempatkan dalam kepanitiaan pemilu. Cabang, KORCAM dan KORDES membina hubungan baik dengan Pemda dan ABRI, membahas dan menjabarkan program nasional yang akan disesuaikan dengan kondisi kehidupan penduduk di Kabupaten Klaten, mempersiapkan calon-calon anggota DPR dari PDI yang akan duduk di kursi DPRD II Kabupaten Klaten, dan memantapkan jadwal kegiatan kampanye berdasarkan kesepakatan ketiga OPP.

Kondisi kepengurusan PDI periode 1984-1989 dan periode 1989-1992 sangat berbeda. Dan dapat dikatakan bahwa dalam mengadakan konsolidasi organisasi, kepengurusan lama kurang lengkap dan baru dilengkapi oleh kepengurusan yang baru. Kepengurusan lama kurang melengkapi aparat partai sampai di tingkat kordes dan kurang mengadakan komunikasi baik vertikal maupun horizontal, misalnya pertemuan pejabat partai tidak rutin, pejabat partai baru mengadakan pertemuan dengan anggota bila akan menghadapi pemilu maupun HUT PDI, tidak pernah diadakan pertemuan antar anggota partai secara rutin, Korcam hanya difungsikan dalam menghadapi pemilu maupun HUT PDI. Korcam masih ada yang dirangkap oleh anggota PDI yang duduk dalam kepengurusan cabang, sedangkan kordes belum terbentuk. Sedangkan dalam kepengurusan baru, langkah yang diambil adalah melakukan konsolidasi organisasi sedini mungkin, antara lain melengkapi aparat partai sampai di tingkat kordes,

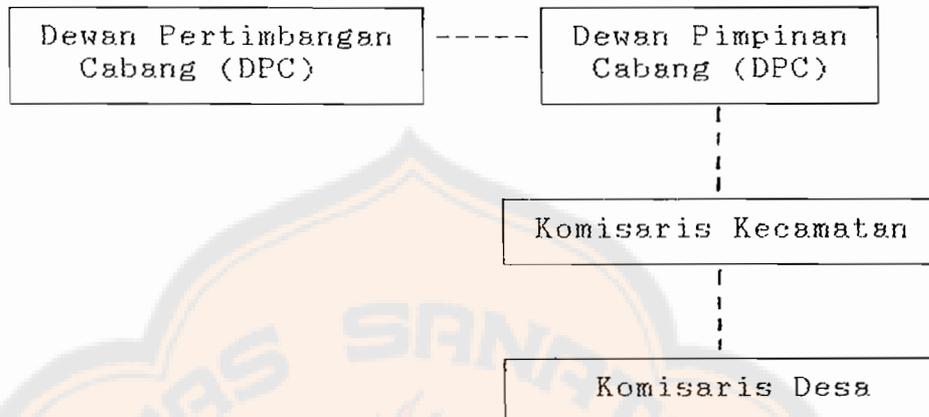
membina hubungan baik dengan seluruh jajaran partai baik vertikal (pejabat partai dengan anggota partai) maupun horizontal (sesama anggota partai), korcam dan kordes tidak hanya difungsikan dalam pemilu tetapi juga dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan HUT dan pengkaderan, serta mengadakan pertemuan secara rutin, misalnya pertemuan antar pengurus seminggu sekali, korcam dan kordes seminggu sekali diwajibkan hadir di kantor cabang, sehingga terjalin komunikasi yang lebih baik.

Konsolidasi organisasi merupakan faktor yang sangat penting dan dominan untuk menghadapi pemilu. Maka jika konsolidasi tidak dilakukan sebaik mungkin, maka keberhasilan yang diperoleh PDI tidak maksimal. Tetapi jika konsolidasi dilakukan secara efektif dan sedini mungkin, maka prestasi atau keberhasilan yang diperoleh akan lebih baik, sebab konsolidasi organisasi akan berpengaruh terhadap semua kegiatan partai untuk menghadapi pemilu.

Struktur dari setiap organisasi seperti juga PDI dapat diketahui dari Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangganya. Di dalam AD/ART PDI, struktur organisasi di tingkat cabang adalah sebagai berikut:

Bagan : Struktur organisasi PDI

di tingkat cabang



Berdasarkan struktur organisasi PDI tersebut dapat dikatakan bahwa PDI cabang Klaten dalam pemilu 1987 belum memiliki struktur organisasi yang lengkap sebab Dewan Pertimbangan Cabang dan Komisariss Desa belum terbentuk. Sedangkan pada pemilu 1992 struktur organisasi PDI tingkat cabang sudah lengkap terbentuk sampai di tingkat Komisariss Desa. Kurang lengkapnya aparat partai sampai tingkat desa serta kurangnya komunikasi baik vertikal maupun horizontal seperti kepengurusan lama sangat merugikan dalam mempersiapkan pemilu. Hal ini disebabkan karena komisariss kecamatan dan desa sangat penting peranannya dalam melaksanakan kegiatan pemilu, sebab baik korcam maupun kordes mempunyai peranan semacam "eksekutif"-nya cabang. Dalam pemilu korcam mempunyai tugas membantu setiap kegiatan cabang, misalnya menentukan tempat kampanye, mengurus ijin kampanye maupun mempersiapkan segala peralatan yang diperlukan. Sedangkan di tingkat desa dibentuk GURAKDES, yang baru terbentuk

pada pemilu 1992. GURAKDES mempunyai tugas antara lain meneliti semua warga yang telah memiliki hak pilih, meneliti apakah semua warga baik yang sehat, sakit maupun cacat sudah masuk dalam daftar pemilih, mengusulkan nama-nama yang belum terdaftar kepada Pantarlih. Tugas lainnya antara lain mengadakan latihan untuk mengenal tanda gambar PDI, cara mencoblos tanda gambar PDI, meneliti warga khususnya simpatisan PDI apakah sudah menerima kartu panggilan, menggerakkan warga dan simpatisan PDI untuk mencoblos tanda gambar PDI, dan membantu panitia dan saksi agar pencoblosan berjalan sesuai dengan peraturan.

Keberadaan saksi dalam pemilu merupakan faktor yang penting. Dengan adanya saksi pelaksanaan pemilu yang jujur, adil dan LUBER lebih terjamin sebab saksi bukan hanya sebagai saksi saja dalam pemilu tetapi juga menjadi pengawas pelaksanaan pemilu. Kurangnya komunikasi dan konsolidasi yang terjadi pada kepengurusan lama akan berpengaruh juga pada keberadaan saksi. Saksi kurang dapat dipersiapkan dan sering mendapat tekanan dari oknum aparat setempat terutama di daerah pelosok. Karena kurang pembekalan dan penerangan, saksi ada yang mudah sekali dipengaruhi misalnya ditakut-takuti dan ditekan sehingga mengundurkan diri. Sedangkan di pihak cabang kurang mampu mengatasi masalah tersebut. Kekurangan ini tidak ingin diulangi dalam pemilu 1992. Pengurus baru menyiapkan saksi yang lebih baik. Saksi diberi pengarahan akan

tugas-tugasnya serta pendidikan politik yang sebaik-baiknya untuk menanggulangi segala bentuk tekanan. Disamping itu juga keberadaan saksi selalu dipantau sehingga jika ada saksi yang mengundurkan diri dapat segera diatasi.

B. Pelaksanaan Kampanye

Pemilu merupakan suatu peristiwa yang penting bagi prinsip demokrasi. Dalam pemilu yang demokratis sebenarnya rakyat yang berkuasa tetapi sering terjadi rakyat tidak benar-benar berkuasa, hanya seakan-akan berkuasa. Yang tidak bisa disangkal pada peristiwa pemilu adalah rakyat mendapat perhatian dari ketiga kontestan. Yang menarik dalam setiap pemilu adalah "pertarungan" antara kekuatan-kekuatan politik yang ada untuk menarik perhatian massa. Pertarungan tersebut disalurkan melalui pernyataan politik para kontestan. Pernyataan-pernyataan ini dapat ditemukan ketika diadakan kampanye. Bagi PDI Kabupaten Klaten bentuk kampanye pada pemilu 1987 dan 1992 adalah sama, antara lain kampanye melalui rapat umum, pawai, hiburan, pemasangan alat peraga serta dari rumah ke rumah. Demikian juga tema yang digunakan PDI pada pemilu 1987 dan pemilu 1992 pada dasarnya intinya sama yaitu PDI akan tetap berjuang menegakkan Pancasila dan UUD 1945, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pada pemilu 1987 kampanye dalam bentuk pemasangan poster dilakukan oleh ketiga OPP ketika OPP tersebut

melakukan kegiatan kampanye. Sedangkan pada pemilu 1992 hari pertama kegiatan kampanye didahului kampanye dalam bentuk pemasangan poster yang dilakukan bersama-sama oleh ketiga OPP. Pemasangan poster ini kemudian diikuti pemasangan poster oleh masing-masing OPP selama masa kampanye. Poster ini berbentuk plang, spanduk, bendera, umbul-umbul serta corat-coret pada dinding. Besar kecilnya serta megah tidaknya poster tergantung tersedianya dana dan kreativitas pendukung kontestan yang bersangkutan. Walaupun keterbatasan dana dialami PDI, namun PDI masih tetap mampu memasang poster. Pemasangan poster banyak dilakukan oleh warga maupun simpatisan PDI yang memasangnya di tempat-tempat yang tidak resmi disediakan oleh panitia pemungutan suara. Bagi PDI keterbatasan dana justru memunculkan kreativitas dalam menyampaikan pesan. Kreativitas tersebut muncul baik dalam pemanfaatan bahan bekas untuk poster, membuat tulisan, maupun penggunaan bahasa setempat. Namun kreativitas ini juga sering memunculkan nada kasar yang justru dapat mengurangi simpati calon pemilih. Isi pesan yang disampaikan PDI pada pemilu 1987 dan pemilu 1992, ditekankan pada kehidupan berdemokrasi dan membela rakyat. Yang membedakan poster pada pemilu 1987 dengan pemilu 1992 adalah bahwa pada pemilu 1987 figur Bung Karno mendominasi setiap gambar poster, sedangkan pada pemilu 1992 figur Bung Karno tidak nampak lagi.

Dari berbagai bentuk kampanye, kampanye dalam bentuk rapat umum yang diakhiri dengan pawai keliling

selalu memperoleh porsi yang terbanyak. Rapat umum pada pemilu 1987 dan pemilu 1992 diatur secara bergiliran berdasarkan kesepakatan ketiga OPP. Pengaturan semacam ini pada dasarnya berdampak positif, sebab bentrokan fisik antar massa dalam kampanye lebih dapat dihindari dan juga untuk menciptakan suatu persaingan yang sehat antar OPP.

Rapat umum bagi PDI selalu diisi dengan pidato dari jurkam PDI. Pada pemilu 1987 dan pemilu 1992 PDI menampilkan diri sebagai partai yang membela wong cilik. Semboyannya memperbaiki kehidupan rakyat, meningkatkan kehidupan demokrasi, pemerataan dalam peluang ekonomi, menghilangkan monopoli dan korupsi, memperjuangkan keadilan. Dalam pemilu 1992 program PDI untuk memperjuangkan harkat dan martabat wanita mulai mendapat perhatian PDI Kabupaten Klaten. Hal itu nampak nyata dengan ditampilkannya jurkam-jurkam wanita, seperti Megawati Sukarnoputri, Dra. Sri Sumiyati dan Drs. Andriati. Dalam kampanye jurkam-jurkam tersebut mengajak kepada wanita di Kabupaten Klaten untuk tidak takut menghadiri kampanye, berani untuk menuntut upah yang layak bagi buruh wanita, ikut aktif berperanan dalam mengisi pembangunan sebab wanita dan pria mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Bentuk kampanye yang lain adalah sarasehan dan pertemuan umum, yaitu suatu kampanye tertutup yang dihadiri oleh massa yang terbatas dan benar-benar

merupakan simpatisan PDI. Dengan rapat ini sosialisasi politik secara optimal lebih tercapai daripada dengan kampanye dalam rapat umum, sebab dalam rapat umum massa yang menghadiri didominasi oleh kelompok umur tertentu. Rapat umum diakhiri dengan pawai keliling yang sering bersifat ugal-ugalan. Keadaan semacam ini tentunya berpengaruh terhadap keputusan calon pemilih untuk memilih salah satu OPP. Selain sarasehan, PDI juga mengadakan kampanye dari rumah ke rumah. Pada umumnya metode ini dilakukan oleh para kader PDI dan tokoh masyarakat simpatisan PDI. Dalam kampanye ini peranan kader sangat penting. Pengkaderan secara intensif dan pengaruh di lingkungannya sangat menentukan keberhasilan dalam kampanye ini. Kampanye ini dilakukan secara informal sebab tidak memerlukan ijin dari yang berwenang dan para kader hanya memanfaatkan celah-celah yang dapat memungkinkan untuk berbicara tentang politik maupun materi kampanye PDI.

Dalam kampanye 1992 PDI menampilkan jurkam yang berbeda dengan jurkam pada kampanye pemilu 1987. Jurkam pemilu 1992 yang ditampilkan lebih dekat dengan massa PDI Kabupaten Klaten, seperti Drs. H. Suryadi, Megawati Sukarnoputri dan Sukirno Hadi. Demikian juga sebelum masa kampanye 1992, PDI memanfaatkan hari ulang tahunnya dengan menampilkan tokoh yang merupakan idola generasi muda yaitu Guruh Sukarnoputra. Kehadiran tokoh yang melekat dalam kehidupan rakyat sangat diperlukan sebab

bagaimanapun juga sikap primordial masih mengakar di kalangan rakyat. Sedangkan pada pemilu 1987 anggota keluarga Bung Karno belum dilibatkan dalam kampanye PDI di Kabupaten Klaten. Hal ini berarti dalam pemilu 1992 PDI Kabupaten Klaten berusaha memanfaatkan nama besar presiden pertama RI dengan melibatkan Megawati Sukarnoputri dan Guruh Sukarnoputra. Kehadiran putra mendiang Bung Karno itu mampu menarik massa yang paling banyak dalam setiap kampanyenya. Kehadiran mereka agaknya dimaksudkan juga sebagai salah satu cara untuk menarik kembali para pendukung PDI dan untuk membangkitkan kenangan akan kebesaran partai yang pernah berjaya pada masa Orde Lama. Hal itu dilakukan mengingat bahwa Kabupaten Klaten merupakan bekas basis PNI, sedangkan PNI merupakan partai yang terbesar dan dominan dalam sejarah berfusiya PDI.

Untuk menarik massa Islam, PDI menampilkan ulama Kyai Haji Sahrodji pada pemilu 1987 dan K.H. Najib Rusidi pada pemilu 1992. Ditampilkannya tokoh Islam ini sebab PDI ingin mengenalkan kepada masyarakat bahwa PDI bukan milik golongan tertentu saja tetapi semua orang bebas masuk PDI tanpa membedakan agama atau etnik. Hal ini dapat dilihat dari pidato tokoh tersebut yang tidak menonjolkan keislamannya tetapi cenderung merupakan suatu ajakan kepada umat Islam untuk masuk PDI. Dengan mengenal PDI apalagi memilihnya bukan merupakan suatu perbuatan yang haram dan di dalam PDI tidak ada perbedaan agama.

Hal itu dilakukan sehubungan dengan diberlakukannya asas tunggal serta perpecahan yang melanda PPP setelah keluarnya NU sejak tahun 1984.

Sejak diberlakukannya asas tunggal tahun 1985, pada pemilu 1987 dan pemilu 1992 kampanye Golkar mengambil alih tema Islam dengan pengertian bahwa pemerintah merealisasikan program yang menjadi aspirasi umat Islam. Golkar secara tidak langsung mengelompokkan organisasi didasarkan pada ikatan primordial seperti agama. Ini juga berarti PPP merupakan partai yang sama dengan Golkar sebab tema Islam direbut oleh Golkar. Sedangkan PDI mampu menempatkan posisinya sebagai partai yang berbeda dengan pemerintah.

Pemilu 1987 dan pemilu 1992 dapat dikatakan berlangsung dengan tingkat tekanan yang semakin berkurang. Tidak seperti pemilu tahun-tahun sebelumnya, pada pemilu 1987 ABRI bersikap lebih netral dan lebih nampak lagi pada pemilu 1992. Sikap ABRI tersebut ternyata juga berpengaruh terhadap kenaikan pendukung dan simpatisan PDI. Sikap tersebut membuat massa tidak merasa takut lagi untuk menghadiri kampanye PDI. Namun sikap ini tidak seratus persen netral, sebab masih ada juga oknum yang berusaha menekan massa yang menghadiri kampanye PDI.

C. Perolehan Suara dan Hasil Pemilu

Pemungutan suara dan penghitungan suara merupakan saat-saat yang menentukan dalam pemilihan umum. Ketika itu masyarakat yang mempunyai hak pilih herbondong-

bondong menuju ke TPS. Kehadiran mereka untuk menentukan pilihannya sesuai dengan keinginannya setelah menyimak dan menilai program yang ditawarkan ketiga OPP selama masa kampanye. Selesai pemungutan suara diadakan penghitungan suara. Penghitungan suara diadakan secara terbuka, dalam arti rakyat boleh menyaksikan penghitungan suara tersebut.

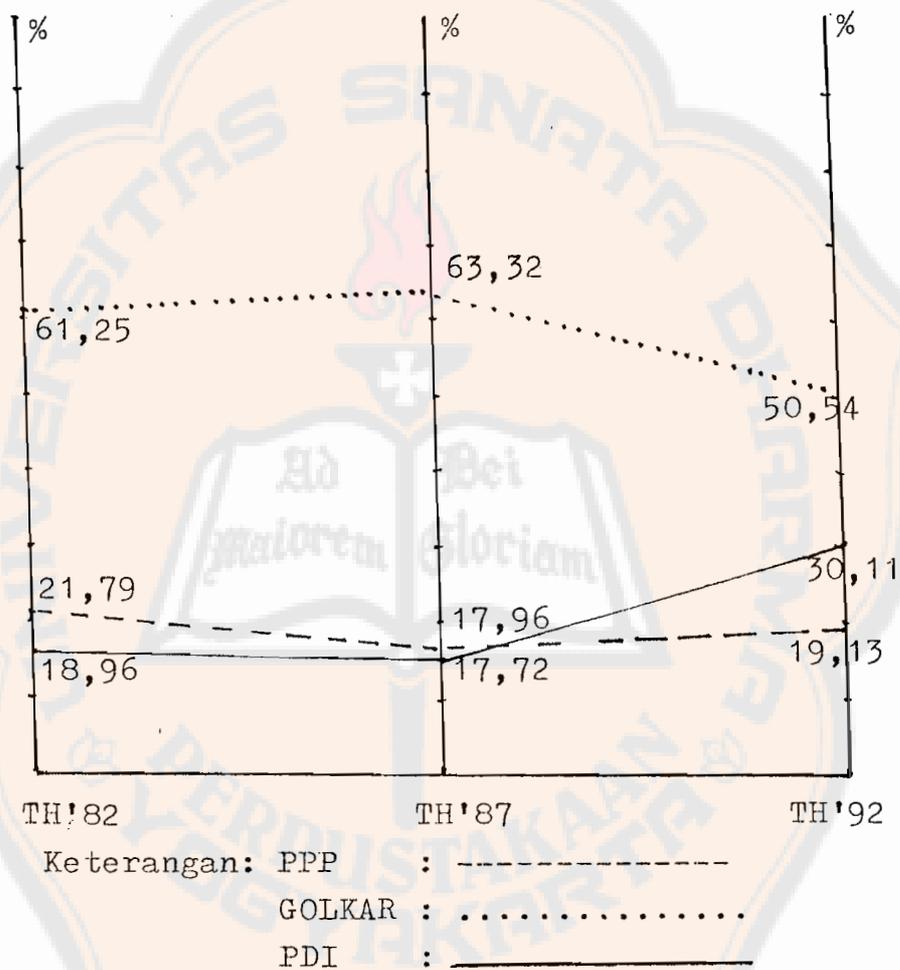
Dalam peristiwa semacam ini peranan atau kehadiran saksi sangat penting, sebab selain mempunyai peranan sebagai pengawas dalam pemungutan suara sampai penetapan perolehan suara, saksi juga sangat penting bagi OPP, sebab melalui saksi PDI dapat mengetahui jika dalam pemungutan suara dan penetapan suara timbul masalah yang merugikan PDI. Dengan adanya saksi OPP bisa memonitor berlangsungnya peristiwa tersebut secara langsung melalui saksi-saksi mereka di TPS. Keberadaan saksi yang sudah disiapkan secara matang sangat diperlukan, sebab khususnya bagi PDI peristiwa penekanan saksi pada pemilu 1987 dan pemilu 1992 masih sering terjadi. Jadi dalam hal ini konsolidasi organisasi, kuat tidaknya konsolidasi juga berperanan terhadap keberadaan saksi. Saksi diharuskan melaporkan hasil pemungutan suara dan segala permasalahan yang dipandang merugikan PDI kepada kordes. Dari kordes ke korcam yang akhirnya disampaikan kepada DPC PDI. Dalam hal ini keberadaan aparat partai sampai tingkat bawah (kordes) sangat diperlukan. Sebab kordes merupakan aparat partai yang paling banyak secara

langsung berurusan dengan pelaksanaan pemilu. Tidak adanya aparat ini seperti yang dialami DPC PDI pada kepengurusan periode lama tentunya mempersulit PDI sendiri dalam pemilu. Sebab kordes juga mempunyai tugas membantu pelaksanaan pemungutan suara sampai penghitungan suara agar berlangsung secara jujur, sehingga tidak merugikan salah satu pihak OPP khususnya PDI. Jadi komunikasi dan saling membantu antara aparat partai sangat diperlukan sehingga segala kendala dapat diatasi. Dengan demikian perolehan suara dapat lebih terjamin kebenarannya.

Perolehan suara bagi PDI dalam pemilu 1987 merupakan awal peningkatan perolehan suara setelah mengalami kehancuran perolehan suara pada pemilu 1982. Secara nominal perolehan suara PDI pada pemilu 1987 sebesar 108.069 suara. Pada pemilu 1992 PDI mengalami kenaikan perolehan suara yang sangat berarti yaitu sebesar 190.613 suara. Sedangkan PPP pada pemilu 1987 mengalami penurunan dan pada pemilu 1992 mampu meningkatkan perolehan suara walaupun tidak mempengaruhi jumlah kursi. Golkar seperti tahun-tahun sebelumnya masih tetap dapat meningkatkan perolehan kursinya sampai dengan pemilu 1987, tetapi pada pemilu 1992 untuk pertama kalinya Golkar tidak mampu meningkatkan perolehan suara bahkan mengalami penurunan. Meskipun perolehan suara PDI secara nominal meningkat pada pemilu 1987, namun prosentase perolehan suara mengalami penurunan, dari 18,96% pada pemilu 1982 menjadi

17,72% pada pemilu 1987. Dan baru berhasil meningkatkan prosentase perolehan suara yaitu 30,11% pada pemilu 1992, yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik: Hasil Pemilu Tahun 1982, 1987 dan 1992 Daerah Tingkat II Kabupaten Klaten



Hasil perolehan suara pada umumnya mempengaruhi perolehan kursi di DPRD II Klaten. Pada pemilu 1987 PDI memperoleh 6 kursi dan pada pemilu 1992 berhasil meningkatkan menjadi 11 kursi. Sedangkan bagi PPP pemilu 1987 mendapat 7 kursi dan pemilu 1992 tidak mampu

meningkatkan jumlah kursinya. Dan bagi Golkar pemilu 1987 memperoleh 23 kursi tetapi pada pemilu 1992 tidak berhasil mempertahankan perolehan kursi bahkan kehilangan 5 kursi. Ini berarti hilangnya suara Golkar sebagian besar terserap oleh PDI dan hanya sebagian kecil terserap oleh PPP dan itu tidak mengubah perolehan kursi bagi PPP. Perbandingan perolehan suara bagi PDI dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel: 5
Perbandingan hasil pemilu 1987 dan
pemilu 1992 PDI Kabupaten Klaten
untuk DPRD II

	Jumlah suara yang sah	Perolehan suara	Prosentase	Jumlah kursi
Pemilu 1987	609.868	108.069	17,72	6
Pemilu 1992	632.883	190.613	30,11	11

Secara umum PDI pada pemilu 1992 mengalami kenaikan perolehan suara di seluruh kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali kecamatan Kebonarum yang mengalami penurunan suara 33%. Pada pemilu 1987 perolehan suara PDI di Kecamatan Kebonarum sebesar 5.254 suara sedangkan pada pemilu 1992 turun menjadi 3.488 suara. Penyebab penurunan ini dimungkinkan oleh menurunnya jumlah pemilih di kecamatan Kebonarum setelah berubahnya Kabupaten Klaten menjadi kota Administratif. Pada pemilu 1987 jumlah pemilih di Kecamatan Kebonarum berjumlah 29.041 orang, sedangkan pada pemilu 1992 11.087 orang. Pada pemilu 1987 wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari 23 Kecamatan,

tetapi pada pemilu 1992 dipecah lagi menjadi 26 Kecamatan. Kenaikan perolehan suara PDI dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel: 6
Kenaikan PDI dalam perolehan suara
untuk DPRD II

No.	Kecamatan	Perolehan Suara Pemilu 1987	Perolehan Suara Pemilu 1992	Kenaikan (%)
1.	Kebonarum	5.254	3.488	-33
2.	Wedi	4.669	9.005	92
3.	Jogonalan	6.264	10.559	68
4.	Prambanan	3.275	6.322	93
5.	Karangnongko	3.435	6.416	86
6.	Gantiwarno	3.142	6.124	94
7.	Manisrenggo	3.744	7.267	94
8.	Kemalang	2.417	5.157	133
9.	Delanggu	3.427	5.906	72
10.	Ceper	6.115	9.736	59
11.	Juwiring	3.525	7.457	111
12.	Wonosari	6.889	11.387	65
13.	Jatinom	3.624	8.285	128
14.	Polanharjo	3.061	5.485	79
15.	Tulung	3.610	6.229	72
16.	Karanganom	3.397	6.275	84
17.	Pedan	6.731	8.562	27
18.	Bayat	5.652	10.720	89
19.	Cawas	3.924	8.913	127
20.	Trucuk	8.236	10.970	33
21.	Karangdowo	3.645	5.980	64

Berdasarkan tabel di atas ditinjau dari perolehan suara yang diperoleh PDI Kabupaten Klaten pada pemilu 1987 dan pemilu 1992 dapat dikatakan mengalami perkembangan yang cukup baik. Sementara itu jika ditinjau perkembangan massa PDI di setiap kecamatan menunjukkan bahwa hampir di semua kecamatan massa PDI mengalami perkemban-

gan kecuali kecamatan Kebonarum. Perkembangan PDI semacam itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama, tingkat pendidikan yang lebih maju seperti kecamatan Gantiwarno, Bayat, Polanharjo, Delanggu. Kedua, jumlah penduduk yang lebih padat misalnya di kecamatan Trucuk, Wonosari, Ceper, Juwiring, Jogonalan. Ketiga, penggalangan massa dengan memanfaatkan tokoh yang menjadi panutan masyarakat sekitarnya seperti ulama, guru agama, keadaan tersebut terlihat sekali di kecamatan Kemalang, Jatinom, Cawas, Juwiring, Wedi. Keempat, sebagai jalur lalu lintas yang padat informasi misalnya di kecamatan Prambanan, Jogonalan, Delanggu. Kelima, banyak berdomisili tokoh PDI seperti di kecamatan Jogonalan, Karangnongko, Keenam, banyak penduduk golongan usia muda misalnya di kecamatan Ceper, Juwiring, Wonosari, Trucuk, Bayat, Jatinom, Tulung. Ketujuh, banyak berdomisili pengusaha swasta golongan menengah seperti kecamatan Wedi, Delanggu, Pedan. Kedelapan, sebagai tempat kampanye PDI misalnya di kecamatan Manisrenggo, Cawas, Delanggu, Pedan, Jatinom, Wedi, Prambanan.

Pada pemilu 1987 terdapat Kecamatan Kota Klaten dan Kecamatan Ketandan. Tetapi setelah Kabupaten Klaten dijadikan kota administratif, situasi tersebut berubah. Pada pemilu 1992 kedua kecamatan tersebut tidak ada lagi, kemudian muncul kecamatan-kecamatan yang baru antara lain

Kecamatan Ngawen, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Tengah dan Klaten Selatan. Maka kecamatan-kecamatan tersebut tidak dimasukkan sebagai perbandingan untuk mengetahui kenaikan hasil pemilu 1992 bagi PDI di tiap-tiap kecamatan.

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Keberhasilan PDI pada Pemilu 1987 dan Pemilu 1992

Pemilu 1987 bagi PDI di Kabupaten Klaten merupakan awal kenaikan PDI setelah mengalami kekalahan dengan kedudukannya sebagai urutan ketiga dalam pemilu 1982. Dalam pemilu 1987 mampu menaikkan kursi dari 5 menjadi 6 kursi dan menjadi lebih nyata pada pemilu 1992 dengan 11 kursi yang berhasil diraihnya. Perkembangan PDI Kabupaten Klaten yang semacam itu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

Pertama, konsolidasi organisasi yang semakin mantap khususnya menjelang pemilu 1992. Konsolidasi organisasi ini meliputi pendaftaran anggota secara terus menerus, melengkapi aparat partai sampai tingkat desa, mengembangkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal secara efektif. Disamping itu juga didalam menghadapi pemilu 1992 PDI mempersiapkan diri lebih dini, misalnya membina para saksi, penggalan dana, pengkaderan, pemanfaatan HUT untuk kegiatan kampanye.

Kedua, posisi PDI yang mampu menyebut dirinya sebagai partai masa depan, partai yang membela wong cilik. sehingga PDI mampu menarik dan mendapat dukungan

generasi muda. Dukungan ini nampak di daerah perkotaan dimana kecemburuan sosial nampak sekali. Selain kesenjangan ekonomi juga disebabkan oleh meningkatnya taraf pendidikan sehingga orang menjadi lebih kritis terhadap suatu peristiwa khususnya kehidupan politik. Ditunjang juga adanya alat komunikasi yang semakin maju. Sedangkan di desa yang belum maju taraf pendidikannya, pendukung PDI pada dasarnya berdasarkan ikatan tradisional.

Ketiga, hadirnya tokoh idola. Pada pemilu 1987 PDI Kabupaten Klaten memanfaatkan Sukarno dalam bentuk gambar-gambar dan kenyataannya dalam setiap putaran kampanye gambar Bung Karno mendominasi gambar lainnya. Dalam pemilu 1992 kehadiran tokoh idola dialihkan dengan melibatkan keluarga Bung Karno yaitu Guruh Sukarnoputra pada HUT PDI dan Megawati Sukarnoputri menjadi jurkam pemilu 1992 di Kabupaten Klaten. Kehadiran mereka menjadi faktor utama dari jumlah massa yang besar untuk mendukung PDI. Dimanapun kampanye PDI yang menampilkan kedua tokoh tersebut selalu dikunjungi oleh massa yang melimpah.

Keempat, ditetapkannya UU No.3 tahun 1985 dan UU No.8 tahun 1985 tentang asas tunggal bagi parpol dan ormas. Dengan adanya UU ini bagi PPP sangat luas dampaknya. PPP kehilangan massa yang kuat dan keadaan ini bertambah runyam dengan keluarnya NU sejak tahun 1985. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Golkar untuk menarik massa Islam dengan melakukan dan merealisasikan program-program

yang bernafaskan Islam, yang kurang dapat direalisasikan oleh PPP. Kegiatan-kegiatan Golkar lebih difokuskan ke pembangunan Islam. Sehingga dekade ini dapat dikatakan bahwa Golkar mengalami Islamisasi. Sedangkan bagi PDI keadaan semacam ini dipakai oleh PDI untuk mengambil sikap dengan menempatkan posisinya sebagai partai yang berbeda dengan partai pemerintah. PDI menempatkan dirinya sebagai partai yang membela wong cilik yang tidak membedakan agama atau etnik. PDI merupakan partainya semua golongan. Bagi massa non-Islam dan massa yang "netral" dalam arti tidak menginginkan kelompok organisasi, seperti partai yang tidak dipengaruhi oleh agama, seperti menemukan partai idealnya di PDI. Hal ini berpengaruh terhadap kenaikan perolehan suara PDI pada pemilu 1987 dan lebih nyata lagi pada pemilu 1992.

Kelima, sehubungan dengan sikap ABRI dan pemerintah yang lebih netral dibandingkan dengan pemilu sebelum tahun 1987. Sikap ABRI tersebut berpengaruh terhadap massa. Massa merasa tidak takut lagi mendatangi kampanye PDI. Dulu Golkar mempunyai dukungan yang kuat dari ABRI maupun Birokrat. tetapi sekarang dukungan ABRI tidak dapat dipertahankan lagi. ABRI berusaha untuk tampil lebih adil bagi ketiga OPP. Jika masih ada penekanan terhadap massa, itu merupakan perbuatan oknum tertentu. Bahkan pada awal pemilu 1992 banyak pensiunan ABRI yang masuk PDI. Sikap pemerintah yang semakin adil, jujur, netral dan terbuka, dapat dilihat antara lain dalam

pemberian dana yang semakin adil, semakin berkurangnya praktek-praktek dari oknum-oknum tertentu yang bersifat intimidatif, kesempatan kampanye bagi ketiga OPP secara bergiliran, yaitu pada pemilu 1987 PPP mendapat kesempatan kampanye 8 hari, Golkar 9 hari dan PDI 8 hari, pada pemilu 1992 lebih adil lagi yaitu PPP mendapat kesempatan kampanye 8 hari, Golkar 8 hari dan PDI 8 hari. Hal ini ternyata mempunyai dampak bagi kenaikan perolehan PDI ataupun jumlah simpatisan PDI.

Walaupun PDI pada pemilu 1992 berhasil merebut 11 kursi yang tersedia, namun Golkar masih tetap menjadi partai yang berkuasa atau partai mayoritas. Keberhasilan PDI meningkatkan kursi dari 6 menjadi 11 kursi bukan berarti PDI sudah berhasil dalam pemilu 1992. Masih ada faktor yang tidak mendukung PDI dalam pemilu 1987 dan pemilu 1992 sehingga tidak mampu menyaingi Golkar. Faktor tersebut antara lain:

Pertama, konsolidasi organisasi pada pemilu 1987 yang kurang baik sangat berpengaruh bagi keberhasilan pemilu 1987. Konsolidasi ini sangat penting sebab akan menentukan kuat tidaknya suatu organisasi. Jika organisasi kuat maka akan dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik. Konsolidasi organisasi juga akan berpengaruh bagi hasil pemilu. Dengan konsolidasi yang kurang baik, maka PDI kurang dapat mempersiapkan pemilu sehingga tidak berhasil secara maksimal. Karena konsolidasi organisasi pada pemilu kurang sempurna pada

pemilu 1992 maka hasilnya juga tidak sebaik pemilu 1992.

Kedua, faktor kebijaksanaan massa mengambang di pedesaan dimana organisasi politik tidak boleh melakukan kegiatan politik di pedesaan. Hal ini berarti sangat merugikan kegiatan politik parpol dalam merebut suara massa mengambang yang sebagian besar di desa-desa. Hubungan dengan massa terputus sampai tingkat kecamatan. Sedangkan bagi Golkar, karena Golkar mempunyai dukungan yang kuat dari birokrat dari Gubernur sampai aparat desa, maka Golkar bisa memanfaatkan birokrat tersebut untuk melakukan kegiatan politik. Dengan aparat desa Golkar menggunakan budaya paternalistik untuk mengikat massa mengambang. Bahkan masih sering terjadi aparat desa menggunakan kedudukannya untuk mengadakan tekanan secara halus terhadap massa agar memilih Golkar. Berarti kebijaksanaan mengambang ini dapat dikatakan hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan PDI maupun PPP.

Ketiga, terbatasnya dana yang dimiliki PDI. Dukungan bagi PDI bukan berasal dari orang-orang yang dari segi ekonomi sangat kuat. Hal ini menyebabkan PDI tidak mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang banyak memakan biaya seperti bantuan pada sekolah-sekolah, pengobatan massal, khitanan massal, memberikan sumbangan pada pembangunan-pembangunan, memberi bantuan pada upacara tradisional seperti yang dilakukan oleh Golkar. Dalam hal ini PDI masih jauh tertinggal dari Golkar, sebab Golkar mempunyai saluran dana yang melimpah baik dari KORPRI, pejabat

maupun pengusaha Golkar yang bukan merupakan tandingan PDI. Padahal untuk menarik massa pendukung kegiatan sosial sangat diperlukan.

Keempat, peranan birokrat dan birokrasi yang sering merugikan parpol. Birokrasi bukan hanya mempengaruhi massa tetapi juga menggiring massa untuk memilih Golkar. Terutama di desa-desa, peranan pejabat pemerintah ini sangat besar. Mereka tidak segan-segan mempengaruhi massa untuk memilih Golkar agar tak mempunyai kesulitan di kemudian hari. Mereka mempunyai ambisi untuk menggiring massa sebab dalam kenyataannya aparat pemerintah sampai di tingkat desa secara langsung merupakan anggota Golkar. Sehingga semakin besar mereka mampu menarik massa semakin menanjak karir mereka, dan aparat pemerintah yang kurang mampu atau tidak berusaha menarik massa untuk memilih Golkar mendapat tekanan secara halus.

Kelima, kepanitiaan dalam Pantarlih. Anggota PDI belum diperbolehkan untuk masuk dalam anggota pantarlih. Sedangkan ketua Pantarlih pada umumnya merupakan pejabat pemerintah. Sedangkan pejabat pemerintah biasanya juga menjadi anggota orsospol tertentu. Berarti secara organisatoris objektivitas Pantarlih patut diragukan. Kerja Pantarlih juga patut diragukan, apakah sudah benar-benar bertindak jujur dan adil. Dalam arti rakyat yang sudah mempunyai hak pilih sudah terdaftar dan rakyat yang belum mempunyai hak pilih benar-benar tidak terdaftar.

E. Peranan PDI dalam Praktek Demokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Klaten

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dalam arti kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem demokrasi, negara Indonesia mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal ini dipertegas juga dalam pasal 1 ayat 2 UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa : "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". MPR ini terdiri dari anggota-anggota DPR, utusan-utusan daerah dan wakil-wakil dari golongan fungsional.³²⁾

Di dalam negara demokrasi kehendak rakyat yang menjadi dasar pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan mengandung pengertian juga bahwa rakyat mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, sehingga rakyat dapat mengambil bagian dalam proses penentuan kebijakan pemerintah. Partisipasi rakyat tersebut dapat disampaikan secara langsung, tetapi dilimpahkan kepada DPR yang merupakan wakil dari rakyat. Adanya lembaga perwakilan tersebut mempertegas bahwa rakyat diharapkan ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka di sini kualitas anggota DPR sangat diperlukan sebab DPR mempunyai fungsi memperhatikan dan menyalurkan aspirasi rakyat. Hal tersebut timbul sebagai

³²⁾C.S.T. Kansil, Memahami Pemilihan Umum dan Referendum, Jakarta: Ind-Hill Co, 1986, h. 1-2.

konsekuensi dari pelaksanaan pasal 1 ayat 2 UUD tahun 1945.

Anggota DPR tersebut ada sebagai hasil dari praktek demokrasi yaitu ketika pemerintahan menyelenggarakan pemilu. Pemilu merupakan puncak dari praktek demokrasi sebab dalam peristiwa tersebut secara langsung melibatkan rakyat. Rakyat mempunyai kebebasan untuk memilih wakilnya. Maka bagi organisasi peserta pemilu, peristiwa tersebut merupakan kesempatan untuk mendapat dukungan dari rakyat. Demikian juga bagi PDI di Kabupaten Klaten, kesempatan ini digunakan untuk mencari pendukung. Pemilu merupakan kesempatan bagi PDI untuk menunjukkan bahwa PDI juga merupakan parpol yang mampu menyalurkan aspirasi rakyat. Demikian juga, PDI turut ambil bagian antara lain dengan menempatkan saksi-saksinya di TPS-TPS, mengirimkan anggotanya untuk mengisi keanggotaan dalam PPD II, PANWASLAK II. Disamping itu PDI juga mempersiapkan jurkam dan kader PDI untuk diterjunkan dalam kampanye, dengan tujuan untuk mengenalkan PDI bahwa PDI merupakan parpol yang mempunyai calon-calon wakil rakyat. Calon-calon wakil rakyat tersebut mempunyai kemampuan membaca dan menyalurkan aspirasi rakyat.

Hasil dari pemilu, PDI di Kabupaten Klaten berhasil menempatkan calon anggota DPRD untuk duduk di kursi DPRD II Kabupaten Klaten. Dalam hal ini PDI dengan wakil-wakilnya yang duduk di DPRD II Kabupaten Klaten fungsinya sebagai wakil rakyat dan bukan sebagai wakil dari parpol tempat asalnya. Jadi tugas DPRD antara lain sebagai jembatan penghubung antara kepentingan rakyat dengan

pemerintah sebagai pelaksana kepentingan rakyat. Disamping sebagai badan perwakilan rakyat, DPRD juga merupakan partner pemerintah dalam merumuskan kebijakan pemerintah, dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa hubungan DPRD dengan Kepala Daerah sangat erat dalam rangka menyalurkan aspirasi rakyat. Demikian pula halnya dengan DPRD II Kabupaten Klaten, yang secara konkrit tertuang dalam peraturan tata tertib DPRD. Pasal 4, DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Bersama-sama Bupati Kepala Daerah menyusun APBD;
- b. Bersama-sama Bupati Kepala Daerah menyusun Peraturan Daerah;
- c. Bersama-sama Bupati Kepala Daerah melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada daerah.³³⁾

Lebih lanjut lagi dalam pasal 5, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya DPRD berkewajiban :

- a. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, jujur, praktis dan pragmatis;
- b. Menjunjung tinggi dan melaksanakan GBHN, TAP-TAP MPR dan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsekuen;
- c. memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat

³³⁾ DPRD Tingkat II Kabupaten Klaten, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Klaten, Klaten, 1992, h. 3.

kehidupan rakyat dengan berpegang teguh pada program pembangunan pemerintah.³⁴⁾

Sebagai wakil rakyat DPRD dituntut mampu membaca dan berani menyalurkan aspirasi rakyat. Kemampuan ini juga berarti kemampuan untuk melakukan komunikasi politik sehingga dapat mengetahui secara benar aspirasi rakyat dan mampu merealisasikannya. Dengan adanya komunikasi politik yang dilandasi kepentingan rakyat, DPRD dapat menetapkan suatu kebijakan, dapat menjalankan fungsinya antara lain memilih, menyeleksi, mengendalikan, mengawasi, mengadakan perubahan, dan dapat menggunakan hak-haknya antara lain: anggaran, mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengadakan perubahan, mengajukan pernyataan pendapat, prakarsa dan penyelidikan.³⁵⁾

Aspirasi rakyat yang diemban PDI melalui wakil-wakilnya di DPRD tingkat II Klaten meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Sebagai contoh dalam proses pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 1993/1994 Kabupaten Tingkat II Klaten. PDI dalam Pendapat Akhir yang disampaikan oleh Soehirman, di bidang politik PDI mengusulkan tentang proses pemilihan Kepala Desa, hendaknyacalon Kepala Desa yang lulus lebih dari dua dan dihindari calon-calon yang masih saudara kandung. Di

³⁴⁾ Ibid.

³⁵⁾ Lihat, UU RI No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU RI No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Semarang: Aneka Ilmu, 1983, h. 49.

bidang ekonomi, terhadap Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), PDI berpendapat bahwa akan lebih menjamin ketenangan dalam mengikuti TRI apabila ada target pendapatan minimal dari setiap petani TRI. Apabila pendapatan kurang dari target minimal, kekurangan itu menjadi tanggung jawab pabrik. Di bidang sosial budaya perjuangan PDI antara lain meliputi peningkatan pendidikan, perbaikan tempat peribadatan.

Mengingat pentingnya tugas PDI melalui wakil-wakilnya di DPRD tingkat II Klaten yaitu sebagai wakil rakyat, maka kualitas anggota sangat diperlukan. Sebab tugasnya bukan hanya sebagai alat kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, tetapi tugasnya yang lebih penting adalah sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan pelaksanaan demokrasi dalam arti yang sebenarnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik sejumlah kesimpulan, sebagai berikut:

Pertama, proses fusi PDI yang terjadi di Pusat diikuti oleh cabang-cabangnya di daerah, baik di Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II. Proses ini juga terjadi di Kabupaten Klaten. Proses fusi PDI di Klaten berjalan lancar, tidak melalui proses yang berbelit-belit dan tidak menimbulkan perselisihan yang berlarut-larut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : proses fusi PDI di Kabupaten Klaten pada dasarnya merupakan perwujudan dari proses konsolidasi organisasi, adanya kesadaran yang tinggi dari masing-masing parpol, sebagai akibat himbuan dari masing-masing parpol induknya. PNI sebagai parpol terbesar di Kabupaten Klaten, yang pertama kali mengambil inisiatif mengajak parpol yang bergabung dalam Kelompok Demokrasi Pembangunan untuk berfusi dalam satu wadah kegiatan politik yakni PDI. Inisiatif tersebut ditanggapi oleh keempat parpol, yakni PARKINDO, IPKI, Patai Katholik dan partai Murba, sehingga menghasilkan fusi PDI di Kabupaten Klaten pada akhir tahun 1973. Tahun 1974 PDI di Kabupaten Klaten secara resmi terbentuk.

Kedua, dalam pemilu 1987 PDI ikut aktif mengambil bagian dalam peristiwa penting tersebut antara lain dengan mengisi keanggotaan dalam panitia pemilihan umum seperti PPD II, PANWASLAK II, menempatkan saksi-saksinya di TPS-TPS, menawarkan program-program PDI melalui kampanye yang semuanya itu dilakukan untuk memperoleh massa pendukung. Sedangkan dalam pemilu 1992 langkah itu lebih diaktifkan lagi dengan mempersiapkan diri lebih dini. Untuk pemilu 1992 PDI membentuk Panitia Pemilihan Umum Tingkat Cabang (PAPPUCAB), Panitia Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan (PAPPUCAM), dan Regu Penggerak Pemilihan Umum (GURAKDES).

Ketiga, faktor-faktor yang mendukung perkembangan PDI dalam pemilu 1987 dan pemilu 1992 jika dilihat dari organisasinya ada dua faktor, yaitu faktor ekstern dan faktor intern. Faktor ekstern antara lain sikap pemerintah dan ABRI yang lebih netral terhadap parpol, situasi dan kondisi PPP dan Golkar. PPP mengalami keruntuhan setelah perselisihan dengan NU, sedangkan Golkar kurang mampu mencari pendukung setelah fasilitator pemerintah dan ABRI agak mengendor. Faktor internnya antara lain konsolidasi organisasi yang semakin mantap materi kampanyenya, ditampilkannya tokoh yang merupakan idola masyarakat serta kualitas personil partai. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat perkembangan PDI antara lain masih diberlakukannya kebijaksanaan massa mengambang, terbatasnya dana, peranan birokrat dan

birokrasi yang merugikan parpol, dan kepanitiaan dalam Pantarlih.

Keempat, perbandingan perolehan suara PDI di Kabupaten Klaten pada pemilu 1987 dan pemilu 1992 menjelaskan bahwa pandangan masyarakat terhadap PDI mengalami perubahan. Perolehan suara PDI yang meningkat menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mempercayakan aspirasi politiknya pada PDI.

Kelima, peranan PDI melalui wakil-wakilnya di DPRD Tingkat II Kabupaten Klaten antara lain : sebagai penyalur aspirasi rakyat ke lembaga yang berwenang, sebagai partner Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam merumuskan kebijakan, sebagai pengawas pelaksanaan jalannya Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Maka tugas yang diemban PDI melalui wakil-wakilnya di DPRD Tingkat II Klaten tidaklah mudah. PDI dituntut untuk mampu membaca aspirasi rakyat dan mengkomunikasikannya ke lembaga yang berwenang demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Kepercayaan yang semakin meningkat berarti juga semakin memperkokoh keberadaan PDI di Kabupaten Klaten. PDI bukan lagi merupakan partai gurem, namun partai yang keberadaannya harus diperhitungkan oleh parpol lainnya. Kepercayaan masyarakat terhadap PDI di Klaten menunjukkan bahwa PDI semakin berusaha memperjuangkan aspirasi rakyat.

B. Saran

1. Keberhasilan PDI di Klaten merebut 11 kursi yang tersedia hendaknya tidak membuat PDI lupa diri. Tetapi PDI harus terus meningkatkan kualitas organisasinya untuk mempersiapkan pemilu yang akan datang. Sebab hilangnya kursi yang dialami Golkar bukan berarti Golkar akan mengalami kekalahan pada pemilu yang akan datang. Ada kemungkinan hilangnya kursi tersebut merupakan hutang Golkar yang akan ditebus pada pemilu yang akan datang.
2. Perkembangan PDI pada pemilu 1987 dan 1992 menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mulai mempercayakan aspirasinya pada PDI. Hal itu berarti bahwa PDI melalui para wakilnya yang duduk di DPRD tingkat II dituntut untuk selalu tanggap terhadap gejolak yang ada dalam masyarakat. PDI harus mampu menjadi wakil rakyat yang mampu menyalurkan aspirasi rakyat. Maka karena pentingnya tugas yang diemban PDI harus meningkatkan organisasi maupun personalianya sehingga tujuan PDI mengemban aspirasi rakyat tercapai dan kekuasaan yang diperoleh tidak membuat lupa diri melainkan semakin menambah rasa tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abar Akhmad Zaini (Penyunting)
1986 Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru, Solo: Ramadhana
- Abdul Munir Mulkhan
1989 Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965 - 1987 dalam Perspektif Sosiologis, Jakarta: Rajawali.
- Ali Moertopo
1974 Strategi Politik Nasional, Jakarta: CSIS.
- Alfian dan Nazaruddin Sjamsuddin (ed)
1988 Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.
- Arbi Sanit
1981 Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Rajawali.
- Deliar Noer
1983 Islam, Pancasila dan Asas Tunggal, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan.
- Denny, J.A. dkk (ed)
1989 Menegakkan Demokrasi. Pandangan Sejumlah Tokoh dan Kaum Muda Mengenai Demokrasi di Indonesia, Jakarta: Yayasan Studi Indonesia.
- Harsono Suwardi
1993 Peranan Pers dalam Politik di Indonesia, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hazairin
1985 Demokrasi Pancasila, Jakarta: Bina Aksara.
- Kansil, C.S.T.
1985 Memilih dan Dipilih, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kansil, C.S.T.
1985 Memahami Pemilihan Umum dan Referendum, Jakarta: IND-HILL-CO.
- Liddle, R. Wiliam
1992 Pemilu-Pemilu Orde Baru Pasang Surut Kekuasaan Politik, Jakarta: LP3ES.
- Mas'ood Mochtar dan Colin MacAndreas
1984 Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: G. M. University Press.
- Miriam Budiardjo
1985 Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia.

- Miriam Budiardjo (ed)
1975 Masalah Kenegaraan, Jakarta: Gramedia.
- Nasution, S. dan Thomas, M.
1985 Buku Penuntun Membuat Thesis, Disertasi, Makalah,
Bandung: Jemmars
- Nazaruddin Sjamsuddin
1993 Dinamika Sistem Politik Indonesia, Jakarta:
Gramedia.
- Ramlan Surbakti
1992 Memahami Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia.
- Roy, C. Macridis dan Bernard, E. Brown (Penyunting)
1992 Perbandingan Politik, Jakarta: Erlangga.
- Rusli Karim
1983 Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah
Potret Pasang Surut, Jakarta: Rajawali.
- Saidi Ridwan
1993 Golkar Pasca Pemilu 1992, Jakarta: Gramedia.
- Saifuddin Zuhri
1982 Kaleidoskop Politik di Indonesia, Jakarta: Gunung
Agung.
- Sayidiman Suryohadiprojo
1987 Menghadapi Tantangan Masa Depan, Jakarta: Gramedia.
- Silaban, Sintong
1992 Tindak Pidana Pemilu Suatu Tinjauan dalam Rangka
Mewujudkan Pelaksanaan yang Jujur dan Adil, Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan.
- Sudirman Tebba
1993 Islam Orde Baru Perubahan Politik dan Keagamaan,
Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Sukanto, Andriana Elisabeth. dkk
1991 FDI dan Prospek Pembangunan Politik, Jakarta:
Gramedia.
- Suryadinata, Leo
1992 Golkar dan Militer Studi tentang Budaya Politik,
Jakarta: LP3ES.
- Toto Pandoyo
1981 Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang
Dasar 1945, Yogyakarta: Liberty.
- N.N.
1988 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka.

N.N.

1985 5 Undang-Undang Baru di Bidang Politik Serta Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya PP No. 35/1985 = PP No. 36/1985, Jakarta: Ghalia Indonesia.

N.N.

1983 UU RI No. 5 Tahun 1979 tentang "Pemerintahan Desa" dan UU RI No. 5 Tahun 1974 tentang "Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah", Semarang: Aneka Ilmu.

Biro Pusat Statistik (BPS)

1987 Kabupaten Klaten dalam Angka 1987, Klaten: BPS.

Biro Pusat Statistik (BPS)

1992 Kabupaten Klaten dalam Angka 1992, Klaten: BPS

B. Artikel

Azam Awang

1991 "Peranan DPRD Riau 1982 - 1987 dalam Menyalurkan Aspirasi Rakyat: Suatu Studi Komunikasi Politik", dalam: Jurnal Ilmu Politik No. 8, Jakarta: Gramedia

Miriam Budiardjo

1981 "Partisipasi dan Partai Politik: Suatu Pengantar", dalam: Miriam Budiardjo, Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai, Jakarta: Gramedia.

Dhakidae, Daniel

1981 "Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia", dalam: Kekuatan Politik dalam Konflik dan Integrasi. Kumpulan artikel Prisma, Jakarta: LP3ES.

Ganewati Wuryandari

1991 "Partai Demokrasi Indonesia dan Pemilu 1992", dalam: Jurnal Ilmu Politik No. 9, Jakarta: Gramedia.

Kaiseipo, Manuel

1981 "Dilema PDI Perjuangan Mencari Identitas", dalam : Kekuatan Politik dalam Konflik dan Integrasi. Artikel Pilihan Prisma, Jakarta: LP3ES.

Soedjatmoko

1956 "The Role of Political Parties in Indonesia", dalam: P.W. Thayer (ed), Nationalism and Progress in Free Asia, Baltimore: The John Hopkin Press.

C. Dokumen

N.N.

1986 Konggres Ketiga PDI, Jakarta: DPP PDI.

N.N.

1986 Tema Kampanye PDI 1987, Jakarta: DPP PDI.

- N.N.
1987 "Hasil Pemungutan Suara Pemilu 1987", dalam:
Keputusan-Keputusan Musda III Golkar, Klaten : DPC
Golkar.
- N.N.
1989 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
PDI, Jakarta: DPP PDI.
- N.N.
1989 Laporan Kegiatan DPC PDI Kabupaten Klaten Masa Bakti
Tahun 1984-1989, dalam: Konperensi PDI Cabang
Klaten, Klaten: DPC PDI.
- N.N.
1990 Program Operasional Mensukseskan Pemilu 1992 dan
Pedoman Pembentukan PAPPU PDI, Jakarta: DPP PDI.
- N.N.
1991 Pernyataan Politik PDI, Jakarta: DPP PDI.
- N.N.
1992 Keputusan Presiden RI No. 8 Th. 1992 tentang
Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum, Bab II
Pasal 7 ayat 2.
- N.N.
1991 Tema Umum Kampanye PDI 1992, Jakarta: DPP PDI.
- N.N.
1991 Tema Umum Kampanye PDI 1992, Semarang: DPD PDI.
- N.N.
1991 Tema Umum Kampanye PDI 1992, Klaten: DPC PDI.
- N.N.
1992 Panitia Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daerah
Tingkat II Kabupaten Klaten, Penyelenggaraan
Pemilihan Umum 1992 di Kabupaten Dati II Klaten,
Klaten: Pemerintah Daerah Tingkat II Klaten.
- N.N.
1992 Peraturan Tata Tertib DPRD Tk II Klaten, Klaten:
DPRD Tk II Klaten.
- N.N.
1993 Risalah Rapat Paripurna DPRD Tk II Klaten, Klaten
DPRD TK II Klaten.
- N.N.
— RADARTALIH. Gelora Sadar Pemilih Pemilu 1992,
Semarang: DPD PDI.

D. Majalah

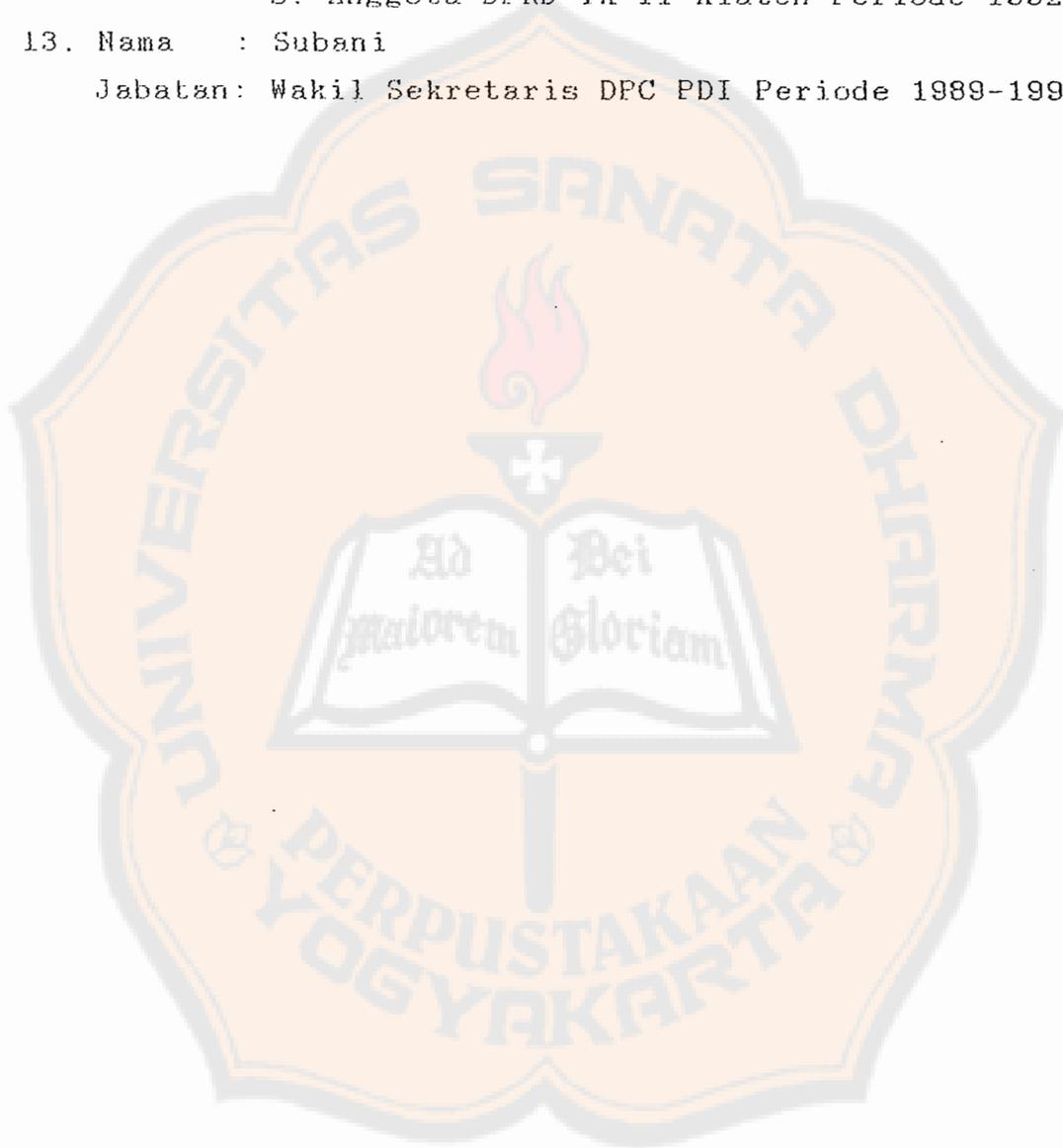
TEMPO No. 52, 23 Februari 1991

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Tulus Wignyo Martono
Jabatan : Ketua DPC PDI Klaten Periode 1973-1978
2. Nama : Sukirno Hadi
Jabatan : a. Sekretaris DPC PDI Klaten Periode 1973-1978
b. Anggota DPRD Tk II Klaten Periode 1987-1992
c. Ketua DPC PDI Klaten Periode 1989-1994
d. Wakil Ketua DPRD Tk II Klaten Periode 1992-1997
3. Nama : Suwarso Warsa Widjojo
Jabatan : a. Wakil Ketua DPC PDI Klaten Periode 1989-1994
b. Anggota DPRD Tk II Klaten Periode 1992-1997
4. Nama : Soehirman
Jabatan : a. Anggota DPRD Tk II Klaten Periode 1987-1992
b. Wakil Ketua DPC PDI Klaten Periode 1989-1994
c. Anggota DPRD Tk II Klaten Periode 1992-1997
5. Nama : Sugiman H.S.
Jabatan : a. Sekretaris DPC PDI Klaten Periode 1989-1994
b. Anggota DPRD Tk II Klaten Periode 1992-1997
6. Nama : Sumardimah Mulyono
Jabatan : a. Wakil Sekretaris DPC PDI Klaten Periode 1989-1994
b. Anggota DPRD Tk II Klaten Periode 1992-1997
7. Nama : Suharto
Jabatan : a. Bendahara DPC PDI Klaten Periode 1989-1994
b. Anggota DPRD TK II Klaten Periode 1992-1997
8. Nama : Hadi Widodo
Jabatan : a. Wakil Bendahara DPC PDI Klaten Periode 1989-1994
b. Anggota DPRD Tk II Klaten Periode 1992-1997
9. Nama : Suyadi
Jabatan : a. Anggota PDI di Kabupaten Klaten
b. Anggota DPRD TK II Klaten Periode 1992-1997
10. Nama : Arinto Prabowo, Bsc
Jabatan: a. Anggota PDI di Kabupaten Klaten
b. Anggota DPRD Tk II Klaten Periode 1992-1997

11. Nama : Supanto Wijoyo Harsono
Jabatan: a. Wakil Ketua DPC PDI Periode 1989-1994
b. Anggota DPRD TK II Klaten Periode 1992-1997
12. Nama : Suwito Wignyowitono
Jabatan: a. Anggota PDI di Kabupaten Klaten
b. Anggota DPRD Tk II Klaten Periode 1992-1997
13. Nama : Subani
Jabatan: Wakil Sekretaris DPC PDI Periode 1989-1994

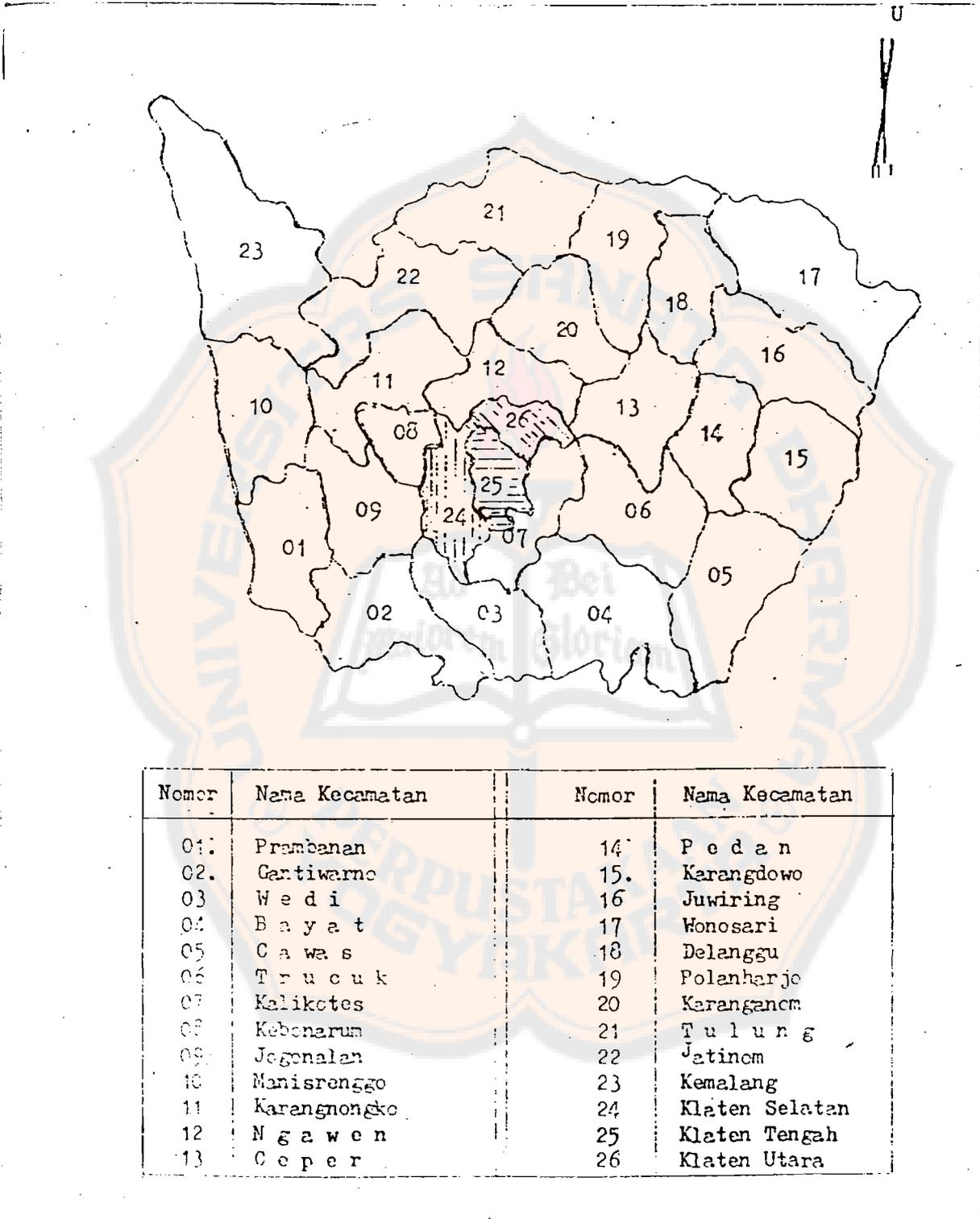


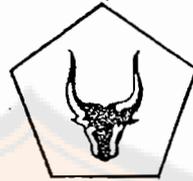
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



SKETSA KABUPATEN KLATEN

SKALA : 1 : 300.000





PDI

EMPAT SIKAP POLITIK

PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

1. SEMANGAT ORDE BARU HARUS TETAP DITUMBUH KEMBANGKAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SECARA MURNI DAN KONSEKUEN.
2. DWIFUNGSI ABRI SEBAGAI KENYATAAN SEJARAH YANG TELAH DIRASAKAN MANFAATNYA BAGI SELURUH RAKYAT DALAM MENGHADAPI SEGALA TANTANGAN, KHUSUSNYA DALAM KENYATAAN AKHIR-AKHIR INI MELALUI OPERASI BHAKTI SEBAGAI PERWUJUDAN KEMANUNGGALAN ABRI DENGAN RAKYAT, PERLU DIPELIHARA DAN DIKEMBANGKAN.
3. PDI DENGAN SELURUH JAJARANNYA MEMBERIKAN DUKUNGAN PENUH DAN MENYATAKAN DENGAN TEGAS MENYATUKAN DIRI DENGAN KEPEMIMPINAN NASIONAL DI BAWAH PIMPINAN PRESIDEN SOEHARTO.
4. SEBAGAI UPAYA UNTUK MENCAPAI PERWUJUDAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA, MAKA SELURUH JAJARAN PDI MENYATAKAN DIRI TERPANGGIL UNTUK MEMBERIKAN PARTISIPASI AKTIF DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DI SEMUA BIDANG DAN DALAM MENJALANKAN PERANANNYA MAKA PDI AKAN TETAP BERSIKAP KOREKTIP - KONSTRUKTIF.

KEPUTUSAN KONGRES KE III PDI TAHUN 1986.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

K E P U T U S A N

Nomor : XI /KPTS/KONGRES III/PDI/IV/1986
K O N G R E S K E T I G A P . D . I .

T E N T A N G

TANDA GAMBAR PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
DALAM PEMILIHAN UMUM 1987

KONGRES KETIGA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
TGL.15-18 APRIL 1986 DI JAKARTA,

MENYINGKAP

: bahwa perlu menetapkan Tanda Gambar Partai Demokrasi Indonesia dalam Pemilihan Umum 1987 yang mengungkapkan bahwa asas Partai Demokrasi Indonesia adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

MENYINGKAP

1. Amanat Bapak Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada Pembukaan Kongres III PDI di Jakarta pada tanggal 15 April 1986;
2. Ceramah/Pengarahan Bapak Menteri Dalam Negeri pada Kongres III PDI tanggal 15 April 1986;
3. Ceramah/Pengarahan Bapak Pangab/Pangkopkamtib pada Kongres III PDI tanggal 15 April 1986.

MENYINGKAP

1. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
2. Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1983 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1985 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
4. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PDI;
5. Keputusan-keputusan Kongres II Tahun 1981.

MENYINGKAP

: Saran, usul dan pertimbangan peserta Kongres dalam Sidang Kongres serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dalam Komisi Pemilihan Umum 1987.

M E M U T U S K A N :

MENYINGKAP

P e r t a m a : Tanda Gambar Partai Demokrasi Indonesia dalam Pemilihan Umum 1987 ialah "Kepala Banteng dalam perisai Garuda Pancasila dengan tambahan tulisan PDI yang merupakan landasan segi lima", sebagaimana terlampir pada Kepu-

Kedua

: Mengenai Tanda Gambar PDI dalam Pemilihan Umum 1987 perlu diadakan konsultasi dengan Pemerintah lebih dahulu.

Ketiga

: Menugaskan dan memberi wewenang kepada DPP-PDI untuk melaksanakan diktum kedua.

Keempat

: Menugaskan dan memberikan wewenang kepada DPP-PDI untuk menjabarkan dan memasyarakatkan Tanda Gambar tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 April 1986.

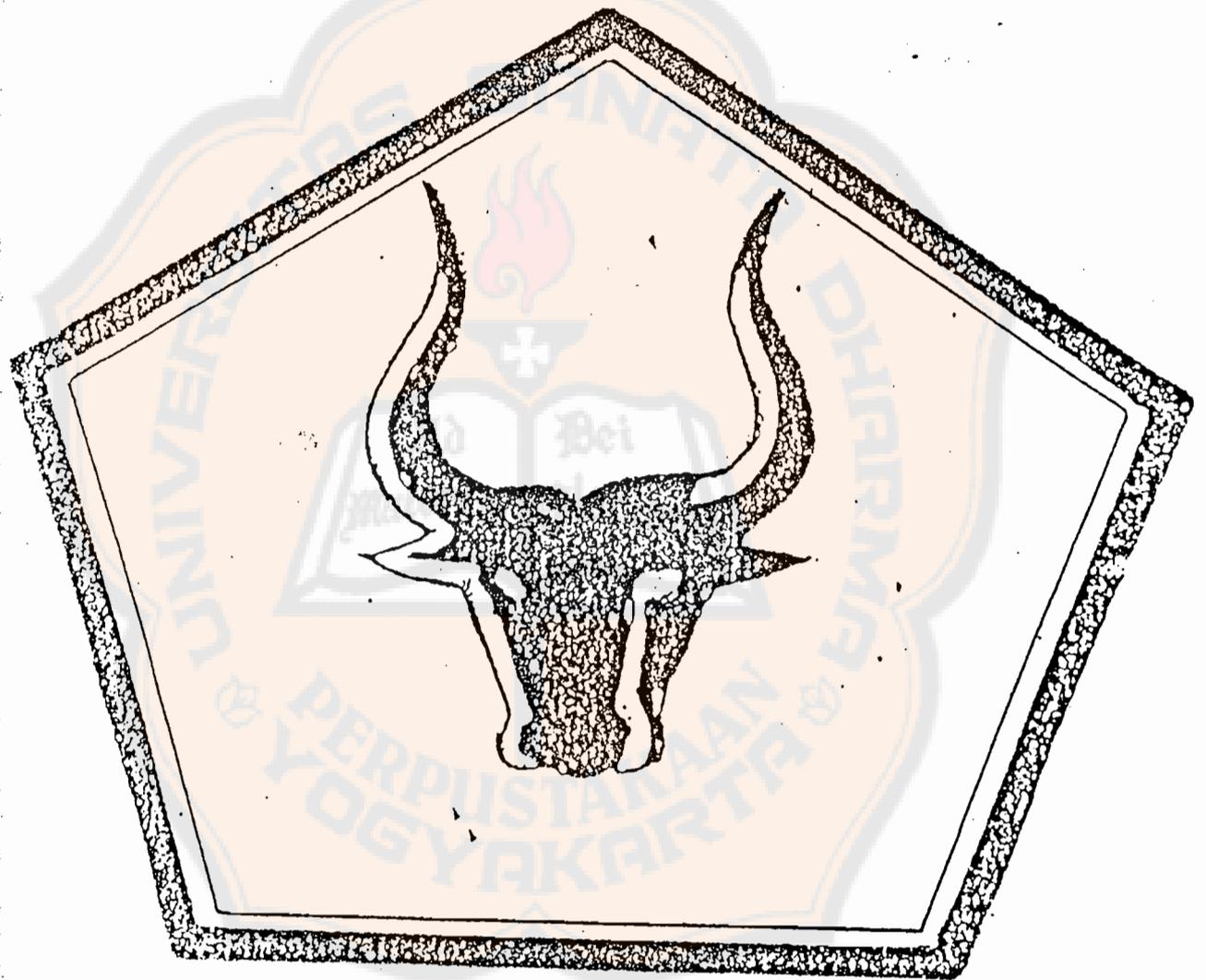
Pimpinan Sidang Kongres,

K e t u a ,

S e k r e t a r i s ,

S. Wignyoemarsono.

Sabam Sirait.



P . D . I

SUSUNAN PENGURUS PDI KLATEN
PERIODE 1983-1989

1. K e t u a : Soemardjo Siswohartono.
2. Wakil Ketua : S o e m a r d i .
3. Wakil Ketua : Sri S u b a r i .
4. Wakil Ketua : S a n t o y o .
5. Wakil Ketua : Sri Adi Pamenang. (di. Jakarta)
6. Wakil Ketua : A . S u y o n o .
7. Wakil Ketua : Tys. Hartosudibyo.
8. Wakil Ketua : Yoso Sutardjo. (Tealah meninggal -
Dunia.)
9. Wakil Ketua : Ny. Marah Johan.
10. Sekretaris : H a r y a n t o .
11. Wakil Sekretaris : S u y a d i .
12. Wakil Sekretaris : D a r w i t o .
13. Wakil Sekretaris : St. S u w i t o .
14. Wakil Sekretaris : S u g i m a n .
15. Wakil Sekretaris : S u k i r m a n .
16. Bendahara : Sukarno Sujatmiko.
17. Wakil Bendahara : S u g i l a n t o . (menyatakan mundur
18. Wakil Bendahara : Puguh Rianto.
19. Wakil Bendahara : St. Sutarmin. (dibebaskan dari se-
luruh tugas Partai

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLKAR KARYA
DAERAH TINGKAT II KLATEN

HASIL PEMERTUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 1987.
TANGGAL : 23 APRIL 1987
BERDASARKAN HASIL RAPAT PEMERTUNGAN SUARA DI DPD
GOLKAR DAERAH TINGKAT II KLATEN

No	KECAMATAN	HASIL PEMILU TAHUN 1982						HASIL PEMILU TAHUN 1987 KHUSUS UNTUK DPRD II										LETS - PANTEN
		PEMILIH	TPS	PPP	GOLKAR	%	PDI	PEMILIH	TPS	KIRKA	LIFUTAN	20/4/	GOLKAR	%	PPP	PDI	JUMLAH	
1.	KOTA KLATEN	37.430	101	7.373	18.355	55,91	7.102	42.587	114	59,58%	55.375	59,58	22.641	61,51	6.838	7.330	36.909	
2.	KETANDAN	37.059	113	13.236	13.667	40,81	6.586	42.486	113	49,98%	21.227	49,96	17.879	47,33	12.541	7.251	37.771	
3.	KEBOHARUM	28.662	103	5.702	16.778	62,40	4.407	32.315	99	65,95%	21.310	65,94	18.645	64,21	5.141	5.254	29.041	
4.	W E D I	27.680	99	5.340	14.873	58,90	5.039	30.355	99	63,66%	19.325	63,66	17.660	64,79	4.927	4.569	27.256	
5.	JOGONALAN	27.956	105	4.093	16.853	64,20	5.034	30.713	105	65,33%	20.064	65,32	19.606	64,80	3.844	6.264	28.714	
6.	PRAMBANAN	21.478	74	2.436	13.637	69,89	3.438	24.055	74	69,45%	16.706	69,44	16.426	76,27	1.337	3.275	21.538	
7.	KARANGMUNGGO	19.127	76	3.087	11.877	68,15	2.467	21.011	76	64,48%	13.549	64,48	13.450	72,08	1.776	3.435	18.661	
8.	GANTIMARJO	21.082	84	2.973	12.348	64,56	3.804	22.854	84	65,73%	15.021	65,72	15.133	72,72	2.536	3.142	20.811	
9.	MANISRENGGO	20.024	59	2.787	11.237	62,09	4.073	21.820	58	65,72%	14.340	65,71	13.373	70,05	1.975	3.744	19.092	
10.	KEMALANG	17.313	56	691	13.337	83,06	2.029	18.157	56	73,19%	13.287	73,17	13.635	81,98	5.579	2.419	16.634	
11.	DELANGGU	22.619	92	4.027	14.423	68,09	2.733	25.167	89	70,71%	17.795	70,70	15.883	69,75	3.463	3.427	22.778	
12.	C E P E R	28.916	96	8.053	13.527	50,54	5.183	32.409	96	50,54%	16.379	50,53	15.260	52,74	7.557	6.115	28.932	
13.	JUMIRING	29.087	96	8.713	15.322	56,86	2.914	31.448	96	59,14%	18.599	59,14	17.270	61,62	7.232	3.525	28.027	
14.	WGNOSARI	28.322	101	6.008	14.284	55,53	5.431	32.098	101	62,52%	20.063	62,52	15.937	58,18	5.540	6.839	23.366	
15.	JATINOM	27.709	98	5.127	17.185	67,80	3.034	30.845	85	69,92%	21.569	69,92	19.163	69,58	4.752	3.624	27.539	
16.	POLANHARJO	23.106	83	4.863	13.309	62,59	3.089	25.090	83	68,79%	17.260	68,79	15.305	67,22	4.402	3.061	22.768	
17.	T U L U N G	26.565	95	5.946	51.043	62,55	3.022	29.038	95	36,67%	18.489	63,67	16.024	63,74	5.506	3.610	25.140	
18.	KARANGMUNH	24.967	97	7.478	12.478	55,77	2.418	26.836	94	60,24%	16.166	60,23	14.436	69,13	6.562	3.397	24.395	
19.	P E D A N	23.140	77	4.322	12.020	56,80	4.818	25.225	75	52,47%	13.236	52,47	11.860	53,13	3.631	6.731	22.322	
20.	B A Y A T	29.936	104	6.743	14.346	53,58	5.687	32.471	114	61,99%	20.129	61,99	16.254	57,10	6.560	5.652	28.466	
21.	C A W A S	34.343	125	4.532	22.533	71,76	4.287	36.942	125	71,73%	26.499	71,73	25.255	77,03	3.606	3.924	32.785	
22.	T R U C U K	36.728	105	6.708	20.110	60,31	6.524	40.620	104	58,10%	23.602	58,10	21.814	58,85	6.599	8.236	36.053	
23.	KARANGDOWO	25.596	91	2.834	18.598	77,83	2.447	88.928	91	78,39%	22.677	78,39	20.967	80,74	1.953	3.645	25.970	
J U M L A H		629.156	2144	123.127	346.140	61,25	95.831	680.592	2130	62,82%	429.452	63,09	392.287	64,32	109.512	103.069	679.858	

KLATEN, 24 SEPTEMBER 1987
DEWAN PIMPINAN DAERAH GOLKAR KARYA
DAERAH TINGKAT II KLATEN
K e t a r a , G O L K A R K A R Y A
D A T I - I I
RANTIMAN SUYONO BUDUNG PRIYAGODO, SE
NPAG : 1223000002 NPAG : 1223000006

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

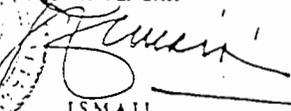
111

DAFTAR : ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II K L A T E H HASIL PEMILIHAN
UMUM 1987 YANG DIRESMIKAN PEMBERHENTIANNYA

NO.	N A M A	YANG DIPILIH		YANG DIANGKAT	KEDUDUKAN
		GOLONGAN POLITIK	GOLONGAN KARYA	GOLONGAN KARYA ABRI	
1	2	3	4	5	6
1.	AH. Sartono	PPP	-	-	Anggota
2.	Mardiyono Martono Puspito	PPP	-	-	Wakil Ketua
3.	Sayuti, Bsc	PPP	-	-	Anggota
4.	Ny. Siti Aminah Sahrowardi	PPP	-	-	Anggota
5.	H. B u s o n o	PPP	-	-	Anggota
6.	Hasrudin Letif	PPP	-	-	Anggota
7.	Ahmad Zainuddin	PPP	-	-	Anggota
8.	Rantiman Suyono	-	GOLKAR	-	Ketua
9.	Ranelan Jitnowardojo	-	GOLKAR	-	Anggota
10.	Y. Soetopo, Bsc	-	GOLKAR	-	Anggota
11.	Drs. Ig. Sumarno	-	GOLKAR	-	Anggota
12.	S u r i p t o, BA	-	GOLKAR	-	Anggota
13.	H. Moh. S o l e h	-	GOLKAR	-	Anggota
14.	H. S u h a r t o	-	GOLKAR	-	Anggota
15.	S u p a r n o	-	GOLKAR	-	Anggota
16.	Titus Wasana	-	GOLKAR	-	Anggota
17.	Ny. Siti Supartini, BA	-	GOLKAR	-	Anggota
18.	Djumadi, BA	-	GOLKAR	-	Anggota
19.	Drs. Sunaryo alias Mariyo	-	GOLKAR	-	Anggota
20.	Ny. Ngadiningsih Mariyo	-	GOLKAR	-	Anggota
21.	Drs. Sochib Dimjati	-	GOLKAR	-	Anggota
22.	Marghono, BE	-	GOLKAR	-	Anggota
23.	Ny. Sri Sulastri Y. Suharto	-	GOLKAR	-	Anggota
24.	Drs. Bandoyo	-	GOLKAR	-	Anggota
25.	Marsigit, BA	-	GOLKAR	-	Anggota
26.	Soeranto Ranto Soedarmo, BcEk	-	GOLKAR	-	Anggota
27.	Ny. Salmah Sarno	-	GOLKAR	-	Anggota
28.	S a l e h, BA	-	GOLKAR	-	Anggota
29.	Sutanto Heru Tjahyono	-	GOLKAR	-	Anggota
30.	Drs. Val. Bambang Setyawan	-	GOLKAR	-	Anggota
31.	Soemardjo Siswohartono	PDI	-	-	Anggota
32.	S u m a r d i	PDI	-	-	Anggota
33.	Haryanto SWP	PDI	-	-	Anggota
34.	S u g i m a n. HS	PDI	-	-	Anggota
35.	S u y a d i, BA	PDI	-	-	Anggota

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1	2	3	4	5	6	7
36.	Sukirno Hedi	FDI	-	-	Anggota	
37.	Ltkol. Inf. Darman Lucis	-	-	TNI - AD	Wakil Ketua	
38.	Ltkol. Inf. Yanto Subarto, BA	-	-	TNI - AD	Anggota	
39.	Ltkol. Psk. Drs. Estari	-	-	TNI - AU	Anggota	
40.	Ltkol. Lent. (KH). Suxandi, SE	-	-	TNI - AL	Anggota	
41.	Ltkol. Inf. Yasien, BA	-	-	TNI - AD	Anggota	
42.	Ltkol. Ori. Faidi	-	-	TNI - AD	Anggota	
43.	Ltkol. Kes. Asmadi, BA	-	-	TNI - AU	Anggota	
44.	Ltkol. Inf. Marsudi	-	-	TNI - AD	Anggota	
45.	Mayor. Pol. Soedali, Bac	-	-	POLRI	Anggota	

MENTERI DALAM NEGERI
 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

 ISMAIL

LAMPIRAN KEPUTUSAN KONPERCAB. PDI KLATEN

Nomor : XI/KPTS/KONPERCAB-KLATEN/III/1989.

SUSUNAN DEWAN PERTIMBANGAN CABANG PDI KLATEN MASA BAKTI
1989 - 1994 , HASIL KONPERCAB PDI KLATEN 10 MARET 1989.

K e t u a : Jalil Padyosuharso .
A n g g o t a : Suharno.
A n n g g o t a : Suwito.
A n g g o t a : Ny. Marah Johan.
A n g g o t a : S. Djatipurnomo.

Ditetapkan di : K l a t e n

Pada tanggal : 10 Maret 1989

KONFERENSI CABANG PDI KLATEN TH. 1989

PIMPINAN SIDANG



DRS. SUJANTO.

Wk. Ketua DPD PDI
Jawa Tengah.

MENGETAHUI

SEKJEN. DPP.-PDI.

NICO DARYANTO.

SUSUNAN PENGURUS DPC PDI KLATEN PERIODE 1989 - 1994 , HASIL
KONPERCAB PDI KLATEN TANGGAL 10 MARET 1989 DI K L A T E N.

=====

1. K e t u a : Sukirno Hadi.
2. Wakil Ketua : Soekarno Soejatmiko.
3. Wakil Ketua : A. Suyono.
4. Wakil Ketua : Suwarso Warsowidjojo.
5. Wakil Ketua : Santoyo.
6. Wakil Ketua : Supanto Wijoyoharsono.
7. Wakil Ketua : Ny. Indarwati Suhirdi.
8. Wakil Ketua : Suhirman.

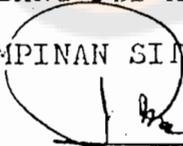
9. S e k r e t a r i s : Kardjono.
10. Wakil Sekretaris : Ny. Sumardimah Mulyono.
11. Wakil Sekretaris : Sugiman HS.
12. Wakil Sekretaris : Harri Pramono.
13. Wakil Sekretaris : Subani.

14. B e n d a h a r a : Soeharta.
15. Wakil Bendahara : Widodo.

Ditetapkan di : K l a t e n
Pada tanggal : 10 Maret 1989.

KONPERENSI CABANG PDI KLATEN TAHUN 1989

PIMPINAN SIDANG


DRS. SUYANTO.
Wk. Ketua DPD PDI
Jawa Tengah.



MENGETAHUI
SEKJEN. DPP.-PDI.

NICO DARYANTO.



Formulir Pendaftaran

MENJADI ANGGOTA PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

1. Nama Lengkap : _____
2. Tempat dan Tanggal lahir : _____
3. Agama : _____
4. Pendidikan : _____
5. Pekerjaan : _____
6. Alamat lengkap : _____
7. Jabatan dalam Organisasi : _____

19

Pendaftar

(_____)

Mengetahui :

KORCAM. PDI

KORDES. PDI

CATATAN :

Foto ukuran 2X3X3



- Nomor : _____
- Nama Lengkap : _____
- Tempat/Tgl lahir : _____ Lahir
- Agama : _____
- Pekerjaan : _____
- Alamat : _____

19

DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

(_____)

(_____)

Tanda Tangan/Cap Jempol
Pemegang Kartu Anggota.

JADWAL KAMPANYE
PEMILU 1992

3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

No.	Bentuk Kampanye	Hari / Tanggal	Tempat	Jurkam	Jml Peserta
1	2	3	4	5	6
1.	Rapat Umum	Rabu 13-5-1992	Lapangan Desa Lawanghari, kec. Menisrengga	1. DRA. ANDRIATI 2. SUKIRNO HADI (DPC. PPP)	± 6.000 orang
2.	Rapat Umum	Sabtu 16-5-1992	Lapangan Desa Ba- repan Kec. Cawas	1. DRA. SRI SUMI- YATI 2. K. ILNAJIB RUSI- DI (DPW. PDI) 3. SUKIRNO HADI (DPC. PDI)	± 8.000 orang
3.	Rapat Umum	Selasa 19-5-1992	Lapangan Merdeka Kec. Delanggu	1. TULUS WIGNYO MARTONO 2. SUKIRNO HADI (DPC. PDI)	± 10.000 org
4.	Rapat Umum	Jum'at 22-5-1992	Stadion Trikoyo Klaten	1. M. GAWATI SU- KARNO (DPP. PDI) 2. SUKARNO DUFAL. BSc (DPW. PDI)	± 10.000 org
5.	Rapat Umum	Senin 25-5-1992	Lapangan Gelora Kec. Pedan	1. SUKIRNO HADI 2. TULUS WIGNYO MARTONO (DPC. PDI)	± 7.000 org
6.	Rapat Umum	Kamis 28-5-1992	Lapangan Bonyokan Kec. Jatnom	1. SARDITO DASU- KI (DPW. PDI) 2. DRS. H. SURYADI (DPP. PDI)	± 10.000 org
7.	Sarasehan	Minggu	Di 16 Tempat	Dari DPC. PDI Klaten	Rata-rata 300 orang
8.a	Pertemuan Umum	Rabu 3-6-1992	1. Di 11 Tempat	Dari DPW. PDI dan DPC. PDI	Rata-rata 400 orang
b	Rapat Umum		2. Lapangan Wedi Kec. Wedi 3. Lapangan Krido Buwono Kec. Pram- banan. 4. Lapangan Desa Gunting, Kec. -	1. BANTU SUNAR- YO (DPW. PDI) - SUKIRNO HADI (DPC. PDI). - SUBANI (DPC. PDI)	± 9.000 orang ± 10.000 org ± 15.000 org

DATA PEROLEHAN SUARA TETAP OPP PEMILU 1992
KABUPATEN KLATEN, UNTUK KEANGGOTAAN DPRD II

NO.	KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH YANG HADIR	PEROLEHAN SUARA TETAP			KETERANGAN
				PPP	GOLKAR	PDI	
1.	NGAWEN	65	23.501	9.963	7.507	4.941	
2.	KALIKOTES	46	16.633	2.218	6.871	5.638	
3.	KEBONARUM	34	11.007	2.291	4.829	3.400	
4.	WEDI	99	28.774	5.532	12.969	9.005	
5.	JOGJALAN	105	30.557	4.391	14.252	10.559	
6.	PRAMBANAN	73	23.405	2.523	13.300	6.322	
7.	GANTJAWIRNO	84	21.361	3.244	10.851	6.124	
8.	MANISRENGGO	58	20.092	2.470	9.861	7.267	
9.	KEMALANG	56	17.041	974	10.824	5.157	
10.	KARANGNGKO	76	20.018	2.777	9.588	6.416	
11.	JATINOM	89	29.781	5.670	14.220	8.285	
12.	KARANGANOM	93	26.004	7.190	11.931	6.275	
13.	POLANHARJO	83	24.389	4.890	13.133	5.485	
14.	TULUNG	95	27.305	5.688	13.954	6.229	
15.	DELANGGU	86	24.759	3.696	14.290	5.906	
16.	CEPER	96	32.317	8.313	12.992	9.736	
17.	WONOSARI	101	32.314	5.352	14.156	11.387	
18.	JUWIRING	94	31.251	7.712	14.730	7.457	
19.	PEDAN	75	24.904	3.879	11.446	8.562	
20.	KARANGDOWO	90	27.378	2.442	17.914	5.980	
21.	CAWAS	125	34.020	4.157	19.666	8.913	
22.	TRUCUK	104	38.932	6.514	19.862	10.970	
23.	DAYAT	115	31.199	6.385	12.572	10.720	
24.	KLATEN UTARA	49	20.139	4.299	7.994	6.937	
25.	KLATEN TENGAH	71	23.848	4.003	11.714	6.950	
26.	KLATEN SELATAN	65	20.497	3.526	10.165	5.904	
JUMLAH		2.132	663.275	121.099	321.171	190.613	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran I : Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 9 Juli 1992.
Nomor : 171/277/1992.

DAFTAR : ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II ~~KLATEN~~ HASIL PEMILIHAN
UMUM 1992 YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA

NO.	N A M A	YANG DIPILIH		YANG DIANGKAT	AGAMA	KETERANGAN
		GOLONGAN POLITIK	GOLONGAN KARYA	GOLONGAN KARYA ABRI		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mardiyono Martono Puspito	PPP	-	-	Islam	
2.	Muh. Tantowi Jauhari, SH	PPP	-	-	Islam	
3.	Sayuti, Bsc	PPP	-	-	Islam	
4.	H. Muhammad Kufri Diriyati	PPP	-	-	Islam	
5.	Komarudin Arsed	PPP	-	-	Islam	
6.	A.H. Sartono	PPP	-	-	Islam	
7.	Drs. H.M. Muslim. P	PPP	-	-	Islam	
	Mohammad Soedarjo	-	GOLKAR	-	Islam	
9.	Y. Soetopo, Bsc	-	GOLKAR	-	Katholik	
10.	Marghono, EE	-	GOLKAR	-	Islam	
11.	Drs. Val. Bambang Setiawan	-	GOLKAR	-	Katholik	
12.	K. Soebagyo	-	GOLKAR	-	Islam	
13.	Ny. Sumi'ia Subroto	-	GOLKAR	-	Islam	
14.	Drs. Sri Subardo	-	GOLKAR	-	Kristen	
15.	Ny. Astuti Supardjo, BBA	-	GOLKAR	-	Islam	
16.	Sutanto Heru Tjahyono	-	GOLKAR	-	Islam	
17.	Djumadi, BA	-	GOLKAR	-	Katholik	
18.	Suparno	-	GOLKAR	-	Islam	
19.	Ny. Sri Widajati, SH	-	GOLKAR	-	Islam	

20.....

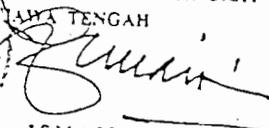
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1	2	3	4	5	6	7
20.	Drs. M. Sureddi	-	GOLKAR	-	Islam	
21.	Ny. H. Sugihartati Supriady	-	GOLKAR	-	Islam	
22.	Sunardi	-	GOLKAR	-	Islam	
23.	Sukarno	-	GOLKAR	-	Islam	
24.	Gunung Wagiyo	-	GOLKAR	-	Islam	
25.	E.H. Sutanto	-	GOLKAR	-	Islam	
26.	Sakirno Hadi	PDI	-	-	Katholik	
27.	Suginan. ES	PDI	-	-	Islam	
28.	Subarto	PDI	-	-	Islam	
29.	Suwarso Warso Wijoyo	PDI	-	-	Islam	
30.	Supanto Wijoyoharsono	PDI	-	-	Islam	
31.	Hadididodo	PDI	-	-	Katholik	
32.	Sumardimah. M	PDI	-	-	Islam	
33.	Suzito Wigayowitono	PDI	-	-	Islam	
34.	Soehirwan	PDI	-	-	Islam	
35.	Suyadi, BA	PDI	-	-	Islam	
36.	Arinto Prabowo, Bsc	PDI	-	-	Katholik	
37.	Ltkol. Inf. Priyanto	-	-	TNI-AD	Islam	
38.	Ltkol. Czi. Sadirin	-	-	TNI-AD	Islam	
39.	Ltkol. Czi. Paldi	-	-	TNI-AD	Islam	
40.	Ltkol. Inf. Marsudi	-	-	TNI-AD	Islam	
41.	Ltkol. Kes. Ismedi, BA	-	-	TNI-AU	Islam	
42.	Ltkol. Inf. Sabar Widodo	-	-	TNI-AD	Islam	

43.....

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1	2	3	4	5	6	7
43.	Mayor Kes. H. Dadang Abdullah	-	-	TKI-AU	Islam	
44.	Ltkol. Laut (P). Drs. Sri Widodo, E	-	-	TKI-AL	Protestan	
45.	Mayor Pol. Syamsuri	-	-	POLRI	Islam	


 MENTERI DALAM NEGERI
 GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

 ISMAIL

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLATEN

SUSUNAN

KOMISI A, B, C, D DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLATEN

KOMISI A PERIODE 1992-1997

a. Anggota DPRD Kab. Dati II Klaten :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Sadirin | - Ketua Komisi ; |
| 2. Supanto Wijoyoharsono | - Wakil Ketua Komisi ; |
| 3. Drs. Val. Bambang Setyawan | - Sekretaris Komisi ; |
| 4. M. Tontowi Jauhari, SH | - Anggota Komisi ; |
| 5. Suhirman | - Anggota Komisi ; |
| 6. Ny. Sri Widajati, SH | - Anggota Komisi ; |
| 7. Suparno | - Anggota Komisi ; |
| 8. Sabar Widodo | - Anggota Komisi ; |

KOMISI B PERIODE 1992-1997

1. Dari Anggota DPRD Kab. Dati II Klaten :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Arinto Prabowo, BSc | - Ketua Komisi ; |
| 2. Sayuti, BSc | - Wakil Ketua Komisi ; |
| 3. Marsudi | - Sekretaris Komisi ; |
| 4. Sutanto Heru Tjahyono | - Anggota Komisi ; |
| 5. Sumi'in Subroto | - Anggota Komisi ; |
| 6. Ganung Wagiyo | - Anggota Komisi ; |
| 7. Suwito Wignyowitono | - Anggota Komisi ; |
| 8. H. Dudung Abdullah | - Anggota Komisi ; |

Sumber: kantor DPC
PDI Klaten

KOMISI C PERIODE 1992-1997

A. Dari Anggota Komisi C DPRD :

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Sdr. K. Soebagyo | - Ketua Komisi. |
| 2. " Hadiwidodo | - Wk. Ketua Komisi. |
| 3. " Djumadi, BA | - Sekretaris Komisi. |
| 4. " M.M. Mafti Dimyathi | - Anggota Komisi. |
| 5. " Sukarno | - idem |
| 6. " Ny. Astuti Supardjo, BBA | - idem |
| 7. " Ny. Sumardimah M. | - idem |
| 8. " Dra. Sri Widodo | - idem |

KOMISI D PERIODE 1992-1997

Dari Anggota DPRD Kabupaten Dati II Klaten :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Sdr. Marghono, BE | - Ketua Komisi ; |
| 2. " Suwarso Warsowijoyo | - Wakil Ketua Komisi ; |
| 3. " Asmadi, BA | - Sekretaris Komisi ; |
| 4. " Suharto | - Anggota Komisi ; |
| 5. " Komarudin Arsad | - idem |
| 6. " Paidi | - idem |
| 7. " Drs. Sri Suhardo | - idem |
| 8. " Sunardi | - idem |
| 9. " Moh. Soedarjo | - Koordinator Komisi. |

KOMISI E PERIODE 1992-1997

Dari Anggota DPRD Kabupaten Dati II Klaten :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Sdr. Y. Sutopo, BSc. | - Ketua Komisi ; |
| 2. Sdr. A. H. Sartono | - Wakil Ketua Komisi ; |
| 3. Sdr. E. H. Sutanto | - Sekretaris Komisi ; |
| 4. Sdr. Ny. Hj. Sugihartati Supriady | - Anggota Komisi ; |
| 5. Sdr. Sugiman. HS. | - Anggota Komisi ; |
| 6. Sdr. Suyadi. PA. | - Anggota Komisi ; |
| 7. Sdr. Syamsoeri | - Anggota Komisi ; |